

A J U R N A L ANALISIS SOSLA

Edisi 2/Februari 1996

TANTANGAN GLOBALISASI: Mampukah Usaha Rakyat Menjadi Aktor Utama Dalam Perekonomian Nasional?

Eksistensi Usaha Rakyat Dalam Perspektif Globalisasi
Hetifah Sjaifudian

Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil & Menengah
Hastu Prabatmodjo

Pengembangan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah

Thee Kian Wie

Pekerja Perempuan Dalam Globalisasi Ekonomi

Indrasari Tjandraningsih

Mencari Format Kebijakan Pengembangan Usaha Rakyat

Dedi Haryadi & Erna E. Chotim

Isu Lingkungan Dalam Pengembangan Usaha Kecil

Juni Thamrin

Ruang Metodologi Oleh:

Sediono M.P. Tjondronegoro

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAHASAN UTAMA	
▲ Eksistensi Usaha Rakyat Dalam Perspektif Globalisasi	1
▲ Mengembangkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah Di Era Perdagangan Bebas	19
▲ Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah Dalam Rangka Menghadapi Integrasi Ekonomi Global	39
▲ Usaha Rakyat dan Perdagangan Bebas: Mencari Format Kebijakan	51
▲ Pekerja Perempuan di Usaha Kecil: Fenomena Buruh Rumahan dalam Globalisasi	63
▲ Me nyikapi Isu Lingkungan Dalam Pengembangan Usaha Kecil di Era Liberalisasi	75
RUANG METODOLOGI	
▲ Metodologi Penelitian Sosial: Suatu Pengantar	91
RESENSI BUKU	
▲ Perempuan Juga Ingin Diperhatikan	101
BERITA PERPUSTAKAAN	
▲ Manfaat Internet Untuk Mencari Informasi	109
SEPUTAR AKATIGA	121

Pemimpin Utama

Direktur Eksekutif AKATIGA

Tim Redaksi

Endang Suhendar
Rimbo Gunawan

Diterbitkan Oleh

Yayasan AKATIGA
Pusat Analisis Sosial

Penyunting Bahasa

A.Diana Handayani

Alamat Redaksi

Jl. Raden Patah 28 Bandung 40132
Telp./Fax.: (022) 2502622

Penata Letak & Perancang Kulit

Budiman Pagarnegara

KATA PENGANTAR

Saat ini di sekitar kita sedang gegap gempita membicarakan suatu era dimana situasi dunia menjadi sangat transparan --bak sebuah rumah kaca-- di dalamnya diwarnai dengan aliran arus barang dan jasa bebas dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Situasi tersebut semakin intensif dan canggih berkat penggunaan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat menyusup sampai ke pojok-pojok dunia.

Secara netral situasi seperti itu tentu akan menyenangkan dan menguntungkan banyak pihak. Di mana-mana barang dan jasa dengan berbagai pilihan kualitas tersedia secara memadai dan mudah diakses oleh konsumen. Peristiwa-peristiwa apapun di berbagai pelosok dunia dapat diketahui secara mungkin, sehingga banyak pihak dapat segera memberikan respons atas kejadian-kejadian yang menimpa sebagian umat di atas permukaan bumi ini.

Akan tetapi persoalannya yang masih menghadang besar dihadapan kita adalah situasi dan kondisi nyata di dunia. Situasi tersebut tidak pernah netral dan bebas kepentingan --terutama dalam penguasaan aset sumberdaya informasi, materi dan energi dunia yang tidak merata--. Bahkan cenderung ada sebagian Negara-negara kaya dan maju yang telah bertahun-tahun menguasai dan mendominasi sumber-sumber tersebut dan tidak rela untuk melepaskannya. Situasi yang serupa terjadi pula di berbagai tingkat dalam masyarakat di Indonesia.

Dalam kondisi seperti itu, gagasan dan arus globalisasi tidak dapat dihindari, tetapi mungkin dapat disiasati untuk mencari solusi terbaik terutama bagi rakyat kebanyakan di Indonesia. JURNAL ANALISIS SOSIAL yang baru nomor kedua ini, dikhususkan untuk menelaah lebih jauh dampak dan strategi apa yang dapat dikembangkan dalam rangka menghadapi era globalisasi, agar kepentingan rakyat dapat diselamatkan bahkan dapat dikembangkan. Apakah era ini secara structural memang dapat menguntungkan kelompok-kelompok masyarakat kecil atau bahkan secara sistematis akan menyingkirkan mereka dari gelanggang ekonomi politik makro? Pertanyaan tersebut menarik untuk dianalisis dan dikritisi lebih lanjut.

Redaksi sengaja mengundang berbagai pihak yang mempunyai kepedulian besar, untuk memberikan kontribusi dalam jurnal ini, terutama mereka yang telah mempunyai keahlian dan pengalaman yang mendalam pada isu yang satu ini. Harapan besar agar jurnal ini dapat memberikan pengalaman dan penghayatan yang kritis dan dapat menghasilkan gagasan atau inspirasi besar ke arah pemberdayaan rakyat di tengah gelombang globalisasi yang sebentar lagi akan muncul. Selamat membaca dan menikmati.

Direktur Eksekutif AKATIGA

PENGANTAR EDITORIAL

EKSISTENSI USAHA RAKYAT DALAM PERSPEKTIF GLOBALISASI

Oleh: Hetifah Sjaifudian¹

Globalisasi: Transformasi Tak Terhindarkan

Globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi hilangnya berbagai penghalang dari pergerakan barang dan jasa antar negara-negara di seluruh dunia atau yang disebut juga sebagai liberalisasi ekonomi yang mendunia. Namun globalisasi sebaiknya dipahami tidak hanya dalam perspektif yang sempit semacam ini. Karena dengan terbukanya suatu negara terhadap negara lain, negara tersebut tidak hanya mengundang masuknya barang dan jasa tetapi juga alih teknologi, pola konsumsi, pendidikan, budaya, nilai-nilai dan lain sebagainya. Proses pengintegrasian ekonomi suatu negara ke dalam ekonomi dunia ini akan memberikan berbagai implikasi terhadap rakyatnya, bukan hanya dalam kegiatan atau kondisi ekonominya saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya.

Terlalu naif bila kita beranggapan bahwa dalam proses ini akan dicapai suatu perolehan yang adil bagi semua pihak. Jelasnya, bisa dipastikan akan ada pihak yang lebih diuntungkan dan sebaliknya, akan ada pihak yang dirugikan. Siapa yang akan menjadi pemenang dan siapa yang akan kalah pada akhir permainan ini nantinya, hampir semua sepakat: negara-negara maju yang sudah kuatlah yang akan menjadi pemenangnya. Dan sebaliknya, negara-negara berkembang dan terbelakang akan menjadi pihak yang dikalahkan. Itu kalau kita lihat globalisasi sebagai pertarungan antar negara. Bagaimana dengan pertarungan antar pelaku ekonomi? Antar usaha besar (termasuk multinasional dan para konglomerat domestik) dengan usaha kecil atau mikro yang notabene merupakan unsur utama usaha rakyat? Mereka yang menggantungkan diri pada usaha berskala kecil dan mikro ini jumlahnya sangat banyak. Karena itulah pemikiran mengenai dampak meningkatnya intensitas kompetisi akibat proses globalisasi terhadap kelompok besar yang lemah ini sangat krusial.

Dalam kaitannya dengan hubungan antar negara, sampai saat ini masih terdapat dua kubu pemihakan atas sistem perdagangan bebas, yakni kubu yang optimis dan pesimis. Argumen yang dikemukakan oleh para "*trade optimists*" adalah bahwa liberalisasi perdagangan akan mendorong pertumbuhan ekspor yang cepat dan pertumbuhan

¹ Peneliti AKATIGA, Pusat Analisis Sosial

ekonomi. Sementara itu para “*trade pessimists*” melihat bahwa ekspor negara yang kurang berkembang dalam perdagangan bebas akan tumbuh secara perlahan karena berbagai sebab antara lain: karena kurangnya permintaan terhadap bahan mentah dari negara dunia ketiga, karena ditemukannya substitusi sintetis bahan mentah tersebut, karena rendahnya elastisitas pendapatan terhadap permintaan untuk produk primer dan barang manufaktur ringan, karena meningkatnya produktivitas pertanian di negara maju dan meningkatnya proteksi baik bagi produk pertanian maupun industri yang intensif tenaga kerja di negara maju. Sementara itu nilai tukar pun akan memburuk karena adanya oligopoli dalam penguasaan faktor produksi dan pasar komoditi di negara maju, dikombinasikan dengan meningkatnya persaingan supply dari negara pengekspor serta rendahnya elastisitas pendapatan terhadap permintaan akan barang-barang yang diproduksi negara-negara kurang berkembang (Todaro, 1994:505-506).

Kelompok “*trade optimists*” (*free trader*) yang mengadvokasikan terbentuknya perdagangan bebas saat ini berada di atas angin dan kelompok “*trade pessimists*” (*protectionists*) yang menuntut lebih banyak proteksi, semakin kehilangan pengikut. Secara bertahap dan pasti, langkah-langkah ke arah perdagangan bebas kelihatan semakin mantap. Tekanan dari luar menuju globalisasi dirasakan semakin lama semakin menguat. GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*), misalnya, adalah suatu alat yang digunakan sebagai penggerak ke arah liberalisasi perdagangan dunia tersebut.

GATT sebetulnya telah terbentuk sejak tahun 1947. Sejak tahun 1947 sampai dengan 1993 telah diselesaikan 8 perundingan. Namun baru tahun 1967, pada perundingan yang disebut *Kennedy Round*, GATT dianggap berhasil menurunkan tarif secara drastis. Keberhasilan ini berlanjut pada *Tokyo Round* (1973-1979) dan yang terakhir *Uruguay Round* (1986-1993). Negara-negara yang sudah menandatangani GATT bertemu secara periodik dan membuat keputusan mengenai cara-cara untuk menghilangkan berbagai rintangan ke arah perdagangan bebas dunia. Perundingan-perundingan inilah yang disebut *round*. Bentuk-bentuk rintangan yang dimaksud terutama adalah yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, baik berupa tarif yang dibebankan pada impor barang dari negara lain, ataupun berupa ketentuan non-tarif seperti kuota impor atau aturan lain yang dimaksudkan untuk membatasi atau bahkan menolak masuknya barang yang diduga akan mengancam industri dalam negeri. Dalam pertemuan bulan April 1994 di Marrakesh, Maroko, 118 negara termasuk Indonesia telah menandatangani *Final Act* dari Uruguay Round.² *Final Act* ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1995, dan setiap negara memiliki waktu dua tahun untuk meratifikasi kesepakatan perdagangan yang telah ditetapkan dalam menjalankan perdagangan dunia. Sebagai pertanda keseriusan, satu badan baru pun telah dibentuk untuk mengambil alih peranan GATT dan mengawasi pelaksanaan GATT. Badan yang disebut WTO (*World Trade Organisation*) ini kelak juga berfungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan antar negara yang muncul dalam kaitannya dengan perjanjian-perjanjian yang termasuk di dalam *Final Act*.

Kesadaran bahwa praktek-praktek perdagangan internasional melalui instrumen GATT lebih banyak merugikan negara-negara dunia ketiga telah menyebabkan munculnya

² Pada *round* pertama yakni *Geneva round* tahun 1947, jumlah negara peserta baru mencapai 23 negara.

beberapa upaya kelompok negara berkembang untuk mentransformasikan relasi ekonomi antara negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Salah satunya adalah desakan untuk membentuk UNCTAD (The United Nation Congerence on Trade and Development) tahun 1964. Tujuan UNCTAD adalah untuk menyaingi GATT dan memperbaiki mekanisme tata ekonomi internasional agar lebih menguntungkan negara-negara berkembang. Satu prestasi UNCTAD adalah keberhasilannya menerapkan skema GSP (Generalized System of Preferences). Sayangnya berbagai upaya yang dilakukan itu tidak pernah berhasil menyaingi dominasi super power negara-negara barat didalam sistem global, dengan USA sebagai kekuatan kapitalis yang hegemonis.³

Paralel dengan kecenderungan globalisasi di atas, di level regional telah terbentuk berbagai blok perdagangan dan bentuk kerjasama ekonomi lainnya. APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), sebagai contoh, adalah suatu bentuk kerjasama negara-negara yang terdiri dari negara-negara di wilayah Australia, negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur, serta negara-negara di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antar negara-negara anggotanya ke arah perdagangan yang lebih bebas. Secara fundamental, tujuan APEC dengan demikian sejalan dengan perjanjian GATT, walaupun dalam level yang berbeda yakni di level regional.⁴ Program liberalisasi perdagangan dan investasi ini akan dimulai tahun 2000 dan proses menuju perdagangan yang bebas dan terbuka di wilayah Asia Pasifik ini akan sempurna dilaksanakan pada tahun 2020, kecuali untuk negara-negara industri yang harus menyelesaikan proses ini tahun 2010.

Di level yang lebih kecil lagi, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN pada ASEAN Summit ke empat di Singapura tahun 1992 telah membuat kesepakatan untuk membentuk AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). Konsensus ini akan secara drastis mengurangi tariff bagi barang-barang manufaktur yang diperjualbelikan di dalam wilayah Asia Tenggara. Melalui skema AFTA, sejak 1 Januari 1993 hingga 15 tahun ke depan sekitar 87% dari barang-barang yang beredar di asia Tenggara akan mengalami penurunan tariff impor. Target ini kemudian dipercepat menjadi 10 tahun (tahun 2003). Terbentuknya AFTA tidak terlepas dari kecenderungan global saat itu yakni munculnya blok-blok perdagangan di Amerika Utara dan Eropa. Pasar Tunggal Eropa (*Single Europe Market-SEM*), dan NAFTA (*North American Free Trade Agreement*) merupakan tantangan besar bagi negara-negara berkembang termasuk negara-negara di Asia Tenggara, dan situasi eksternal tersebut telah menjadi stimulus pembentukan AFTA. Melihat sejarahnya, banyak orang yang menilai bahwa AFTA lebih nampak sebagai tindakan yang didorong oleh latar belakang politis ketimbang ekonomis. Walaupun AFTA telah berhasil menjadi pertanda solidaritas antar negara di Asia Tenggara, namun diragukan keberhasilannya dalam meningkatkan perdagangan intra-

³ Faktor-aktor apa yang berkontribusi terhadap kegagalan kelompok negara dunia ketiga menghadapi tantangan dominasi negara maju dalam tata ekonomi internasional ini dapat dilihat pada tulisan Anthony McGrew, *The third World in The New Global Order*, dalam Allen and Thomas, *Poverty and Development in The 1990s*.

⁴ Salah satu pernyataan dalam deklarasi Bogor yang ditandatangani para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam APEC disebutkan bahwa mereka setuju untuk mengakselerasi pelaksanaan dari komitmen GATT dan melanjutkan liberalisasi unilateral.

ASEAN. Dalam kaitannya dengan kerjasama antar beberapa negara di Asia Tenggara, telah ditetapkan pula skema Segitiga Pertumbuhan (*Growth Triangle*).⁵ Tujuan utama dari pembentukan segitiga pertumbuhan adalah untuk memperkuat jaringan ekonomi bisnis diantara negara-negara anggotanya.

Keberadaan blok-blok perdagangan dan kerjasama ekonomi regional maupun sub-regional dalam berbagai bentuknya, di satu sisi dapat dipandang sebagai *buffer* untuk menahan efek dari globalisasi yang lebih luas, namun sekaligus bisa dilihat sebagai batu loncatan menuju globalisasi.

Teori dan Logika Globalisasi

Teori dibalik pendekatan perdagangan bebas adalah, tarif dan penghalang lain dihilangkan, industri lokal akan terangkat ke dalam kompetisi internasional, dan hanya mereka yang paling efisien dan kompetitif saja yang akan bertahan (*survive*). Perusahaan-perusahaan dan industri yang tidak efisien akan didorong untuk mati dan modal yang diinvestasikan pada mereka akan dialihkan ke pada industri yang lebih sukses. Dengan demikian, para pendukung perdagangan bebas berkata,

“..sumber daya dan modal suatu negara akan menjadi terkonsentrasi pada wilayah-wilayah dimana mereka bisa melakukan yang terbaik, mengarah pada efisiensi ekonomi, output yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Negara-negara pada akhirnya akan terspesialisasi pada area dimana mereka memiliki “comparative advantage” dan akan menggunakan pendapatan mereka yang menjadi lebih besar itu untuk membeli barang-barang yang tidak lagi mereka produksi.”

Liberalisasi perdagangan juga berarti bahwa produsen akan beroperasi di pasar global, ketimbang pasar nasional. Oleh sebab itu, negara seperti Indonesia, sebagai contoh, sebagai produsen pakaian yang kompetitif, dapat menjualnya ke seluruh dunia tidak hanya ke pasar domestik, yang berarti terdapat skala ekonomis serta tersedianya pakaian yang lebih murah bagi semua (Atkinson, 1995: 19)

Para ekonom sudah sejak lama menggunakan teori *comparative advantage* untuk menjelaskan fenomena perdagangan antar negara. Konsep dari biaya relatif (*relative cost*) menjadi dasar, dimana ekspor dari suatu negara akan terspesialisasi pada produk-produk yang bisa diproduksi dengan biaya relatif yang paling rendah. Setiap negara pada akhirnya akan melakukan spesialisasi berdasarkan pada keunggulan komparatifnya. Namun satu hal yang perlu diingat untuk menelaah implikasi dari perdagangan bebas adalah, bahwasanya teori *comparative advantage* didasarkan pada asumsi-asumsi baik eksplisit maupun implisit, yang dalam banyak hal seringkali bertentangan dengan kenyataan yang terjadi dalam hubungan ekonomi internasional. Teori *comparative advantage* dari perdagangan bebas adalah suatu model yang statis yang didasarkan sepenuhnya pada satu faktor variabel (*labor cost*). Walaupun model perdagangan bebas dari abad ke sembilan belas ini telah dimodifikasi pada abad ke dua puluh untuk memperhitungkan perbedaan-

⁵ Saat ini di wilayah Asia Tenggara telah terbentuk paling tidak 6 segitiga pertumbuhan

perbedaan dalam faktor supply (terutama tanah, buruh dan modal) dalam spesialisasi internasional, namun tetap mengandung banyak kelemahan.

Todaro menyatakan bahwa sama halnya dengan pasar bebas (*free markets*) dan persaingan sempurna (*perfect competition*), perdagangan bebas (*free trade*) lebih eksis dalam teori ketimbang prakteknya--dan negara-negara berkembang saat ini harus berfungsi di dalam kenyataan bisnis internasional yang tidak sempurna (*imperfect*) dan seringkali sangat tidak adil (Todaro, 1994:410). Ada beberapa model perdagangan alternatif yang mengkritik teori ekonomi neoklasik dari perdagangan bebas ini, termasuk diantaranya Model Utara-Selatan, yakni suatu model pertukaran yang terfokus pada dunia nyata dari kompetisi yang tidak sempurna, perdagangan yang *unequal*, dan efek yang dinamis dari adanya perbedaan-perbedaan pada sumber daya manusia dan pertumbuhan teknologi. Secara teoritis, model ini berupaya untuk memperlihatkan bahwa negara-negara di belahan selatan (negara berkembang) akan memperoleh lebih sedikit dari kegiatan perdagangan jika dibandingkan dengan negara-negara di belahan utara (negara maju).

Beberapa kritikan yang muncul terhadap teori perdagangan bebas antara lain menyebutkan, ⁶ teori ini mengasumsikan bahwa sumber daya produktif adalah tetap dalam jumlah dan konstan dalam kualitas di setiap negara. Mereka tergunakan secara penuh, dan tidak ada mobilitas internasional dalam faktor produksi. Tentu saja hal itu sama sekali tidak benar, karena kenyataannya ekonomi dunia dicirikan oleh perubahan yang pesat, dan faktor produksi tidaklah tetap, baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Teori ini juga telah mengabaikan adanya perbedaan besar dalam kemampuan teknologi antara negara maju dan negara-negara berkembang, dengan membuat postulat fungsi produksi yang identik bagi produk yang berbeda di berbagai negara. Padahal perubahan teknologi yang pesat telah mempengaruhi hubungan dagang internasional. Sebagai contoh dampak dari perubahan teknologi terhadap pendapatan negara dunia ketiga adalah terciptanya barang-barang sintetis yang menjadi substitut dari banyak produk primer tradisional. Konsumsi untuk produk-produk seperti karet, kapas, dan kulit menurun drastis karenanya.

Hal lain yang merupakan asumsi dari Teori perdagangan bebas adalah preferensi dan cita rasa konsumen yang dianggap tetap. Padahal selera konsumen sangat dipengaruhi oleh iklan yang ditayangkan oleh para produsen raksasa yang menguasai pasar lokal. Diperkirakan lebih dari 90% dari semua iklan dibiayai oleh perusahaan asing yang menjual produknya di pasar lokal. Asumsi lain yang menyebutkan bahwa di dalam satu negara, faktor produksi adalah dapat dipindah-pindahkan untuk aktivitas produksi yang berlainan dan bahwa ekonomi secara keseluruhan dicirikan oleh adanya persaingan sempurna sama sekali tidak terjadi. Selain itu teori ini juga mengabaikan peran penting dari pemerintahan di dalam hubungan dagang internasional. Pemerintah suatu negara (yang kuat) dapat mengabaikan tekanan dari negara yang lebih lemah dan dapat berkolusi dengan multinasional yang kuat untuk memanipulasi syarat-syarat dan kondisi perdagangan internasional sesuai dengan kepentingan nasional negaranya sendiri. Teori

⁶ Lihat Michael P.Todaro, *Economic Development*, Longman Singapore Publishers, 1994 Hal. 426-437.

perdagangan internasional beranggapan bahwa perdagangan adalah *balanced* untuk setiap negara setiap waktu, dan setiap saat ekonomi siap untuk melakukan penyesuaian harga internasional dengan dislokasi minimum. Tetapi kenyataannya, *trade deficit* terjadi dimana-mana, terutama pada periode naiknya harga minyak. Satu hal lain yang perlu dipertanyakan adalah adanya asumsi bahwa perolehan dari perdagangan suatu negara akan otomatis menjadi keuntungan bagi negara tersebut. Kita tahu bahwa keberadaan multinasional dan pemilikan internasional dari faktor produksi seperti yang ditemui di sektor pertambangan dan perkebunan merupakan *enclave economies* di suatu negara yang ditempatinya. Walaupun mereka meningkatkan nilai ekspor suatu negara, tidak berarti semua menjadi keuntungan nasional negara tersebut. Pendapatan terbesar justru dimiliki oleh bukan warga negara tersebut. Walaupun perdagangan yang terjadi seolah adalah antara negara kaya dengan negara miskin, padahal perdagangan tersebut dilakukan antara negara kaya dengan *warga negara dari negara kaya juga* yang sedang beroperasi di negara dunia ketiga.

Melihat logika dari globalisasi ekonomi di atas, maka beberapa konsekuensi bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah:

- Pertama, karena semua penghalang dalam perdagangan akan dihilangkan, maka perdagangan bebas akan membuka industri dan pertanian dalam negeri bagi kompetitor dari ratusan negara anggota GATT/WTO. Berbagai produk yang tadinya dihasilkan petani dan nelayan serta industri kecil dan menengah dalam negeri, akan menghadapi persaingan yang sengit dengan produk dari luar. Tidak ada lagi jalan keluar kecuali meningkatkan daya saing dengan berbagai strategi.
- Seperti halnya liberalisasi terhadap perdagangan, akan muncul pula dorongan ke arah liberalisasi bagi investasi. Ini berarti pembatasan-pembatasan yang ditetapkan bagi investor asing harus dikurangi atau dihilangkan termasuk pembatasan dimana mereka bisa menanamkan investasinya, bagaimana mereka harus beroperasi dan keharusan menyertakan partner lokal dan keharusan penggunaan bahan lokal dari produk yang mereka hasilkan. Ketentuan yang didorong oleh gerakan multilateral dalam GATT mengenai *Trade-related Investment Measures* menjelaskan bahwa Pemerintah harus, sebagai contoh, memperlakukan investor asing dengan cara yang sama dengan perlakukannya terhadap perusahaan domestik, dan tidak menetapkan pembatasan khusus bagi mereka.
- Sebaliknya, Pemerintah tidak bisa lagi melakukan intervensi yang akan mendistorsi harga dan menginsulate ekonomi domestik. Sebagai contoh, pajak maupun subsidi yang tadinya diberlakukan untuk produsen dalam negeri harus dihapuskan.
- Setiap negara nantinya akan melakukan spesialisasi produksi. Apakah dengan demikian hal ini mengandung konsekuensi bahwa negara-negara selatan harus melakukan spesialisasi dalam produk-produk yang secara intensif menggunakan tenaga kerja yang tidak trampil, yang mana permintaan akan produk semacam itu berikut nilai tukarnya sangat tidak jelas atau rendah?. Rasanya tidak ada satu negara

pun yang menghendaki hal yang demikian itu dan membiarkan orang asing yang mengambil keuntungan dari ketrampilan, teknologi dan modal yang lebih tinggi. Tapi itulah salah satu konsekuensi logis dari globalisasi.

- Globalisasi produksi berarti juga terjadinya desentralisasi produksi dimana perusahaan akan memecah-mecah proses produksi dan menyebarkan pembuatan bagian-bagian dari produknya ke berbagai bagian dunia yang dapat melakukannya dengan lebih murah. Dalam pembagian kerja internasional ini, negara-negara di Asia dan Amerika Latin, termasuk Indonesia dapat menyediakan tenaga kerja yang murah, disiplin dan mau bekerja keras. Globalisasi telah memungkinkan bisnis internasional mengakses tenaga kerja murah di dalam negeri. Fenomena masuknya tenaga kerja perempuan dalam industri tidak lepas dari adanya anggapan bahwa mereka lebih menurut dan mudah diatur.
- Tekanan kompetisi akan menyebabkan pengusaha mencari peluang untuk memperoleh tenaga kerja yang paling murah. Kecenderungan ke arah penggunaan tenaga kerja *casual* dan pekerja paruh waktu termasuk pekerja rumahan dan pekerja keluarga yang tidak dibayar, baik perempuan maupun anak-anak akan meningkat. Para pekerja dalam kategori ini adalah termasuk mereka yang tidak terlindungi dari ketentuan ketenagakerjaan dan dapat dieksploitasi.
- Secara umum GATT bekerja dalam prinsip bahwa Pemerintah Nasional memiliki hak untuk menerapkan restriksi perdagangan untuk melindungi manusia, binatang, tanaman atau kesehatan di dalam wilayah mereka--dalam beberapa kondisi. Adanya kesepakatan untuk mengintegrasikan isu lingkungan dalam agenda GATT maupun APEC, menyebabkan adanya pembatasan (restriksi) terhadap produk-produk ekspor yang dianggap tidak ramah lingkungan. Hanya saja seringkali isu lingkungan dijadikan alasan untuk memproteksi industri dalam negeri suatu negara (*disguised protectionism*).

Mampukah Usaha Rakyat Bertahan?

Beberapa konsekuensi dari globalisasi di atas, jelas akan berdampak pada kegiatan ekonomi rakyat. Di Indonesia, isu globalisasi dan isu pengembangan ekonomi rakyat telah menjadi isu hangat di tahun-tahun belakangan ini. Namun demikian diskusi yang intensif tentang keduanya berjalan secara sendiri-sendiri. Diskusi mengenai perlunya Indonesia ikut serta menandatangani kesepakatan GATT, misalnya, lebih banyak dilakukan di kalangan terbatas. Kesertaan dalam arus globalisasi sudah dianggap sebagai keharusan, tanpa diawali dengan perdebatan terbuka mengenai dampak dan konsekuensinya khususnya terhadap ekonomi rakyat. Sementara itu, walaupun usaha rakyat belakangan ini nampak lebih diberi tempat dalam agenda kebijakan tingkat tinggi, tetapi kebijakan yang dikeluarkan masih dinilai bersifat setengah hati dan hampir tidak pernah dikaitkan langsung dengan kecenderungan global tersebut. Seolah-olah, usaha rakyat di dalam negeri terlepas dari gegap gempita ekonomi dunia. Dengan demikian tidak mudah bagi

awam untuk menyimpulkan apakah terseretnya negara ini ke dalam kecenderungan global merupakan suatu keberuntungan atau sebaliknya bagi pelaku ekonomi rakyat.

Satu kekhawatiran yang muncul dalam kaitannya dengan globalisasi ekonomi adalah meningkatnya persaingan di dalam negeri, dan usaha rakyat tidak siap menghadapi itu semua. Hal ini berkaitan erat dengan persoalan yang mereka hadapi, dari soal keuangan, teknologi, manajemen dan kelemahan pasar. Apalagi sebelumnya, strategi pembangunan ekonomi yang dipilih dinilai kurang berpihak kepada sektor tradisional yang sesungguhnya merupakan basis dari kegiatan ekonomi rakyat. Menghadapi para pengusaha besar dalam negeri pun sudah kesulitan, apalagi bila mereka harus bersaing dengan pengusaha kecil maupun besar dari negara lain. Perangkat dan senjata apa yang dimiliki oleh para pelaku usaha rakyat ini untuk berperang melawan musuh-musuh barunya?

Di Indonesia sendiri, usaha rakyat dianggap memiliki peran strategis dalam tata ekonomi masyarakat, tidak saja dalam penyerapan tenaga kerja dan sumber penghidupan berjuta-juta keluarga, tetapi juga sebagai penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Lepas dari posisi strategisnya di atas, usaha rakyat hampir selalu diidentikkan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- dari segi kapital, usaha rakyat adalah usaha yang nilai kapitalnya relatif kecil, lambat melakukan ekspansi, tidak tahan dumping dan modal sering terpakai untuk kebutuhan rumah tangga,
- dari segi personil, usaha rakyat adalah usaha yang sering dilakukan secara mandiri (*self employment*), tidak menuntut ketrampilan yang tinggi, lemah latar belakang bisnis maupun latar belakang akademisnya, lemah kaderisasi, dan kurang wawasan perkembangan di luar,
- dari segi manajemen, usaha rakyat adalah usaha yang rentan terhadap pesaing (kiatnya mudah diketahui), pasif dan tanpa integrasi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol,
- dari segi sarana dan teknologi, usaha rakyat menggunakan teknologi yang terbatas dan seringkali *out of date*, mudah diungguli pesaing dan mengalami kesulitan manajerial maupun finansial dalam pengembangan teknologi,
- dari segi trend sosial ekonomi dan pasar, iklan telah mendorong orang tidak memakai produk usaha rakyat karena gengsi serta sering mengalami kesulitan menembus pasar yang lebih luas karena tidak standarnya produk dibandingkan dengan usaha besar,
- dari segi sistem produksi, usaha rakyat memiliki produktivitas yang rendah, seringkali menggantungkan diri pada pekerja keluarga tak dibayar dan sulit mengembangkan desain produknya,
- sedangkan dari segi institusi dan pengorganisasian, usaha rakyat umumnya berpandangan bahwa bisnis adalah tanggung jawab individu sehingga tidak disadari pentingnya berorganisasi dan karena sangat tersebar dan sulit dikaitkan satu sama lain.

Walaupun mungkin tidak semua, namun sebagian besar dari ciri tersebut mengandung kebenaran. Dengan segala kelemahannya di atas, usaha rakyat dituntut untuk dapat

bersaing dengan mereka yang tidak saja dari segi skala usaha jauh lebih besar, tetapi juga bisa memanfaatkan segala kelebihannya (relasi, koneksi, kolusi, informasi, promosi) untuk memenangkan kompetisi.

Jurnal kali ini tidak berniat untuk memberikan *counter argument* terhadap pernyataan John Naisbitt dalam bukunya *Global Paradox* yang sangat terkenal dan banyak dikutip orang bahkan oleh Menteri Koperasi dan Pengembangan Pengusaha Kecil sendiri, Subianto Tjarkawerdaja. Dalam bukunya tersebut, Naisbitt menyebutkan bahwa semakin besar ekonomi dunia, semakin kuat perusahaan kecil. Ramalan Naisbitt mungkin cukup melegakan bagi mereka yang peduli pada nasib usaha rakyat, tapi belum cukup untuk menghilangkan sama sekali kekhawatiran terhadap ancaman potensial yang dimunculkan oleh kecenderungan internasional terhadap usaha rakyat dalam negeri, yang tanpa itupun sudah berada pada posisi yang marjinal. Melalui beberapa tulisan dalam jurnal ini, diupayakan untuk mengelaborasi beberapa aspek berkenaan dengan usaha rakyat dalam kaitannya dengan globalisasi. Upaya ini tidak lain merupakan langkah untuk mengklarifikasi saja pemahaman yang sudah berkembang sekarang ini, mengingat diskusi yang cermat mengenai hal ini sangat jarang dilakukan. Bentuk pertanyaan dari judul di atas lebih merupakan tantangan untuk mengundang pemikiran yang lebih tajam dalam rangka mencari jalan untuk bersiap dan berbenah diri dalam rangka menghadapi integrasi ekonomi global. Globalisasi adalah suatu permainan. Dan karena kita tidak bisa mundur dari komitmen yang sudah diberikan untuk ikut berpartisipasi dalam permainan tersebut, maka perlu dikemukakan pula beberapa alarm peringatan, bagaimana agar usaha rakyat bisa menjadi pemain, bukan sekedar penonton dan bahkan menjadi pemenang, bukan sekedar korban yang terlindas arus globalisasi.

Kunci pokok untuk menjadi pemenang dalam perdagangan bebas adalah dengan mengembangkan daya saing. Satu konsekuensi logis dari perdagangan bebas adalah masuknya produk-produk asing ke pasar domestik, yang artinya mempertinggi tingkat persaingan. Sebaliknya, produk dalam negeri pun bisa memperoleh akses pasar ke negara-negara lain, bila peluang ini bisa dimanfaatkan. Dalam situasi tersebut, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan kecuali memperbaiki daya saing. *Thee Kian Wie* mencoba mengemukakan satu kasus yang menarik yakni di industri elektronika dalam makalahnya yang berjudul *Mengembangkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah di Era Perdagangan Bebas*. Seperti kita ketahui, hadirnya berbagai perusahaan transnasional yang menghasilkan barang konsumsi elektronika telah membuka peluang bagi berkembangnya industri pendukung yang merupakan industri menengah dan kecil. Sebagai pemasok komponen bagi industri besar, industri pendukung ini masih membutuhkan berbagai bantuan institusional untuk meningkatkan daya saing mereka dengan usaha serupa dari negara lain. Tulisan ini menguraikan tiga jenis bantuan yang diperlukan yakni bantuan teknologi, pelatihan tenaga kerja dan peningkatan kemampuan manajemen, serta bantuan pendanaan baik berupa penyertaan modal maupun pinjaman.

Satu aspek lain yang sangat penting dan layak dibahas dalam diskusi kali ini adalah aspek kebijakan yang secara lebih khusus melihat peran aktor-aktor pembangunan terutama Pemerintah sendiri. Globalisasi menuntut peran baru dari Pemerintah. Namun dalam

kaitannya dengan pengembangan ekonomi rakyat, mampukan Pemerintah memberikan perlindungan bagi usaha rakyat tanpa melanggar ketentuan WTO?. Cara apa yang paling tepat untuk dilakukan saat ini untuk mengembangkan usaha rakyat atau paling tidak meminimalkan kebangkrutannya? Dalam tulisannya yang berjudul *Mencari Format Kebijakan Pengembangan Usaha Rakyat, Dedi Haryadi dan Erna Ermawati Chotim* menyampaikan beberapa gagasannya mengenai aspek-aspek tersebut di atas.

Selanjutnya, dalam makalahnya yang berjudul *Pengembangan Jaringan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah dalam Rangka menghadapi Integrasi Ekonomi Global, Hastu Prabatmojo* mencoba memberikan sumbangan bagi revitalisasi usaha kecil dan menengah dalam menyongsong globalisasi ekonomi. Jaringan usaha merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan untuk melepaskan usaha kecil dan menengah dari isolasi dan keterbatasan sumber daya yang sering menjadi faktor penghambat bagi mereka untuk berkembang. Apakah usaha kecil dan menengah juga bisa melakukan langkah yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar dalam rangka menyiasati kompetisi global yang sengit yakni dengan membentuk aliansi-aliansi strategis yang seringkali melintasi batas nasional?

Seperti telah dikemukakan di atas, tekanan kompetisi akan menyebabkan pengusaha mencari peluang untuk memperoleh tenaga kerja yang paling murah. Tenaga perempuan dan anak khususnya mereka yang bekerja di rumah sebagai pekerja sub-kontrak atau *putting out workers* adalah mereka yang masuk dalam kategori ini. Penggunaan pekerja kategori ini cenderung bertambah banyak pada era globalisasi antara lain juga karena mereka bisa dipekerjakan tanpa menuntut adanya jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan dan kebebasan berserikat. *Indrasari Tjandraningsih* dalam tulisannya yang berjudul *Pekerja Perempuan dalam Globalisasi Ekonomi* akan mengkaji lebih jauh poin-poin tersebut.

Seperti kita ketahui, aspek lingkungan sangat ditekankan dalam liberalisasi perdagangan dan kerjasama ekonomi. Isu lingkungan memang sejak lama sudah diterima sebagai isu global dalam pembangunan. Namun ternyata, instrumen yang digunakan untuk meyakinkan bahwa aspek lingkungan hidup akan tetap terpelihara mempunyai implikasi tersendiri terhadap usaha rakyat di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. *Juni Thamrin* dalam tulisannya *Menyikapi Isu Lingkungan dalam Pengembangan usaha Kecil di Era Liberalisasi*, mencoba mengulas jejak historis liberalisasi perdagangan dunia dan isu lingkungan yang terdapat di dalamnya. Berikutnya coba dikaji bagaimana posisi usaha kecil dan menengah, yang menurutnya secara potensial terancam eksistensinya oleh sebab adanya penerapan sistem *eco-label*. Walaupun tidak dikemukakan suatu rekomendasi yang kongkrit berkenaan dengan problem ini, penulis telah mengungkapkan dengan gamblang satu unsur yang merupakan pemukul bagi usaha kecil dalam era globalisasi. Bukan saja karena mereka tidak efisien, tapi juga karena mereka kurang ramah lingkungan, baik karena ketidaktahuannya ataupun karena ketidakberdayaannya.

Referensi

Atkinson, Jeff, *APEC-Winners and Losers*, Australian Council for Overseas Aid, Australia, 1995

Eben Ezer, Henrico, *Langkah-langkah Persiapan Pengintegrasian Ekonomi Indonesia ke Dalam Ekonomi Global Forum APEC*, Buletin Ekonomi BAPINDO, No.3.Tahun XX, 1995

KASARINLAN, *GATT Defining The Discourse*, A Phillipine Quarterly of Third World Studies, Vol.9 No. 4, Thirld World Studies Center, University of the Phillipines, 1994

McGrew. Anthony, *The Third World in The New Global Order*, dalam Allen and Thomas, *Poverty and Development in The 1990s*, Oxford University Press in association with The Open University, UK, 1992.

Sjaifudian, Hetifah, Haryadi Dedi & Maspiyati, *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Akatiga, Bandung, 1995

The Role of SMEs in Sustainable Development: North & South Cooperation, Proceeding, Jakarta Indonesia, 1994

Tobing, RL, *Mengintensifkan Promosi dan Peluang Usaha Kecil Menengah Merebut Persaingan Pasar Bebas*, Buletin Ekonomi BAPINDO, No,3 Tahun XX, 1995

Todaro, Michael P, *Economic Development*, Longman Singapore Publisher, Singapore, 1994

BAHASAN UTAMA

MENGEMBANGKAN DAYA SAING INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI ERA PERDAGANGAN BEBAS

Thee Kian Wie¹

Pendahuluan

Industri kecil dan menengah memegang peranan yang penting dalam ekonomi Indonesia. Menurut data yang diperoleh dari Sensus Ekonomi tahun 1985, maka industri kecil dan menengah Indonesia mempekerjakan 67 persen dari seluruh angkatan kerja yang bekerja di sektor industri manufaktur, sedangkan tidak kurang dari 93 persen dari seluruh usaha (*establishment*) manufaktur adalah usaha kecil dan menengah (UKM). Namun industri-industri kecil dan menengah (IKM) ini hanya menghasilkan 18 persen dari seluruh nilai tambah yang dihasilkan sektor industri manufaktur, sedangkan industri-industri besar yang hanya mempekerjakan 23 persen dari seluruh angkatan kerja di sektor industri manufaktur menghasilkan tidak kurang dari 82 persen dari seluruh nilai tambah sektor industri manufaktur (Thee, 1994: 149). Angka-angka ini dengan jelas memperlihatkan bahwa ada kesenjangan besar dalam tingkat produktivitas dan efisiensi antara industri-industri kecil dan menengah di satu pihak dan industri-industri besar di lain pihak.

Menurut Biro Pusat Statistik di antara kurang lebih 33.4 juta usaha kecil yang beroperasi di Indonesia, bagian terbesar bergerak di bidang pertanian (21.2 juta usaha atau 64 persen dari seluruh UK) dan di bidang perdagangan (5.8 juta atau 17 persen), sedangkan di bidang industri manufaktur terdapat 2.5 UK (7.5 persen). (Iwantono 1995:2). Di antara 2.5 juta IK ini mayoritas terbesar adalah usaha kerajinan rumah tangga (*cottage industry*) yang kebanyakan terdapat di daerah pedesaan dan lebih banyak merupakan kegiatan sampingan yang melibatkan anggota rumah tangga yang tidak diupah (*unpaid family labour*). Di lain pihak, kurang lebih lima persen dari IK di atas adalah *IK moderen* atau potensial moderen yang mengoperasikan pabrik kecil dan mempekerjakan tenaga kerja yang diupah. Industri kecil moderen ini serta industri menengah dan industri besar yang mempekerjakan sampai 200 tenaga kerja ini adalah fokus tulisan ini dan, seperti juga halnya dengan negara-negara ASEAN lainnya, akan diacu sebagai industri kecil dan

¹ Peneliti senior PEP-LIPI.

menengah (IKM) yang dapat memegang peranan yang lebih besar dalam ekonomi Indonesia daripada halnya sekarang.

Kebijaksanaan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Mengingat bahwa kebanyakan IKM di Indonesia adalah relatif lemah dan kurang efisien, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II) akan diusahakan agar produktivitas dan daya saing UKM, termasuk IKM, akan ditingkatkan. Untuk mencapai tujuan ini maka kebijaksanaan dasar untuk UKM diarahkan pada penggalakkan ikhtiar pengusaha kecil dan menengah dan peningkatan kemampuan UKM ini, khususnya melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) UKM ini, serta perbaikan iklim usaha bagi UKM ini yang dapat mempermudah kegiatan-kegiatan mereka di berbagai bidang ekonomi. (Iwantono, 1995:2).

Prioritas yang kini diberikan pada perbaikan iklim usaha bagi UKM rupanya mencerminkan suatu pergeseran yang telah terjadi dalam pemikiran mengenai pengembangan UKM. Di masa lampau, pandangan umum adalah bahwa UKM memerlukan bantuan khusus dari pemerintah karena mereka dirugikan oleh mekanisme pasar yang lebih menguntungkan usaha-usaha besar. Di samping ini pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan antara usaha-usaha besar dan UK (yang kini masih tetap merupakan sumber keprihatinan) juga diajukan sebagai alasan mengapa UKM memerlukan bantuan dan fasilitas khusus. Akan tetapi akhir-akhir ini pandangan ini lambat laun mulai ditinggalkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu pembuat kebijaksanaan di kebanyakan negara Asia Timur (termasuk Indonesia) dan badan-badan bantuan inter- nasional, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, dan kebanyakan pakar pembangunan, meskipun di Indonesia sendiri berbagai pihak masih menganut pandangan bahwa pemerintah perlu melakukan campur tangan khusus untuk mengembangkan dan membina UKM. Pemikiran baru mengenai UKM ini sejalan dengan arus deregulasi yang telah dianut di kebanyakan negara Asia Timur yang lebih mengandalkan diri pada kekuatan pasar sebagai cara terbaik untuk pertumbuhan ekonomi yang efisien, termasuk pengembangan UKM. Para penganut pandangan mutakhir ini menunjuk pada berbagai kasus kegagalan atau kurang- berhasil berbagai program pengembangan UKM, seperti program bantuan kredit yang disubsidi, seperti program KIM/ KMKP, dan bantuan teknis, seperti program BIPIK, yang ternyata kurang efektif untuk meningkatkan kinerja komersial UKM. Kebanyakan program campur tangan khusus dan protektif ini ternyata menimbulkan bukan saja berbagai distorsi yang menghambat pertumbuhan UKM yang efisien akan tetapi juga pemborosan dana dan tenaga dan korupsi. Lagipula, berbagai program UKM ini ternyata kurang efektif karena tiadanya koordinasi antar instansi yang baik. Dengan kata lain, program-program lama rupanya gagal karena lebih mengutamakan *pendekatan 'kesejahteraan'* atau *pemerataan (welfare approach)* daripada peningkatan efisiensi UKM. Karena program bantuan *langsung* kepada UKM ini kurang berhasil, maka pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mendorong perkembangan UKM melalui cara yang *tidak langsung*, yaitu dengan mengemb- bangkan konsep 'Kemitraan dan Keterkaitan Bapak Angkat-Mitra Usaha', di mana usaha-usaha besar, termasuk perusahaan swasta besar dan BUMN, membantu mitra usaha mereka, yaitu UKM, dalam berbagai hal, seperti bantuan teknis, pengendalian

mutu (*quality control*), pembelian bahan baku, manajemen, dan pemasaran. Akan tetapi hingga kini program kemitraan ini pada umumnya juga belum memenuhi harapan. (Iwantono, 1995:9). Misalnya, program keterkaitan antara perusahaan-perusahaan perakit besar dan perusahaan-perusahaan pemasok (yang kebanyakan IKM) yang di masa lampau hendak digalakkan melalui program penanggalan di industri-industri barang modal Indonesia, khususnya industri otomotif dan industri elektronik, ternyata kurang berhasil terutama karena kemampuan dari IKM masih jauh dari memadai, baik ditinjau dari segi biaya, mutu, maupun ketepatan memenuhi jadwal penyerahan barang (*delivery schedule*). (Thee, 1994: 168-169). Demikian pula program Bapak Angkat hingga kini juga tidak membawa hasil yang diharapkan oleh karena program-program yang 'dipaksakan' memang tidak akan membawa hasil-hasil yang diharapkan jika perusahaan-perusahaan besar, baik perusahaan swasta maupun BUMN, sendiri tidak memperoleh manfaat komersial dari program-program ini, bahkan sering merasa dibebankan oleh berbagai tugas yang tidak termasuk kegiatan bisnis mereka sendiri.

Berbeda dengan pendekatan 'kesejahteraan' ini, maka pandangan mutakhir lebih mengutamakan *pendekatan efisiensi (eficiency approach)* yang meliputi usaha untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam hal manajemen, teknologi, dan pemasaran serta usaha untuk menghilangkan berbagai kendala yang telah merintangangi perkembangan UKM yang sehat. (Hill, 1995:19).

Di bawah ini akan dikaji lebih lanjut cara apa kiranya yang dapat ditempuh untuk mengem- bangkan IKM yang dinamis dan efisien yang dapat menunjang proses industrialisasi yang pesat dan efisien. Dalam pada itu pengembangan IKM tidak dapat dilakukan secara seragam, karena jika ditinjau dari hubungannya dengan industri besar, dapat dibedakan tiga kategori IKM, yaitu:

(1) IKM yang *bersaing (kompetitif)* dengan industri besar karena menghasilkan barang yang kurang lebih sama dengan industri besar; (2) IKM yang *komplementer* dengan industri besar karena telah menjalin kaitan vertikal atau horisontal di luar pasar (*extramarket direct vertical or horizontal linkages*) dengan industri besar; dan (3) IKM yang telah mengadakan *spesialisasi (specialized)* dalam menghasilkan barang-barang untuk segmen-segmen pasar khusus yang berada di luar jangkauan industri besar. (Hill, 1995;4). Berhubung dengan berbagai ragamnya IKM di Indonesia, maka tulisan ini akan secara khusus menyoroti kasus IKM yang telah atau dapat menjalin hubungan *komplementer* dengan industri-industri besar, khususnya sebagai perusahaan pemasok komponen bagi industri-industri besar, khususnya industri elektronika.

Kaitan Ke Belakang Dalam Industri Elektronika

Peluang bagi pengembangan industri pemasok komponen, termasuk IKM, yang tangguh dan berdaya saing internasional bagi industri elektronika dalam tahun-tahun mendatang adalah baik sekali karena menurut persetujuan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) barang-barang elektronika akan dimasukkan dalam golongan barang-barang yang terkena '*fast track*', artinya tarif bea masuk untuk impor barang-barang elektronika akan diturunkan dengan laju yang lebih pesat dalam tahun-tahun mendatang (tahun 1998) daripada barang-barang lain yang tarif bea masuknya baru akan diturunkan pada tahun 2003. Hal

ini berarti industri elektronika Indonesia dalam beberapa tahun ini harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan impor yang lebih ketat jika tidak ingin disapu bersih oleh barang-barang yang dihasilkan oleh industri elektro- nika yang lebih efisien di negara- negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Jika industri perakitan elektronika harus siap menghadapi saingan impor dari negara-negara ASEAN lainnya, maka industri-industri pemasok komponen di Indonesia yang memasok komponen-komponen bagi industri perakitan elektronika pun harus siap menghadapi pasaran yang lebih kompetitif ini, karena mereka tentu saja harus lebih mampu untuk memenuhi persyaratan yang lebih ketat mengenai *biaya*, *mutu*, dan *ketepatan waktu*, *penyerahan barang*, agar mereka dapat mendukung dan menunjang industri perakitan yang lebih kompetitif.

Sekilas perkembangan industri elektronika

Industri elektronika di Indonesia, khususnya subsektor yang menghasilkan barang-barang konsumsi elektronika (*consumer electronics*), seperti pesawat TV berwarna, alat-alat video dan audio, selama beberapa tahun terakhir ini telah bertumbuh dengan amat pesat. Berbeda dengan keadaan selama dasa- warsa 1970-an dan paruh pertama dasawarsa 1980-an sewaktu sub sektor barang- barang konsumsi elektronika hanya berorientasi pada pasar dalam negeri, maka industri elektronika sejak akhir dasawarsa 1980-an makin berorientasi ekspor akibat berbagai kebijak- sanaan deregulasi dan perangkat insentif yang menarik bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor, termasuk fasilitas pengembalian dan pembebasan bea masuk bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor (*duty exemption and drawback scheme*), kemudahan untuk membangun kawasan pengolahan ekspor (*export- processing zones*), dan peluang bagi investor-investor asing yang berorientasi ekspor untuk memiliki saham mayoritas (Thee & Pangestu, 1994:23-24). Akibat orientasi ekspor ini, maka ekspor barang-barang elektronika Indonesia telah meningkat dari US\$ 286 juta pada tahun 1989 sampai US\$ 1.6 milyar pada tahun 1993, namun pada tahun 1994 merosot lagi sampai US\$ 718 juta. Kemerosotan ini disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal (Nasution, 1995:32-39). Di antara faktor-faktor internal dapat disebut proteksi yang masih kuat terhadap masukan- masukan yang diimpor, sedang- kan faktor eksternal adalah persaingan yang semakin tajam di pasaran ekspor. Namun demikian prospek ekspor barang- barang elektronika dalam tahun- tahun mendatang tetap cerah, jika industri elektronika Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya, karena potensi industri ini sebagai salah satu industri ekspor terpenting Indonesia cukup baik.

Salah faktor penting yang telah mendorong perkembangan industri elektronika di Indonesia, khususnya subsektor barang- barang konsumsi elektronika, adalah investasi besar-besaran dalam proyek-proyek berorientasi ekspor yang dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan elektro- nika asing yang terkenal, terutama dari Jepang dan Korea Selatan, seperti Sony, Matsushita, Toshiba, Gold Star dan Samsung Electronics, yang tertarik untuk menanam modal mereka di Indonesia karena perbaikan iklim usaha di Indonesia akibat berbagai paket deregulasi dan apresiasi tajam dalam mata uang *yen* dan *won* serta kenaikan tajam dalam upah tenaga kerja,

sehingga kedua negara ini kehilangan unggulan komparatif mereka dalam industri-industri padat karya seperti industri tekstil dan elektronika. Di samping perusahaan-perusahaan barang-barang konsumsi elektronika ini, maka perusahaan-perusahaan pemasok komponen barang elektronika (*electronics parts vendors*), terutama Jepang, juga telah menanam modal mereka di Indonesia.

Perkembangan industri elektronika yang pesat ini mengharuskan industri ini untuk meningkatkan daya saing internasionalnya, agar pertumbuhan ini dapat berkelanjutan (*sustained*) dalam tahun-tahun mendatang. Hal ini penting sekali karena sektor industri manufaktur Indonesia, termasuk industri elektronika, dalam tahun-tahun mendatang akan menghadapi saingan impor tajam karena dikurangnya proteksi pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) pada tahun 2003 dan Persetujuan Putaran Uruguay dalam rangka GATT dan WTO (*General Agreement on Tariff and Trade & World Trade Organization*), dan liberalisasi perdagangan dalam rangka APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*).

Di antara kendala eksternal yang penting, yaitu kurang adanya industri pendukung (*supporting industry*) bagi industri elektronika, yaitu industri pemasok yang dapat memasok berbagai komponen bagi kebutuhan industri perakitan elektronika. Pengembangan industri pendukung lokal yang efisien di Indonesia merupakan unsur yang penting yang dapat meningkatkan daya saing industri elektronika Indonesia. Mengingat bahwa biaya bahan baku, suku cadang dan komponen merupakan 80 persen dari seluruh biaya produksi industri barang-barang konsumsi elektronika, maka peluang untuk membeli suku cadang dan komponen yang lebih murah dari perusahaan pemasok lokal akan sangat meningkatkan daya saing industri ini.

Di lain pihak tiadanya industri pendukung (industri pemasok) lokal ini akan mengurangi daya saing industri elektronika ini jika industri ini terpaksa membeli suku cadang dan komponen dari luar negeri karena barang impor tersebut sangat mahal. Dengan apresiasi *yen*, maka suku cadang dan komponen yang diimpor dari Jepang menjadi mahal sekali. Lagipula, operasi pabrik di Indonesia tidak dapat berjalan lancar dan efisien, karena ketergantungan pada suku cadang dan komponen berarti tenggang waktu (*lead time*) yang lebih lama serta kemerosotan dalam keluwesan (*flexibility*) dalam prosedur manufaktur. Berhubung dengan hal ini maka pembelian suku cadang dan komponen buatan industri pemasok lokal (*local procurement*) merupakan unsur yang penting sekali dalam usaha meningkatkan daya saing industri elektronika Indonesia.

Menciptaan kaitan ke belakang di industri elektronika

Seperti halnya dengan program penanggalan di industri-industri modal pada akhir dasawarsa 1970-an dan paruh pertama dasawarsa 1980-an untuk mendorong kandungan lokal (*local content*) dalam produksi barang-barang tersebut, maka program kandungan lokal juga diberlakukan bagi industri elektronika Indonesia pada akhir dasawarsa 1970-an. Meskipun program penanggalan ini memang berhasil untuk meningkatkan

kandungan lokal di industri otomotif, program ini kurang begitu berhasil di industri elektronika, sehingga tidak dilanjutkan lagi pada akhir dasawarsa 1980-an.

Berbeda dengan program penanggalan *wajib* yang ternyata kurang efektif untuk meningkatkan kandungan lokal, maka sejak awal dasawarsa 1990-an peluang untuk meningkatkan kandungan lokal di industri elektronika Indonesia akibat dorongan *kekuatan pasar* menjadi semakin baik. Seperti telah dikemukakan di atas, maka perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) elektronika yang telah membangun pabrik-pabrik modern di Indonesia yang hampir semua berorientasi ekspor telah mengungkapkan hasrat mereka untuk meningkatkan pembelian suku cadang dan komponen buatan lokal, agar operasi mereka bisa berjalan lebih lancar (karena masa tenggang antar pemesan suku cadang dan komponen serta penyerahan barang-barang tersebut menjadi lebih singkat, lebih efisien, (karena biaya logistik menjadi lebih rendah), dan lebih fleksibel (karena proses produksi dapat lebih cepat disesuaikan dengan perkembangan pesat di pasar). (Foreign Investment Advisory Service; 1995 (2): VI).

Dalam pada itu kecenderungan untuk membeli suku cadang dan komponen buatan lokal adalah lebih besar pada perusahaan-perusahaan yang berorientasi pasaran dalam negeri yang juga lebih dahulu beroperasi di Indonesia ketimbang perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang lebih banyak mengandalkan diri pada masukan-masukan yang diimpor. Hal ini tidak begitu mengherankan, karena barang-barang elektronika yang diekspor perlu memenuhi persyaratan yang lebih ketat mengenai biaya, mutu, dan ketepatan dalam jadwal penyerahan barang, sehingga pada gilirannya suku cadang ini juga perlu memenuhi persyaratan yang sama tingginya. Sayang sekali kemampuan perusahaan-perusahaan lokal, yang banyak diantaranya adalah UKM, masih terbatas, dan barang-barang mereka memang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Oleh karena itu juga tidak mengherankan bahwa pada waktu ini perusahaan-perusahaan subkontraktor yang memasok komponen untuk perusahaan-perusahaan elektronika asing hanya menghasilkan barang-barang dengan kandungan teknologi rendah, seperti pembuatan PCB (*printed circuit board*), beberapa komponen pasif, bagian logam (*metal parts*), *injection moulding*, dan *silk screen printing*. Karena kebanyakan perusahaan subkontraktor adalah UKM yang tidak mempunyai cukup modal untuk membeli peralatan modal dan mesin yang lebih moderen, termasuk alat-alat untuk menguji-coba produk mereka (*testing facilities*), maka tidak mengherankan bahwa komponen-komponen yang mereka hasilkan untuk perusahaan-perusahaan elektronika hanya dipergunakan untuk barang-barang elektronika yang dijual di pasaran dalam negeri. (Foreign Investment Advisory Service 1995 (2): VII, 7).

Jelas kiranya bahwa untuk mengembangkan industri pendukung (industri pemasok komponen) yang tangguh dan efisien bagi industri elektronika di Indonesia, yang untuk sebagian besar terdiri dari IKM, pemerintah Indonesia perlu mencari jalan yang dapat menjembatani jurang antara kebutuhan perusahaan-perusahaan elektronika besar akan komponen lokal yang bermutu tinggi dan rendahnya biayanya di satu pihak dan kemampuan terbatas dari perusahaan-perusahaan pemasok untuk menghasilkan barang-barang yang memenuhi standar ketat dan tinggi dari para perusahaan-perusahaan elektronika di lain pihak. Oleh karena ini maka kemampuan industri pendukung ini perlu

ditingkatkan secepat mungkin agar perusahaan-perusahaan pemasok lokal ini, yang sebagian besar terdiri atas IKM, dapat memenuhi permintaan yang memang sudah ada dari perusahaan-perusahaan elektronika ini. (Battat et. al. 1995:25). Keharusan untuk meningkatkan kemampuan industri pendukung ini bahkan lebih mendesak lagi karena pelaksanaan AFTA pada tahun 2003 sudah semakin dekat. Jika daya saing industri pendukung Indonesia tidak dapat ditingkatkan dalam waktu dekat, maka peluang industri ini untuk menjadi pemasok komponen bagi industri elektronika Indonesia tidak akan dapat dimanfaatkan, karena industri ini akan dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan pemasok dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia, yang akan dapat memasuki pasaran Indonesia dengan bebas. Di lain pihak, perusahaan-perusahaan pemasok Indonesia juga dapat menembus pasaran negara-negara anggota ASEAN lainnya jika mereka mampu mencapai daya saing yang tinggi dalam tahun-tahun mendatang ini.

Pengalaman di beberapa negara industri baru (NIB) Asia, seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Singapura, dalam mengembangkan industri pendukung ini telah mengungkapkan bahwa bantuan pemerintah adalah paling efektif dalam memberikan *dukungan institusional* kepada perusahaan-perusahaan pemasok, khususnya dalam bidang-bidang peningkatan teknologi, pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan pelatihan manajerial, dan dalam hal pendanaan (*financing*). (Battat et. al, 1995: 34-35).

Suatu laporan mutakhir yang telah disiapkan *Foreign Investment Advisory Service* (FIAS), suatu badan di bawah *International Finance Corporation* dan bank Dunia yang bertujuan untuk membantu negara-negara berkembang dalam memperbaiki iklim usaha mereka untuk menarik lebih banyak PMA yang produktif ke negara-negara mereka, telah mengidentifikasi tiga bidang di mana kemampuan perusahaan-perusahaan pemasok Indonesia lemah, sehingga memerlukan bantuan institusional (*institutional support*) untuk menanggulangi kelemahan ini, yaitu di bidang (Foreign Investment Advisory Service 1995 (2): 20-24):

1. Bantuan teknologi;
2. Pelatihan tenaga kerja dan manajer;
3. Pendanaan (*financing*)

1. Bantuan Teknologi

Karena kemajuan teknologi yang amat pesat yang terjadi di industri-industri elektronika (di peralatan listrik), maka perusahaan-perusahaan pemasok lokal perlu sekali meningkatkan kemampuan teknologi mereka di berbagai bidang. Hal ini mereka perlu mendapat bantuan teknologi dari balai-balai dan pusat-pusat penelitian dan pengembangan (Litbang) yang relevan dan mampu, baik milik pemerintah maupun swasta, berupa jasa-jasa teknologi yang krusial bagi operasi perusahaan-perusahaan pemasok ini, seperti informasi, penelitian dan pengembangan (Litbang), uji coba (testing), kalibrasi, dan standarisasi, jasa-jasa penunjang teknologi (*technological support services*) ini sangat penting karena kemampuan perusahaan-perusahaan pemasok sendiri, termasuk

IKM, dalam bidang- bidang di atas terbatas sekali. (Foreign Investment Advisory Service 1995 (2): 20).

Memang pada waktu ini sudah ada berbagai balai dan pusat Litbang, seperti Unit-Unit Pelayan Teknis (UPT), Departemen Perindustrian, yang memberikan pelayanan teknis kepada IKM, akan tetapi usaha UPT ini lebih banyak ditujukan pada usaha-usaha kecil (UK) dan usaha-usaha kerajinan rumah tangga (UKRT) dan *bukan* kepada IKM moderen yang perlu dibina untuk menjadi perusahaan-perusahaan pemasok yang berdaya saing international. Di samping UPT ini BPPT juga mempunyai jaringan nasional berbagai fasilitas teknis moderen dan staf ahli yang terdidik baik untuk uji coba dan pelatihan, akan tetapi fasilitas-fasilitas ini hingga kini belum melayani kebutuhan perusahaan-perusahaan swasta, termasuk UKM moderen, yang perlu dibina untuk menjadi perusahaan-perusahaan pemasok yang efisien dan berdaya saing internasional. Di samping UPT dan fasilitas-fasilitas teknik BPPT di Bandung juga ada Pusat Pengembangan Industri Barang Logam (*Metal Industry development Centre* atau MIDC) yang bertugas untuk membantu perusahaan-perusahaan barang-barang logam dalam disain dan pengembangan produk dan dalam memecahkan berbagai masalah teknologi yang mereka hadapi dalam proses produksi. Meskipun jasa-jasa MIDC sangat diperlukan perusahaan-perusahaan barang logam, termasuk IKM, namun perluasan kegiatan MIDC ini masih menghadapi masalah kekurangan dana, yang antara lain tercermin pada fasilitas-fasilitas laboratorium yang relatif usang. (Foreign Investment Advisory Service 1995 (2): 21).

2. Pelatihan Tenaga Kerja dan Peningkatan Kemampuan Manajemen

Pengembangan sumber daya manusia (SDM), khususnya berupa peningkatan keterampilan teknis dan manajerial, adalah unsur pokok yang sama pentingnya seperti bantuan teknologi dalam peningkatan kemampuan perusahaan-perusahaan pemasok, khususnya yang menjual barang-barangnya kepada perusahaan-perusahaan perakitan elektronika yang berorientasi ekspor. Misalnya, dalam beberapa aspek operasional industri pendukung ini, seperti otomatisasi operasi atau pengendalian mutu, pengembangan kemampuan teknologi, erat berkaitan dengan pengembangan SDM industri pendukung ini. Disamping ini beberapa kegiatan operasional lain, seperti akuntansi, pengelolaan inventaris, dan pemasaran, konsep-konsep dan sistem-sistem manajemen juga mengalami perubahan besar akibat perkembangan teknologi baru seperti telekomunikasi dan komputer. (Foreign Investment Advisory Service 1995 (2): 22).

Kunjungan ke beberapa perusahaan pemasok yang tergolong IKM yang dikunjungi penulis akhir-akhir ini telah mengungkapkan bahwa keterampilan teknis yang memadai memang merupakan kendala pokok bagi IKM ini. Kekurangan keterampilan teknis terutama terdapat pada manajemen tingkat menengah (*middle-level managers*). Manajer UKM yang memasok perusahaan-perusahaan elektronika juga mengemukakan bahwa masalah pengembangan SDM mereka bukan hanya meliputi peningkatan keterampilan teknis mereka, akan tetapi juga usaha untuk menanam kesadaran pada mereka tentang disiplin dan etos kerja serta perhatian pada ketelitian dalam pekerjaan.

Sejak beberapa tahun terakhir ini para pekerja perusahaan manufaktur mendapat peluang untuk memperoleh latihan jangka pendek (beberapa minggu) dalam bidang-bidang tertentu, seperti membubut, mengolah bambu, dan sistem desain, di Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola Departemen Tenaga Kerja. Di samping ini terdapat juga beberapa program pelatihan pengajar STM yang diprakarsai badan bantuan teknis asing, seperti badan bantuan teknis Jerman GTZ (*Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit*), dan badan-badan bantuan teknis lainnya dari Swiss, Jepang dan Australia, yang memberikan pelajaran di sekolah teknik Menengah (STM). Namun tersedianya berbagai kursus pelatihan yang diberikan oleh berbagai badan bantuan teknis asing dengan pendekatan dan metode masing-masing yang berbeda sering membingungkan para pengajar dan pelatih Indonesia.

Karena program pelatihan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah, betapa berharga pun, masih kurang memadai ditinjau dari segi kebutuhan khusus perusahaan-perusahaan manufaktur, dan juga mahal bagi UKM, maka kebanyakan perusahaan terpaksa mengandalkan diri pada pelatihan di tempat kerja (*on the job training*). Namun hal ini tidak begitu mudah bagi UKM karena para manajer UKM ini sering terpaksa memberikan sendiri bahan-bahan pelajaran yang ditulis dalam bahasa asing yang tidak dimengerti oleh para pekerja mereka. Lagipula, hasil-hasil dari investasi dalam SDM UKM ini sering tidak dapat dipetik UKM ini karena pekerja-pekerja mereka yang paling terampil lalu cenderung untuk berpindah ke perusahaan-perusahaan yang lebih besar yang mampu memberikan mereka upah dan fasilitas lain yang lebih baik. (Foreign Investment Advisory Service 1995 (2): 23).

3. Bantuan Pendanaan

Peningkatan kemampuan teknologi dan manajerial IKM memerlukan bantuan dalam hal pendanaan (*financing*) berupa penyertaan modal dan pinjaman. Lagipula, mengembangkan dan melaksanakan teknologi baru bukan saja mahal, akan tetapi sering mengandung banyak resiko. Misalnya, mengkaji potensi dan trend pasar, mencari informasi mengenai teknologi baru, membeli peralatan mesin yang paling cocok dan baik, melatih para pekerja dan manajer, menarik para pembeli, dan memperbaiki proses produksi bukan saja memerlukan kredit biasa, melainkan juga modal resiko (*risk capital*) (Battat, et. al., 1995: 38).

Karena modal adalah faktor produksi yang langka di kebanyakan negara berkembang, maka lembaga-lembaga keuangan swasta, termasuk bank, umumnya enggan sekali untuk memberikan kredit kepada UKM, karena UKM ini tidak bisa menyediakan agunan dan juga belum dikenal. Memang sejak tahun 1990 pemerintah Indonesia telah melaksanakan program Kredit Usaha Kecil (KUK) yang mewajibkan bank-bank komersial untuk menyalurkan 20 persen dari kredit mereka kepada UKM (dengan suku bunga pasar), akan tetapi program ini, seperti juga program-program kredit sebelumnya untuk UKM, seperti KIK/KMKP, lebih banyak menekankan pendekatan 'kesejahteraan' ketimbang 'efisien', sehingga kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan UKM untuk menjadi pemasok yang efisien bagi industri-industri perakitan elektronika. Demikian pula program Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang baru mulai dilaksanakan hanya ditujukan

pada usaha yang sangat kecil, termasuk yang bergerak di sektor informal, dan tidak secara khusus ditujukan kepada UKM moderen.

Bantuan keuangan tidak saja bertujuan untuk membantu UKM supaya mereka dapat tetap melangsungkan usaha mereka, akan tetapi terutama agar mereka dapat meningkatkan daya saing mereka. Untuk tujuan ini, maka program kredit UKM di NIB Asia Timur mengenakan persyaratan yang sangat ketat untuk menyaring UKM yang meminta kredit yang didasarkan atas bukti yang nyata tentang kemampuan, komitmen, dan hasrat yang jelas dari UKM tersebut untuk mencapai daya saing yang tinggi. Misalnya, di Korea Selatan ada suatu bank, yaitu *Korean Technology Banking Corporation* (KTB), yang telah didirikan bersama-sama oleh pemerintah

Korea dan sektor swasta di negara tersebut yang terutama memberikan kredit kepada UKM yang berorientasi teknologi, artinya yang ingin meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Dalam hal ini KTB bertindak sebagai perantara untuk mengidentifikasi sumber-sumber teknologi yang tepat guna (*appropriate technology*) bagi UKM, seperti lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), sumber pemasok asing, atau perusahaan-perusahaan besar Korea, dan membantu UKM untuk menjalin kaitan dengan sumber-sumber teknologi ini agar teknologi mereka dapat dialihkan ke UKM ini (Battat, et. al., 1995:38-40). Di Filipina lembaga-lembaga keuangan, seperti Bank Pembangunan Filipina (*Development Bank of the Philippines*) dan Dana Jaminan Usaha Kecil (*Small Business Guarantee Fund*) juga merencanakan untuk mengikuti jejak lembaga-lembaga keuangan di NIB Asia Timur dengan memberikan kredit kepada UKM yang dapat menjadi perusahaan pemasok bagi MNC yang beroperasi di Filipina (Foreign Advisory Service 1995 (1): 17).

Pembicaraan yang penulis telah adakan dengan beberapa manajer UKM yang memasok komponen untuk perusahaan-perusahaan elektronika memang mengungkapkan bahwa pendanaan, misalnya untuk ekspansi kapasitas modernisasi operasi, atau pembangunan pabrik baru, merupakan masalah yang besar bagi UKM, terutama jika dana yang mereka perlukan untuk tujuan di atas cukup besar. Namun demikian pemerintah Indonesia, di samping program kredit khusus untuk UKM, seperti program KUK dan KKU, akhir-akhir ini telah mendirikan beberapa lembaga keuangan baru, seperti PT Bahana Artha Ventura, yang bertujuan untuk menanggulangi masalah pendanaan UKM dengan memberikan pinjaman langsung kepada UKM, atau dengan cara ikut menanam modal langsung (*equity financing*) dalam UKM. Dengan cara pemberian kredit modal ventura ini diharapkan bahwa UKM moderen, khususnya yang menjadi atau merencanakan untuk menjadi pemasok (sub kontraktor) untuk perusahaan-perusahaan elektronika (dan kemudian untuk industri-industri perakitan besar lainnya), mendapatkan peluang yang baik untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan manajerial mereka sehingga daya saing mereka dapat ditingkatkan secara berarti.

@SUB = Penutup

Kedatangan berbagai perusahaan transnasional (TNC), seperti industri barang-barang konsumsi elektronika (_consumer electronics_) ke Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini telah membuka peluang untuk mengembangkan industri pendukung (_supporting industries_), yaitu industri pemasok komponen, bagi industri-industri perkait besar di atas. Misalnya, di industri elektronika kurang lebih 80 persen dari biaya produksi diperlukan untuk membeli masukan, khususnya bahan baku dan komponen, yang memang lebih baik dibeli di Indonesia sendiri karena pertimbangan efisiensi. Di samping ini, perkembangan eksternal, seperti apresiasi tajam dari mata uang _yen_ (_endaka_), telah mengakibatkan kenaikan tajam dalam biaya untuk mengimpor komponen dari Jepang, sehingga pembelian komponen buatan lokal lebih hemat bagi perusahaan-perusahaan elektro-nika Jepang yang kini beroperasi di Indonesia.

Namun demikian pada waktu ini lapisan tengah dalam struktur industri Indonesia, yaitu industri pendukung bagi industri hilir, yaitu industri perakitan, justru masih lemah sekali. Di samping ini, perusahaan-perusahaan pemasok Indonesia, yang kini sudah menjadi subkontraktor bagi industri-industri elektronika asing, menghadapi tantangan besar karena di satu pihak mereka menghadapi persaingan ketat dari UKM Jepang yang di Jepang sendiri sudah lama menjadi subkontraktor dari perusahaan-perusahaan elektro-nika Jepang dan yang kini mulai memasuki Indonesia sejak paket deregulasi Juni 1994 yang memberikan peluang bagi investasi di bawah US\$ satu juta bagi UKM asing. Karena mereka umumnya lebih efisien dan dapat menghasilkan barang dengan mutu yang lebih baik, maka perusahaan-perusahaan elektro-nika Jepang pasti lebih suka untuk membeli komponen dari UKM Jepang ini. Di lain pihak UKM Indonesia di atas dalam tahun-tahun mendatang akan menghadapi persaingan impor dari perusahaan-perusahaan pemasok dari negara-negara ASEAN lainnya, seperti Singapura dan Malaysia, yang dalam rangka pelaksanaan AFTA pada tahun 2003 akan dapat mengekspor barang-barang mereka ke Indonesia dengan bebas. Jelas kiranya bahwa peningkatan daya saing UKM moderen Indonesia, khususnya yang kini sudah menjadi subkontraktor bagi TNC asing, dalam waktu dekat ini merupakan persyaratan mutlak jika mereka tidak ingin disapu bersih oleh persaingan UKM Jepang yang beroperasi atau akan beroperasi di Indonesia atau oleh persaingan impor dari perusahaan-perusahaan pemasok di negara-negara ASEAN lainnya. Dalam pembicaraan yang dilakukan penulis dengan beberapa UKM Indonesia, yang menjadi subkontraktor bagi TNC asing, terungkap bahwa mereka berusaha untuk membentuk usaha patungan dengan UKM Jepang untuk dapat bertahan hidup, bahkan jika mereka menjadi mitra lokal yang hanya memiliki saham minoritas (_minority shareholder_) dan akan kehilangan pengendalian manajemen (_management control_) atas usaha patungan

baru tersebut. Di lain pihak memben- tuk usaha patungan dengan UKM □
asing akan memungkinkan alih teknologi dan keterampilan manajemen □
yang berharga dari UKM asing kepada UKM Indonesia.
Untuk membantu UKM moderen Indonesia ini pemerintah Indonesia dapat □
berbuat banyak. Pertama, pemerintah Indonesia dapat memperbaiki iklim □
usaha bagi UKM Indonesia yang masih mengandung unsur-unsur yang menghambat □
atau bersifat diskri- minatif terhadap UKM Indonesia. Untuk hal ini □
maka pemerintah Indonesia hendaknya dapat membentuk panitia antar □
depar- temen yang kecil yang bersama- sama dengan asosiasi IKM dan □
beberapa UKM terpilih dapat mengidentifikasi unsur- unsur dalam □
kebijaksanaan dan prosedur administrasi yang menghambat atau bersifat □
diskriminatif terhadap IKM, sehingga kepada pemerintah dapat diajukan □
saran-saran kebijaksanaan yang memungkin- kan pemerintah untuk menyusun □
suatu kebijaksanaan menyeluruh dan konsisten yang dapat mem- perbaiki □
iklim usaha bagi UKM secara berarti. Di lain pihak, pemerintah juga □
dapat melaku- kan usaha terpadu yang bertuju- an untuk memperbaiki □
bantuan institusional (_institutional support_) bagi UKM moderen Indonesia □
dalam bidang-bidang bantuan teknologi, (khususnya dalam bidang uji □
coba, kalibrasi, usaha litbang, konsultasi teknis, dan standarisasi), □
pelatihan para pekerja UKM untuk meningkat- kan keterampilan teknis □
dan manajerial UKM ini dan bantuan keuangan. Usaha untuk mem- perbaiki □
prasarana dan sarana bantuan institusional ini perlu dilakukan dengan □
konsultasi dan kerja sama dengan sektor swasta, khususnya perusahaan-perusaha- □
an elektronika besar, agar usaha ini dapat menghasilkan suatu program □
bantuan institusional bagi UKM moderen Indonesia yang efisien dan □
efektif.<F30380M> s<F255D>

@SUB = Referensi

@NAMAPUS = Battat, Joseph; Frank, Isaiah; Shen, Xiaofang

@TAHUN = 1995, Increasing Backward Linkages of Foreign Investment □
in Developing Countries: New Opportunities and Challenges, Foreign □
Investment Advisory- Service, October.

@NAMAPUS = Foreign Investment Advisory Service (1)

@TAHUN = 1995, The Philippines-Promo- ting Backward Linkages: A Pilot □
Program for the Electrical Appliance and Electronics Industry, Washington, □
D.C.

@NAMAPUS = Foreign Investment Advisory Service (2)

@TAHUN = 1995, Indonesia-Backward Linkages: Opportunities and Impediments, □
Washington, D.C.

@NAMAPUS = Hil, Hal

@TAHUN = 1995, Small-Medium Enterpri- ses and Rapid Industrialization: □
The SEAN Experience, Mimeo.

@NAMAPUS = Iwantono, Sutrisno

@TAHUN = 1995, Small Medium Enterpri- ses: An Indonesian Perspective, □

Makalah yang disajikan pada Conference on Indonesia and Singapore: □
Cooperative for Competitiveness in Changing World, Jakarta, 16-18 Oktober.
@NAMAPUS = Nasution, Anwar
@TAHUN = 1995, Survey of Recent Developments, Bulletin of Indonesian □
Economic Studies, Vol. 31, No 2, Agustus.
@NAMAPUS = Tan, Joseph L.H. & Luo, Zhaohong (ed)
@TAHUN = 1994, Industrial Restructuring in ASEAN and China, ASEAN- □
China Economic Relations, Singapore, Institute of Southeast Asian Studies.
@NAMAPUS = Thee, Kian Wie
@TAHUN = 1994, Industrial Restructuring and The Role of Small-and □
Medium Scale Enterprises in ASEAN, with special Reference to Indonesia, □
Tan & Luo (ed).
@NAMAPUS = Thee, Kian Wie & Mari Pangestu
@TAHUN = 1994, Technological Capability and Indonesia's Manufactured □
Export, Laporan yang diper- baiki untuk UNCTAD/SAREC Project on Technological □
Dynamism and the Role of R & D in the Export of manufactures from □
Developing Countries, Jeneva, Januari.

BAHASAN UTAMA

PENGEMBANGAN JARINGAN USAHA BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENGHADAPI INTEGRASI EKONOMI GLOBAL

HASTU PRABATMODJO¹

Pengantar

Belakangan ini muncul keinginan yang meluas untuk memberdayakan usaha kecil dan menengah di berbagai kalangan yang berkepentingan dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berbagai program keterkaitan dan kemitraan, program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Deklarasi Jimbaran, Kredit Kelayakan Usaha (KKU), pendirian lembaga permodalan dan penjamin usaha kecil, serta sebagai puncaknya adalah pematangan Undang-Undang Pembinaan Usaha Kecil menjelang akhir tahun 1995 merupakan sebagian petunjuk bahwa upaya untuk memperkuat ekonomi rakyat akan ditangani secara lebih serius. Sebagian pihak melihat berbagai gejala tersebut sebagai upaya untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I) yang meskipun mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun sekaligus melahirkan kesenjangan dan struktur ekonomi yang rapuh (Warta Ekonomi, 1995a: 16-18).

Pada saat yang sama, perekonomian Indonesia juga semakin dihadapkan pada integrasi ekonomi secara regional dan global melalui tatanan semacam AFTA (tahun 2003), WTO (tahun 2005) dan APEC (tahun 2020) maupun dorongan kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi. Integrasi ekonomi disamping dapat menimbulkan peluang-peluang baru yang disebabkan oleh adanya kemudahan aliran barang, jasa dan modal antar-negara, juga mampu menimbulkan ancaman-ancaman serius bagi dunia usaha maupun perekonomian nasional sebagai akibat semakin terbukanya pasar domestik terhadap kompetisi yang berasal dari luar negeri. Dalam situasi semacam itu akan muncul para pemenang yaitu mereka yang mampu memanfaatkan kesempatan maupun para pecundang. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mampukah usaha kecil dan menengah di negara kita tumbuh dan berkembang dalam era yang semakin kompetitif? Bagaimana memperbesar peluang bagi usaha kecil dan menengah agar muncul sebagai pemenang? Permasalahan yang membelit usaha menengah dan kecil maupun gagasan pengembangannya sudah cukup banyak dikupas (mis. Clapham, 1991; Prawiranegara, 1994; Sadoko *et al.*, 1995; Sjaifudian *et al.*, 1995).

¹ Staf Pengajar Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.

Banyak di antara pemikiran tersebut telah pula dijadikan dasar upaya-upaya pengembangan usaha kecil dan menengah, meskipun terkesan masih 'setengah hati'. Kritik yang mendasar adalah: berbagai kebijakan yang ada masih belum cukup menghilangkan hambatan struktural serta menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha kecil (Sadoko *et al.*, 1995: 111-114). Dikaitkan dengan konteks tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk memberi sumbangan bagi revitalisasi usaha kecil dan menengah dalam menyongsong globalisasi ekonomi. Yang menjadi fokus pembahasan adalah pengembangan jaringan usaha (*networks*) yang sampai sejauh ini dinilai belum intensif digarap, padahal faktor tersebut amat strategis bagi keberhasilan usaha kecil dalam era yang semakin kompetitif dan berubah cepat (Brown dan Butler, 1995: 57). Pembahasan akan dimulai dengan uraian aspek-aspek teoritis jaringan usaha yang dilanjutkan dengan pembahasan tentang permasalahan pengembangannya di Indonesia dan kemudian diakhiri dengan penutup.

Konsepsi Jaringan Usaha (*Networks*)

Jaringan usaha (*networks*) dipahami sebagai suatu tatanan organisasi ekonomi yang mengatur koordinasi dan kerjasama antarunit usaha. Tatanan tersebut berbeda dengan pengintegrasian unit-unit usaha dalam satu perusahaan (konglomerasi) atau koordinasi antarunit usaha dengan menggunakan isyarat-isyarat pasar yang terkadang bersifat kolusif.

Jaringan usaha dapat berbentuk mulai dari yang paling sederhana misalnya komunikasi informal, agak kompleks seperti asosiasi dan konsorsium sampai ke yang lebih kompleks seperti *joint-venture*, sub-kontrak ataupun *franchising* (Grandori dan Soda, 1995: 183-185). Pembentukan jaringan usaha dicapai melalui berbagai interaksi antar unit usaha yang pada akhirnya menentukan 'konsistensi' jaringan usaha yang terbentuk (Jarillo, 1988: 32). Beberapa pakar (Thorelli, 1986; Williamson, 1991) memandang jaringan usaha sebagai bentuk organisasi ekonomi yang memiliki sifat di antara pasar dan hirarki.

Jaringan usaha bukanlah sesuatu yang terjadi demikian saja, tetapi merupakan hasil keputusan dan upaya para usahawan untuk meningkatkan daya saing melalui kerjasama dengan unit-unit usaha lain. Daya saing yang lebih tinggi dapat dicapai karena para pelakunya dapat: 1) melakukan spesialisasi sehingga lebih efisien, 2) menekan biaya-biaya transaksi dan 3) meningkatkan fleksibilitas karena adanya rekanan yang terpercaya (Jarillo, 1988: 35). Pentingnya jaringan usaha bagi kehidupan usaha dan daya saing menyebabkan para usahawan yang terlibat berusaha keras untuk memeliharanya. Yang dijadikan pedoman adalah kepentingan jangka panjang, bukan sekedar kepentingan sesaat. Pengikat jaringan usaha tidak selalu berupa aturan-aturan formal tetapi dapat pula berupa konvensi-konvensi informal yang dijadikan *rule of conduct*. Jelas bahwa faktor kepercayaan (*trust*) dan terkadang juga ikatan-ikatan sosial menjadi amat penting untuk mempertahankan jaringan usaha. Perilaku oportunistik atau mental *hit and run* tentu tidak akan mendapatkan tempat dalam jaringan usaha.

Terdapat beberapa model teoritis yang dapat menjelaskan terbentuknya jaringan usaha, namun pada kesempatan ini hanya akan diuraikan secara ringkas tiga model yang bersifat

komplementer. **Pertama**, menurut perspektif 'pertukaran' (*exchange perspective*) yang dikembangkan antara lain oleh Blau (1964), jaringan usaha dapat dipandang sebagai suatu struktur sosial yang terbentuk karena adanya relasi-relasi sosial di antara pelaku-pelakunya (dapat berupa perseorangan atau unit usaha). Interaksi yang terjadi dimaksudkan untuk melakukan pertukaran secara langsung maupun tidak langsung hal-hal yang dianggap berharga yang dapat berupa materi, informasi maupun lambang-lambang.

Selain itu, pelaku-pelaku tersebut berinteraksi dapat juga karena ingin memperoleh penghargaan atau takut terhadap sangsi-sangsi tertentu. Lebih jauh, posisi kekuasaan amat penting dalam struktur sosial yang terbentuk. Ketidakseimbangan kekuasaan dalam relasi pertukaran maupun struktur jaringan pertukaran bahkan dapat mendorong terjadinya perubahan-perubahan struktural. Nampak bahwa perspektif ini menempatkan jaringan usaha sebagai bagian gejala sosial yang lebih luas.

Kedua, model 'ketergantungan sumberdaya' (*resource dependence*) yang banyak mengilhami studi-studi organisasi dan bisnis menjelaskan bahwa terbentuknya jaringan usaha adalah hasil upaya strategis unit usaha (organisasi) yang beroperasi dalam lingkungan usaha yang tidak stabil untuk mengamankan sumberdaya penting yang dikuasai oleh pihak-pihak lain. Situasi lingkungan yang selalu berubah mencirikan keadaan umum yang harus dihadapi oleh kebanyakan usaha, namun perubahan-perubahan yang berlangsung pada masa mendatang diperkirakan akan semakin cepat dan dramatis. Melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain (yang berarti juga terbentuknya jaringan usaha), pemenuhan kebutuhan sumber daya dapat lebih terjamin (Pfeffer dan Salancik, 1978). Begitu jaringan usaha terbentuk, pelaku-pelaku yang terlibat di dalamnya akan berusaha menyesuaikan perilaku mereka dengan mekanisme dan aturan-aturan yang berlaku.

Pembentukan jaringan usaha juga dapat dijelaskan oleh model 'ekonomi biaya transaksi' (*transaction cost economy*) yang terutama dikembangkan oleh Williamson (1975). Menurut model ini, sebuah usaha dapat memperoleh kebutuhannya secara efisien melalui 'pasar' atau 'hirarki'. Pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli produk tertentu. Mekanisme pasar dianggap dapat mengatur pelaku-pelaku ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Namun, untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan melalui pasar akan diperlukan biaya-biaya transaksi yang merupakan produk keterbatasan informasi, perilaku oportunistik dari pelaku-pelaku ekonomi (memanfaatkan kesempatan demi keuntungan diri sendiri, meskipun dengan kerugian pihak lain), dan keterbatasan jumlah pelaku-pelaku ekonomi. Kalau biaya-biaya transaksi terlalu besar sehingga dinilai dapat merongrong efisiensi usaha, beberapa perusahaan akan menggunakan 'hirarki' untuk memperoleh kebutuhannya.

Langkah yang dilakukan adalah memasukkan beberapa fungsi pasar ke dalam hirarki organisasi perusahaannya sendiri yang berarti terjadinya konglomerasi ataupun integrasi vertikal. Meskipun demikian, Williamson (1991) mengamati adanya bentuk organisasi 'campuran' antara pasar dan hirarki yang berupa jaringan usaha. Organisasi campuran ini terbentuk karena keinginan untuk menekan biaya-biaya transaksi (Jarillo, 1988:35).

Beberapa bentuk organisasi campuran tersebut dapat diletakkan di dalam diagram seperti yang terdapat pada Gambar 1. Selain jaringan antar unit usaha (*interfirm networks*), dikenali pula adanya jaringan yang melibatkan institusi-institusi lain yang ada dalam masyarakat yang mungkin tidak berkepentingan dengan produksi secara langsung (*extrafirm networks*). Institusi semacam itu dapat berupa organ-organ negara, lembaga penelitian, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok sosial dan lain-lain. Ke dua macam jaringan usaha tersebut penting untuk keberhasilan usaha. Pada *interfirm networks*, relasi-relasi ekonomi menjadi pusat aktivitas: unit-unit usaha bergabung dengan jaringan usaha untuk memperoleh manfaat yang timbul dari spesialisasi dan kerjasama yang berjangka panjang. Pada *extrafirm networks*, yang lebih mendasari hubungan adalah motif-motif yang berkaitan dengan kekuasaan atau pengaruh (Yeung, 1994: 481-482).

Lobi-lobi untuk memperoleh kontrak-kontrak pemerintah atau legitimasi sosial politik bagi usaha-usaha tertentu adalah contoh kegiatan yang menggunakan *extrafirm networks*. Disayangkan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, jaringan usaha bentuk kedua tersebut bukannya melahirkan usaha-usaha yang tangguh, tetapi justru usaha-usaha yang cuma mampu mengandalkan koneksi bahkan terkadang sekedar menjadi pemburu rente ekonomi.

Melalui uraian di atas nampak bahwa konsepsi jaringan usaha sebenarnya cukup sederhana, meskipun manifestasinya dapat cukup rumit. Beberapa pengusaha mungkin sudah menyadari keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dengan pembentukan jaringan usahadan mereka berusaha mewujudkannya. Namun persoalannya akan menjadi lain kalau jaringan usaha ini akan dikembangkan menjadi salah satu model pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia dalam menghadapi integrasi ekonomi global.

Terdapat beberapa permasalahan mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu sebelum jaringan usaha dapat dikembangkan secara efektif. Pembahasan berikut berusaha mengenali permasalahan tersebut yang diikuti oleh gagasan awal untuk memecahkannya.

Permasalahan Pengembangan Jaringan Usaha di Indonesia

Jaringan usaha dapat melepaskan sebuah usaha kecil dan menengah dari isolasi dan keterbatasan sumberdaya yang sering menjadi faktor penghambat terbesar bagi mereka untuk berkembang. Jaringan usaha bukan cuma monopoli usaha kecil dan menengah, dewasa ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang menyiasati kompetisi global yang semakin sengit dengan membentuk aliansi-aliansi strategis yang sering melintasi batas nasional. Dalam khasanah perekonomian Indonesia, berbagai bentuk jaringan usaha bukan merupakan hal yang asing. Kita mengenal adanya asosiasi, konsorsium, kelompok binaan, waralaba, subkontrak, *joint venture* dan lain-lain. Namun upaya-upaya untuk mengembangkannya bagi kepentingan usaha kecil dan menengah dinilai masih amat terbatas. Pengembangan jaringan usaha diperkirakan semakin krusial bagi usaha kecil dan menengah agar tidak hanya mampu bertahan di lingkungan domestik, tetapi bahkan

menjadi pemain andal di lingkungan internasional. Telah terbukti bahwa Jepang, Taiwan dan Italia tidak akan mampu mencapai kemajuan industri yang mengesankan tanpa jaringan usaha kecil dan menengah yang efektif dan efisien.

Program keterkaitan dan kemitraan yang antara lain diterjemahkan menjadi sistem 'bapak-anak angkat' adalah merupakan upaya pembentukan jaringan usaha di sektor industri dengan maksud membantu pengembangan industri kecil. Di dalam sistem tersebut, perusahaan swasta maupun BUMN yang memiliki sumberdaya cukup dan akses terhadap informasi dan pasar yang relatif luas diharapkan untuk membantu pengembangan industri kecil dengan berperan sebagai 'bapak angkat'. Tugas bapak angkat adalah: membantu aspek manajemen, teknologi produksi, permodalan, bahan baku dan pemasaran serta menjamin kredit perbankan (Suhardi, 1992a: 104).

Di sini memang tidak hanya terkandung misi-misi ekonomi, tetapi juga misi sosial dan politik. Akibatnya, dalam pelaksanaan sistem tersebut dapat ditemukan misalnya bapak angkat yang tidak mengetahui dasar penunjukan anak angkat, karena semuanya ditentukan oleh Departemen Perindustrian (Huseini *et al.*, 1994: 48). Hasil pembinaan yang dilakukan dapat dikatakan sangat beragam. Di samping laporan tentang keberhasilan sistem tersebut (lihat Suhardi, 1992b: 116-120), terdapat beberapa masalah yang mengganjal di antaranya adalah ketidakjelasan program pembinaan, ketidakseriusan dan adanya *vested interest* di kalangan pembina serta kurangnya keseriusan dan kewirausahaan anak angkat (Huseini, *et al.*, 1994). Yang disebutkan terakhir adalah yang menyebabkan gagalnya program kemitraan di LIK Frin Takaru, Tegal. Potongan tulisan berikut barangkali dapat sedikit memberi gambaran situasi yang dihadapi: *Cerita di LIK Tegal itu, misalnya, bukan semata-mata karena ketidakbecusan perusahaan besar. Perusahaan yang menjadi bapak angkat berusaha meningkatkan kualitas produk dengan mengadakan pelatihan, tetapi dianggap sepele saja oleh pengusaha kecil. "Setiap kali ada pembinaan, yang datang hanya staf-stafnya saja," kata Sofyan menceritakan pengalamannya di LIK Frin Takaru.* (Warta Ekonomi, 1995b: 77).

Meskipun terdapat banyak kelemahan, program keterkaitan dan kemitraan patut diperluas dan disempurnakan sehingga tidak hanya menyangkut sektor industri dan pertanian (dengan program Perkebunan Inti Rakyatnya) tetapi juga sektor-sektor lainnya. Memang pada saat menghadapi globalisasi ekonomi, yang diperlukan adalah membenahi usaha-usaha di sektor produksi terlebih dulu, karena usaha inilah yang akan menghadapi kompetisi yang sengit. Pemusatan pada misi-misi ekonomi sehingga menghasilkan penajaman bentuk-bentuk kemitraan dipandang akan lebih efektif daripada yang hanya sekedar menjadi bagian kegiatan *public relation* usaha-usaha besar. Dengan pemusatan pada misi ekonomi, kemitraan yang 'segaris', artinya ada kaitan bisnis antara anak dan bapak angkat, akan lebih banyak tercipta.

Jaringan usaha dapat terbentuk karena: 1) hubungan vertikal yaitu antara usaha-usaha yang memiliki kaitan ke depan atau ke belakang, 2) hubungan horizontal yaitu antara usaha-usaha yang terkait langsung, namun tidak dalam sektor yang sama, 3) hubungan lateral yaitu antara usaha/institusi yang tidak terkait secara langsung, baik dalam sektor yang sama maupun berbeda. Semua bentuk hubungan tersebut perlu dikembangkan untuk

mencapai daya saing dan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Manifestasi bentuk hubungan dapat bermacam-macam. Kita tidak boleh terpancang hanya pada bentuk-bentuk formal semacam wara-laba, *joint-venture*, subkontrak dan sebagainya, namun kontak-kontak informal betapapun sederhananya perlu dijadikan bagian dari kesadaran usaha, karena peluang-peluang baru sering muncul dari kontak-kontak semacam itu.

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, kelangsungan jaringan usaha amat tergantung faktor kepercayaan. Ini bukan hanya menyangkut kejujuran, tetapi juga menuntut etos kerja yang mencerminkan perilaku profesional, sesuatu yang masih perlu banyak dibenahi di kalangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Banyak usaha kecil yang sekedar sebagai sambilan, tanpa upaya serius untuk mengembangkannya. Pengusaha yang kebanyakan juga tanpa latar belakang pendidikan yang memadai sudah cukup puas kalau dapat 'numpang makan' atau 'numpang hidup'. Hal yang semacam ini tentu berpengaruh terhadap profesionalisme dan kemampuan melihat peluang-peluang usaha. Sebenarnya ada paradoks di negara kita. Ketidak sempurnaan informasi, perilaku oportunistik, dan terbatasnya pelaku-pelaku ekonomi akan meningkatkan biaya-biaya transaksi, sehingga cukup alasan untuk mengembangkan jaringan usaha. Namun, persaingan untuk bertahan hidup di kalangan usaha kecil sering sedemikian sengitnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya internal juga sering sangat akut. Faktor-faktor tersebut menyebabkan tidak berkembangnya jaringan usaha, karena masing-masing sudah terlalu disibukkan oleh upaya bertahan hidup. Keekerabatan dan ikatan-ikatan sosial sering tidak cukup untuk mendorong terbentuknya jaringan usaha yang efektif.

Jelas bahwa jaringan usaha tidak akan mampu memainkan peran yang efektif tanpa pembenahan etos kerja dan profesionalisme usaha kecil dan menengah. Kesadaran tentang kualitas produk, keteguhan memegang perjanjian dan orientasi pada kepentingan jangka panjang adalah beberapa hal mendasar yang harus tertanam di kalangan pengusaha sebelum jaringan usaha dapat dikembangkan secara efektif. Pendidikan, penataran dan latihan mungkin dapat membantu para pengusaha kecil untuk meningkatkan profesionalisme. Namun, seperti yang telah sering disinggung, tanpa dukungan lingkungan usaha yang kondusif termasuk pemerataan akses terhadap permodalan dan informasi, keinginan untuk menciptakan usaha kecil dan menengah yang tangguh, sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi nasional cuma akan menjadi impian belaka. Dengan demikian amat diperlukan keberpihakan yang konsisten, karena mekanisme pasar hanya akan menguntungkan usaha-usaha yang besar dan kuat. Ini dipandang tidak hanya akan menciptakan struktur ekonomi yang rapuh, tetapi juga menjauhkan dari keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan.

Penutup

Pengembangan jaringan usaha adalah rekayasa organisasi antar unit usaha untuk meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah dalam menghadapi era globalisasi. Jaringan usaha diramalkan akan menjadi semakin krusial untuk menghadapi kompetisi global. Melalui jaringan usaha diharapkan usaha kecil dan menengah mampu mencapai efisiensi dan fleksibilitas yang lebih tinggi. Di dalam jaringan usaha, kompetisi diarahkan ke arah yang lebih konstruktif dan berada dalam keseimbangan dinamis

dengan kerjasama agar tercipta keunggulan harga maupun kualitas. Idealnya, jaringan usaha merupakan hasil inisiatif kalangan usaha sendiri. Namun, stimulasi pembentukannya masih diperlukan di Indonesia. Pengembangannya perlu disertai usaha-usaha untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pokok yang melekat pada kebanyakan usaha kecil dan menengah seperti kelemahan manajemen, teknologi produksi, permodalan dan pemasaran serta upaya untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Program keterkaitan dan kemitraan sebagai bagian dari upaya pengembangan jaringan usaha perlu terus dikembangkan dengan rasionalisasi yaitu memusatkan perhatian pada misi-misi ekonomi. Demikian juga berbagai model pengembangan jaringan usaha yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi perlu terus dicari dan dikembangkan jaringan usaha perlu dijadikan bagian integral upaya pengembangan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian perekonomian bangsa Indonesia akan terdiri dari jalinan jutaan jaringan usaha yang fungsional, sehingga mampu memperkokoh struktur ekonomi nasional sekaligus memperluas pemerataan.

Referensi

Blau, P.M.

1964. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley.

Brown, B.; and J. E. Butler.

1995. "Competitors as Allies: A Study of Entrepreneurial Networks in the U.S. Wine Industry." *Journal of Small Business Management*, vol.33 (3): 57-66.

Clapham, R.

1991. *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Grandori, A.; G. Soda.

1995. "Interfirm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms." *Organization Studies*, vol.16 (2): 183-214.

Huseini, M.; A. Pramono P.W.; H. Nurasa.

1994. "Pola Kerja Sama Bapak Anak Angkat Pada Perusahaan di Perkotaan." *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, No.6: 41-62.

Jarillo, J.C.

1988. "On Strategic Networks." *Strategic Management Journal*, vol.9: 31-41.

Pfeffer, J.; and G.R. Salancik.

1978. *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. New York: Harper and Row.

Prawiranegara, A. S.

1994. "Kebijaksanaan Pembinaan Pengusaha Kecil Khususnya Tentang Organisasi Usaha di Indonesia." *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, No.6:3-8.

Sadoko, I.; Maspiyati; D. Haryadi.

1995. *Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: Akatiga.

Sjaifudian, H.; D. Haryadi; Maspiyati.

1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*. Bandung: Akatiga.

Suhardi, T.

1992a. "Kemitraan dan Keterkaitan Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Dalam Industri Pengolahan." Pp.95- 109 dalam Thee Kian Wie (Ed.). *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Dalam Sektor Industri Pengolahan*. Jakarta: Gramedia.

1992b. "Evaluasi Pelaksanaan Program Keterkaitan Sistem Bapak Angkat Mitra Usaha." Pp.110-120 dalam Thee Kian Wie (Ed.). *Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Dalam Sektor Industri Pengolahan* Jakarta: Gramedia.

Thorelli, H. B.

1986. "Networks: Between Markets and Hierarchies." *Strategic Management Journal*, vol.7: 37-51.

Warta Ekonomi.

1995a. *Angin Koreksi Dari Taman Suropati*. Majalah Mingguan, No. 37, 6 Februari 1995.

1995b. *Karena Tak Cocok Pasanganpun Cekcok*. Majalah Mingguan No. 20, 9 Oktober 1995.

Williamson, O.E.

1975. *Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications*. New York: Free Press-Macmillan.

1991. "Comparative Economic Organization: the Analysis of Discrete Structural Alternatives." *Administrative Science Quarterly*, 36: 3-37.

Yeung, H.W.

1994. "Critical Reviews of Geographical Perspectives on Business Organizations and the Organization of Production: Towards A Network Approach." *Progress in Human Geography*, vol.18 (4): 460-490.

BAHASAN UTAMA

USAHA RAKYAT DAN PERDAGANGAN BEBAS: Mencari Format Kebijakan

Erna Ermawati Chotim dan Dedi Haryadi¹

Gelombang liberalisasi perdagangan semakin kuat. Negara maju, melalui Putaran Uruguay, merancang supaya prinsip perdagangan bebas diperluas. Bukan hanya menyangkut barang-barang manufaktur tetapi juga mencakup perdagangan jasa, investasi, produk pertanian dan hak milik intelektual. Putaran Uruguay telah memaksa negara berkembang untuk membebaskan pasarnya, dan membiarkan aktor asing bermain di dalamnya. Inilah format perdagangan internasional baru. Tampaknya tak ada satu negarapun yang bisa melepaskan diri dari kecenderungan besar tersebut. Yang paling mungkin dilakukan oleh setiap perekonomian adalah menyiasati bagaimana supaya format baru itu secara optimal menguntungkan negaranya.

Diproyeksikan format perdagangan internasional baru itu mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan sebesar US\$ 274.2 juta. Dan bisa dipastikan bahwa format baru tersebut hanya menguntungkan negara maju, karena sebagian besar (68.49 persen) nilai perdagangan yang mungkin terjadi akan dinikmati oleh negara-negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*). Secara individual, Jepang dan Amerika, merupakan pengambil manfaat terbesar, yaitu berturut-turut sekitar 15.31% dan 10.05%. Sementara negara-negara berkembang yang jumlahnya mayoritas hanya mungkin mengambil manfaat sekitar US\$ 86.4 atau sekitar 31.50 persen (Tabel 1). Implikasinya jelas, terjadinya persaingan yang sangat kuat diantara negara berkembang untuk merebutkan nilai transaksi perdagangan yang hanya tinggal sepertiganya.

Ironisnya bahwa sementara negara maju memaksakan negara berkembang supaya membebaskan pasarnya, tetapi mereka sendiri justru semakin protektif. Mereka membatasi kemungkinan mengimpor berbagai jenis barang dari negara berkembang, khususnya komoditi pakaian, tekstil, alas kaki, komoditi primer yang sudah diproses dan industri manufaktur ringan. Sekarang ini kecenderungan proteksi terhadap masuknya barang-barang semakin kuat, terutama dalam bentuk hambatan non tarif. Padahal produk-produk yang direstriksi itu merupakan keunggulan komparatif negara berkembang.

Laporan UNCTAD (*UN Conference on Trade and Development*) tahun 1992 menyebutkan bahwa restriksi kuantitatif yang dilakukan negara maju, telah mempengaruhi sekitar 67% ekspor tekstil dan pakaian negara berkembang. Tanpa hambatan tarif dan non tarif sebenarnya negara berkembang mampu melipatgandakan eksportnya. Dengan restriksi itu diperkirakan negara berkembang dirugikan sekitar US \$

¹ Peneliti AKATIGA, Pusat Analisis Sosial

50 milyar setahun. Angka ini merupakan hampir setengah dari total arus bantuan luar negeri.

Tidak pelak lagi, Indonesiapun digiring memasuki kerangka perdagangan internasional baru, di mana setiap perekonomian nasional dituntut untuk mem- buka diri terhadap aktor dan investasi asing. Produk yang segera terlihat dari desakan liberalisasi investasi adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994.

Pada saat yang sama secara regional ekonomi Indonesia mengikatkan diri dalam dua buah blok kawasan perdagangan bebas yaitu AFTA (*Asean Free Trade Area*) dan APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*). Pertanyaan yang menarik dari kenyataan di atas adalah bagaimana prospek usaha rakyat dengan format perdagangan bebas semacam itu.

Kejatuhan usaha rakyat: pengalaman masa lalu

Secara sederhana usaha rakyat bisa diartikan sebagai usaha yang melibatkan partisipasi rakyat banyak dimana usaha tersebut merupakan mata pencaharian pokok, dan memberikan manfaat bagi sebagian besar rakyat dan kepemilikannyapun dikuasai rakyat banyak. Ciri-ciri umum yang merupakan kantung- kantung kegiatan ekonomi rakyat diantaranya: 1) dari segi sektoral, ekonomi rakyat terkonsentrasi di sektor pertanian, perdagangan skala kecil dan kerajinan, 2) dari skala usaha, ekonomi rakyat terkonsentrasi pada unit usaha kecil, mikro, usaha rumah tangga dan pekerja mandiri, 3) dari segi formalitas usaha, ekonomi rakyat terkonsentrasi pada sektor-sektor informal, 4) dari segi spasial ekonomi rakyat terkonsentrasi di pedesaan, daerah terpencil, dan terbelakang/tertinggal dan kampung kumuh di perkotaan, 5) menurut tingkat produksinya, ekonomi rakyat terkonsentrasi pada bidang usaha tingkat tradisional dan sederhana, bukan bidang usaha dengan tingkat teknologi tinggi, 6) berdasarkan pemilikannya, ekonomi rakyat adalah koperasi, bukan BUMN dan bukan badan usaha milik swasta. Bila ditinjau dari skala usaha, pengertian usaha rakyat adalah usaha skala kecil dan usaha skala mikro (Sjaifudian; 1994). Definisi tentang usaha skala kecil dan usaha skala mikro ternyata sangat variatif. Yang dimaksud dengan istilah industri skala kecil menurut I.S.A. Baud, misalnya mencakup dua kategori, yaitu usaha skala kecil dan usaha skala mikro. Kriteria jumlah tenaga kerja menjadi pembeda jelas antara dua kategori itu. Usaha skala kecil mengerjakan 10 sampai 50 orang, sementara usaha skala mikro mengerjakan 0 sampai 10 orang. Penggunaan kriteria tenaga kerja seringkali cenderung mengesampingkan misalnya bagaimana sebenarnya status pekerjaan dari mereka yang terlibat di situ; apakah sebagai pekerja paruh waktu, pekerja penuh waktu, magang, pekerja keluarga, dsb. Bila kita tetap menggunakan kriteria tenaga kerja untuk membedakan antara usaha skala kecil dan usaha skala mikro maka perbedaan status tenaga kerja seperti itu perlu diperhatikan.

Pendefinisian usaha skala kecil berdasarkan kriteria tenaga kerja dipandang terlalu simpel sehingga Teszler misalnya meng- kombinasikan indikator ukuran (jumlah tenaga kerja), tingkat teknologi dan kewirausahaan untuk membedakan kategori usaha skala mikro dengan usaha skala kecil. Menurut tipologi industri kecil bisa dipecah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro terdiri atas; a. *self-employment* perorangan, b. *self-employment* kelompok, c. *cottage industry* (industri yang berbasis di rumah tangga yang memperkerjakan kurang dari 10 orang)
- 2) Usaha kecil terdiri atas; a. usaha skala kecil yang menggunakan teknologi tradisional, tapi disertai kecenderungan bahwa teknologi itu akan berubah menjadi teknologi moderen. b. usaha skala kecil yang menggunakan teknologi moderen yang disertai dengan kecenderungan semakin menguatnya keterkaitan dengan struktur ekonomi secara umum dan struktur industri secara khusus.

Pembedaan dan rincian jenis industri skala kecil seperti itu sangat berguna, karena dengan begitu kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai tipe usaha kecil. Selain itu juga kita bisa mengetahui respon yang muncul ketika kepada mereka diberikan satu-dua stimulus kebijakan.

Dalam kaitan dengan kategorisasi usaha Teszler menilai bahwa usaha kecil dan usaha mikro mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan tahap-tahap pembangunan. Di negara-negara yang berpendapatan sedang dan tinggi dan juga di negara-negara industri baru (NICS), posisi usaha kecil yang moderen sangat penting, sementara itu usaha mikro berbasis teknologi tradisional cenderung mati. Di negara-negara berpendapatan rendah, usaha kecil dengan teknologi tradisional atau teknologi yang sedang mengarah ke modernisasi merupakan tulang pembangunan industri. Dan di negara-negara yang berbasis sektor pertanian, usaha kecil dan mikro merupakan kutub pertumbuhan bagi usaha kecil di pedesaan.

Dalam konteks pembagian peran antar skala usaha nampaknya terlalu berlebihan mengkaitkan antara peristiwa meluasnya regim perdagangan internasional dengan kemungkinan bangkrutnya eksistensi beragam usaha rakyat. Selama ini pengalaman memperlihatkan bahwa eksistensi usaha kecil pernah terancam, dan bahkan banyak diantaranya yang mati, meskipun belum bersentuhan dengan iklim perdagangan bebas, seperti yang dicanangkan oleh berbagai skema atau blok perdagangan bebas saat ini. Kejatuhan beragam usaha kecil sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum ekonomi nasional melalui perdagangan terintegrasi ke dalam koneksitas ekonomi internasional sekarang ini.

Tiga kasus di bawah ini paling tidak bisa menjelaskan hal itu. **Pertama**, kehancuran berbagai usaha kecil tekstil yang mengandalkan teknologi Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) di Majalaya - Jawa Barat, sebagai dampak terdesaknya oleh pabrik tekstil berskala besar yang sudah sangat masinal, dan produksinya bersifat masal. Ini berkaitan dengan hadirnya sebuah teknologi moderen yang menggantikan teknologi tradisional.

Kedua, pengrajin sepatu di daerah Ciomas dan Cibaduyut yang mengalami kelesuan sebagai dampak kesulitan mendapatkan bahan baku. Bahan baku kulit yang semula cukup banyak tersedia kemudian menjadi langka karena banyak dibeli oleh pabrik sepatu skala besar. (lihat Thamrin; 1991, Maspiyati; 1991)

Ketiga, pengrajin bahan perabotan dapur yang terbuat dari kayu atau anyaman bambu mengalami penyempitan segmen pasar, sebagai dampak dari hadirnya barang yang berfungsi sama dengan bahan dasar plastik. Gejala ini selain berkaitan dengan kehadiran barang substitut juga berkaitan dengan hadirnya teknologi baru. Karena bagaimanapun perabotan dapur dari plastik diproduksi dengan suatu tingkat teknologi tertentu, dan jelas berbeda dari teknologi untuk membuat barang itu dari kayu misalnya. Dari ketiga kasus bisa diketahui bahwa usaha rakyat bisa jatuh karena berbagai sebab diantaranya munculnya atau perubahan teknologi baru, kelangkaan bahan baku dan munculnya bahan baku substitut.

Dengan kata lain bahwa fenomena 'jatuh banggunya' usaha rakyat merupakan suatu hal yang 'biasa', bahkan beberapa hasil penelitian melihat ini sebagai salah satu indikasi strategi adaptasi dan kelenturan usaha kecil dalam menghadapi berbagai perubahan. Lalu bagaimana kita mau memposisikan sekaligus mengartikan bahwa skema perdagangan bebas sebagai hal yang betul-betul akan mengancam eksistensi mereka? Karena melalui mekanisme yang hampir sama (dengan sebelum munculnya liberalisasi perdagangan), misalnya dengan fenomena konglomerasi saja kejatuhan usaha rakyat besar kemungkinan akan semakin besar dan luas. Besar dalam arti dampaknya bisa dimulai dari sektor hulu sampai hilir, sedangkan luas berarti bisa dimulai dari sektor a sampai z. Terlebih dalam konteks perdagangan bebas bisa dipastikan posisi usaha rakyat semakin terancam. Mereka tidak saja dituntut harus bersaing dengan gurita ekonomi nasional tetapi juga bergelut dengan gurita-gurita ekonomi internasional.

Dalam konteks keseharian saat ini saja misalnya pasar domestik sudah dimasuki oleh berbagai produk pertanian dari luar negeri secara intensif. Sementara produk-produk lokal tersisih dengan segmen pasar yang semakin kecil dan hanya bisa melayani orang-orang kecil. Itu karena produk-produk dari luar kualitasnya lebih bagus dan harganya terjangkau. Sementara produk lokal, meskipun harganya sama-sama terjangkau, namun kualitasnya jauh lebih buruk. Pada kasus lain, harian The Jakarta Post edisi Sabtu tgl 27 Januari 1996, hal 3, misalnya mewartakan bahwa kondisi peternakan lokal terancam hancur karena semakin derasnya arus impor daging dari beberapa negara; Australia, Amerika, Perancis, Jerman, Belanda dan Selandia Baru. Daging impor itu dijual lebih murah dengan kualitas yang lebih baik dibanding daging lokal.

Kedua kasus di atas memberi isyarat kepada kita bahwa selain mematikan usaha rakyat (lokal) di berbagai sektor, juga dalam jangka panjang akan menimbulkan ketergantungan kita terhadap impor produk-produk itu dari luar. Dan ini secara keseluruhan berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini bisa lebih buruk karena secara kuantitas maupun kualitas produk-produk usaha rakyat masih kesulitan menjangkau dan bersaing di pasar ekspor.

Agenda: kebijakan dua sisi

Salah satu kebijakan yang mencoba mempersiapkan kondisi usaha rakyat untuk bisa bersaing dalam perdagangan bebas adalah Undang-Undang Tentang Pembinaan Usaha

Kecil. Ada banyak pendapat pro maupun kontra berkait dengan RUU PUK ini. Pandangan yang kontra terhadap UU PUK menilai bahwa undang-undang tersebut dibuat secara tidak komprehensif dan tampak hanya merupakan respon politis dan bukan respon pragmatis dan rasional terhadap pengembangan usaha kecil.

Salah satu kelemahan RUU-PUK yang banyak disorot adalah bahwa UU ini masih sangat tidak jelas dan tidak efektif untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi usaha kecil dan RUU-PUK ini juga terkesan hanya merupakan penggabungan yang dipaksakan antara RUU praktek perdagangan yang adil dengan RUU usaha kecil. Sementara pandangan yang pro terhadap RUU menyatakan bahwa RUU-PUK ini merupakan satu langkah awal yang akan diikuti dengan peraturan lain yang lebih mendalam.

Pada prinsipnya yang dibutuhkan usaha rakyat saat ini dalam menghadapi era globalisasi bukan lagi berupa perlindungan karena jelas sekali itu bertentangan dengan WTO (*World Trade Organization*). Cara yang paling tepat untuk saat ini adalah berupa penguatan diri dan bantuan.

Saat ini kita belum punya informasi yang memadai, tentang rincian komoditi yang mengkait dan menjadi kesepakatan bersama dalam skema perdagangan bebas AFTA dan APEC. Meski-pun demikian penting untuk melakukan beberapa langkah awal dalam rangka mempersiapkan usaha kecil dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Yang menjadi agenda pertama dan menjadi langkah penting untuk dilakukan saat ini adalah perlunya studi awal tentang bobot kaitan komoditi yang diusahakan usaha kecil dengan dinamika perdagangan yang lebih luas, yakni impor dan ekspor. Keterkaitan itu bisa berupa bahan baku, ketenagakerjaan maupun komoditi siap konsumsi. Dari situ kemudian kita akan tahu kemungkinan yang akan terjadi dengan perkembangan usaha kecil tertentu.

Yang kedua kita juga perlu mengetahui kondisi usaha kecil sekarang ini, terutama mengenai perkembangan komoditinya. Dari studi ini diharapkan kita bisa tahu komoditi mana yang potensial dikembangkan untuk memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka. Dan juga kita akan mengetahui komoditi mana yang potensial hancur sehingga bisa diciptakan langkah antisipasi yang cepat sekaligus tepat. Kedua langkah tersebut bisa dilihat sebagai langkah pendekatan terhadap usaha kecil dari sisi produsen. Langkah lain dari sisi penawaran yang juga penting dan masih relevan adalah kebijakan pengembangan kredit untuk usaha kecil, pengembangan kemampuan kewirausahaan, dan pengembangan kemampuan penguasaan teknologi.

Langkah ketiga, yang tidak kalah penting adalah pendekatan dari sisi konsumen. Pada sisi ini kita perlu mengembangkan pasar domestik untuk komoditi domestik. Ini semacam upaya mengembangkan nasionalisme ekonomi. Pada dasarnya pembangunan ekonomi juga harus berakar pada nasionalisme. Kita berusaha mengendalikan preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk luar, tetapi sebaliknya mengembangkan preferensi masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk lokal. Itu harus ditempuh melalui upaya pengembangan kuantitas dan kualitas produk lokal. Tidak

bisa hal itu dilakukan dengan cara mengembangkan semangat altruisme. Karena bagaimanapun kita harus berupaya supaya konsumen lokal jangan menanggung *_opportunity cost_* hanya karena mereka mengkonsumsi produk lokal. Pada tahap ini diperlukan bantuan pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif berupa dukungan sarana infrastruktur sekaligus pelatihan yang bisa meningkatkan kualitas produk maupun sumber daya pengelola usaha- usaha rakyat. Pada sisi ini penting untuk dibuat suatu jaringan industrial berupa ke- lompok pedagang atau produsen yang melakukan siklus produksi dan pemasaran secara utuh untuk barang-barang final tertentu, yang dirancang untuk segmen pasar tertentu. Jaringan ini memperkuat pengusaha kecil dari sisi permintaan. Menurut Knorringa dan Weijland langkah ini penting karena dari sisi permintaanlah yang sangat menentukan kerawanan usaha rakyat. Lagi pula bobot keamanan penciptaan lapangan kerja ada pada sisi permintaan.

Pemetaan peran actor

Siapakah yang menjadi agen pelaksana dari semua kebijakan seperti yang diusulkan di atas ? Semua aktor seperti lembaga pemerintah, organisasi non pemerintah, organisasi politik, pers, lembaga keuangan, lembaga international, lembaga penelitian, asosiasi, konsultan pembangunan, dan perguruan tinggi bisa ambil bagian dalam upaya memperkuat kinerja usaha kecil. Sebagai contoh, dua agenda yang disebutkan diatas memberi peluang yang sangat lebar kepada lembaga penelitian dan perguruan tinggi.

Dalam hal ini mereka dituntut untuk memberi pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai dinamika usaha kecil dalam konteks perkembangan sosial, ekonomi, politik dan budaya baik lingkup lokal, nasional maupun global. Pengetahuan dan pemahaman ini jadi bekal sangat penting bagi aktor lain untuk melakukan intervensi secara ajeg. Aktor lain bisa mengambil peran lain, sesuai dengan sudut pandang dan anggapan tentang aspek apa yang paling penting (*crucial*) dari seluruh mata rantai pengembang- an usaha kecil. Contoh lain, organisasi non pemerintah mungkin akan ambil peran penting dalam upaya menggerakkan masyarakat untuk mencintai dan mau mengkonsumsi produk- produk lokal buatan usaha kecil.

Yang menarik dari seluruh peran yang mungkin muncul, adalah bagaimana sebenarnya peran paling pas yang harus diambil pemerintah. Dalam konteks kondisi politik dan ekonomi negara sedang berkembang pertanyaan itu menjadi sangat penting, karena kita tahu bahwa dalam hampir setiap aktivitas pembangunan pemerintah punya posisi dan peran yang sangat dominan, baik dalam hal pendekatan, aspek finansial dan penggalangan (mobilisasi berbagai sumberdaya yang ada dalam masyarakat).

Satu hal yang sudah jelas adalah kebijakan yang sifatnya protektif dan subsidi tidak akan populer ditengah iklim perdagangan yang semakin bebas. Meskipun begitu perkembangan ini tidak akan sampai mengubah esensi bahwa peran pemerintah memang penting. Yang paling mungkin adalah perkembangan ini akan menggeser peran pemerintah dari yang tadinya interventif, menjadi manajer pembangunan. Dalam peran yang baru ini pemerintah mestinya hanya bermain pada tingkat kebijakan. Menurut

Sadoko, et al, paling tidak ada beberapa langkah yang bisa mengajegkan fungsi pemerintah sebagai pengelola pembangunan (1995; hal 111- 114): meniadakan distorsi kebijakan keuangan nasional, kebijakan hukum yang adil dan transparan, perlu dibukanya kran partisipasi, dikembangkannya prinsip trans- paransi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan.

Meskipun disana-sini terasa masih berbau interventif, daftar apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga aktor-aktor lain yang dibuat Hetifah Sjaifudian et al (1995; 92) masih tetap bermanfaat. Setidak- nya daftar itu memberi pedoman minimal, apa yang harus dilakukan secara minimal, untuk minimasi kebangkrutan usaha rakyat.

Referensi

Chotim, Erna Ermawati.

1994. Subkontrak dan Implikasinya Terhadap Pekerja Perempuan, AKATIGA, Bandung.

UNDP

1994. Human development Report

Haryadi, Dedi dan Indrasari Tjandraningsih

1995. Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil, AKATIGA, Bandung.

I.S.A. Baud dan G.A. de Bruijne

1993. Gender, Small - Scale Industry And Development Policy, Intermediate Tech- nology Publication.

Jakarta Post, Edisi 26 Januari 1996

Sjaifudian, Hetifah.

1994. Problematika Pem- bangunan Ekonomi rakyat, Yayasan Mitra usaha, Jakarta.

Sadoko, Isono, dkk

1995. Pengembangan Usaha Kecil: Pemihakan Setengah Hati, AKATIGA, Bandung.

Teszler, Roger

1993. Small-Scale Industry Contribution To Economic Development dalam I.S.A. Baud, Intermediate Technology Publication, London.

Thamrin, Juni.

1991. Organisasi Produksi dan Ketenagakerjaan Pada Industri Kecil Sepatu: Studi Kasus Cibaduyut.

Maspiyati.

1991. Organisasi Produksi dan Ketenagakerjaan Pada Industri Kecil Sepatu: Studi Kasus Ciomas - Bogor.

BAHASAN UTAMA

PEKERJA PEREMPUAN DI USAHA KECIL : FENOMENA BURUH RUMAHAN DALAM GLOBALISASI

Indrasari Tjandraningsih¹

Pengantar

Diskusi mengenai globalisasi ekonomi dan pasar bebas yang terjadi di mana-mana cenderung masih mengacu pada situasi makro dan bersifat umum, atau masih terfokus pada nasib unit-unit usaha kecil atau rakyat dengan gambaran suram akibat ketidakmampuannya bersaing di pasar bebas dengan unit-unit usaha menengah dan besar. Belum banyak dibicarakan bagaimana nasib yang akan menimpa pekerja dan buruh- buruh usaha kecil yang potensial tergusur atau tereksploitir akibat globalisasi.

Hal semacam itu kiranya merupakan konsekuensi logis dari pembicaraan suatu isu besar yang mengaitkan persaingan antarnegara dan antar usaha besar. Karena globalisasi pada dasarnya membicarakan persaingan antarnegara dan persaingan usaha (modal) antar maupun intranegara, dan dengan demikian lebih berfokus pada negara dan modal (besar), maka faktor manusia sebagai pekerja cenderung luput dari perhatian. Dalam hal ini faktor manusia berada di bawah kepentingan dan tujuan nasional serta suksesnya pertumbuhan ekonomi yang menjadi slogan sekaligus pembenaran fenomena globalisasi. Asumsinya adalah bahwa keuntungan yang diraih nanti akan dengan sendirinya dinikmati oleh para pekerja juga. Jane Kelsey dengan tepat merumuskan bahwa dalam konteks perdagangan bebas dan atas nama pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, negara, pemerintah, masyarakat, pekerja, perempuan, dan ekosistem adalah tidak relevan untuk dibicarakan kecuali dalam fungsi mereka sebagai alat atau kendaraan untuk mendukung modal meraih keuntungan (1995).

Kondisi semacam itu tentu samasekali tidak benar karena perdagangan bebas sebagai sebuah fenomena ekonomi dengan sendirinya juga selalu mengandung dimensi sosial dan politik. Deregulasi ekonomi selalu akan berpengaruh terhadap kehidupan semua orang: buruh, petani, perempuan, anak- anak, konsumen dan sebagainya. Memperhatikan pengaruh tersebut tentu penting dan membela kelompok yang terkena pengaruh yang bersifat negatif tentu lebih penting.

Diantara kelompok manusia sebagai pekerja yang terluput dari perhatian dalam pembahasan dampak globalisasi adalah kelompok pekerja perempuan di usaha-usaha kecil. Ada semacam ironi dalam kenyataan dinamika usaha kecil dan keterlibatan perempuan. Apabila diamati berdasarkan sektor, usaha kecil banyak digerakkan oleh perempuan sebagai buruh rumahan (*subcontracting workers atau homeworkers*) dan pekerja/ tenaga keluarga. Sektor

¹ Peneliti AKATIGA, Pusat Analisis Sosial.

usaha industri, perdagangan dan jasa skala kecil banyak melibatkan perempuan, akan tetapi keterlibatan tersebut bersifat *invisible* sehingga jarang diakui.

Sifat *invisibility* dari partisipasi perempuan dalam menggerakkan roda usaha kecil hanya merupakan salah satu karakteristik pekerja perempuan di usaha kecil. Karakteristik lain adalah upah yang rendah, beban kerja ganda, miskin terhadap akses untuk peningkatan kemampuan dan diskriminasi perlakuan dalam partisipasi kerja mereka. Dalam situasi pasar dan persaingan bebas, ketika ongkos produksi serendah-rendahnya menjadi *concern* para produsen, dapat diduga bahwa partisipasi perempuan dalam proses produksi akan semakin mening- kat akan tetapi kondisinya tidak ikut meningkat.

Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana kaitan antara globalisasi dengan kondisi pekerja perempuan di usaha kecil. Selain itu juga dicoba diidentifikasi beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki dan meningkatkan status pekerja perempuan. Fokus perhatian dalam tulisan ini adalah fenomena perempuan buruh rumahan di sektor industri kecil di pedesaan.

Pekerja dan Pekerjaan Perempuan

Peran dan partisipasi perempuan dalam kerja di usaha kecil harus diakui masih sering terabaikan. Salah satu wujud keterabaian tersebut misalnya tercermin dari angka-angka partisipasi perempuan dalam kerja yang terekam dalam angka-angka statistik yang sering menimbulkan pertanyaan karena dihadapkan dengan kenyataan yang ada, angka-angka itu terlalu kecil. Kecurigaan terhadap sifat data-data statistik resmi yang *under-represent* terhadap pekerja perempuan telah diangkat dan dikritisi oleh beberapa peneliti. van Velzen dalam disertasinya menyatakan bahwa angka mengenai partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia dengan jelas menunjukkan validitas data statistik yang sangat terbatas: berdasarkan data hingga tahun 1987, dari seluruh penduduk perempuan yang berusia di atas 10 tahun hanya 20-30% yang bekerja (1994). Hasil sensus penduduk tahun 1990 menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja hampir mencapai angka 40. Meskipun terjadi kenaikan dalam persentase, akan tetapi angka tersebut tetap masih *underrepresent* terhadap kenyataan yang ada.

Apa yang menyebabkan rendah- nya angka partisipasi perempuan dalam kerja sebagaimana tercantum dalam angka-angka resmi? Beberapa hal secara bersama-sama menjadi alasannya. Hal yang pertama menyangkut persepsi mengenai kerja (yang dilakukan) perempuan dikaitkan dengan peran domestik perempuan; kedua, berkaitan dengan persepsi tersebut adalah perangkat pengukuran, penen- tuan atau pendefinisian pekerjaan perempuan dan yang ketiga adalah sifat musiman, paruh waktu dan informal dari kebanyakan pekerjaan perempuan (Utrecht, 1988:35).

Ideologi yang mewarnai persepsi mengenai pekerjaan perempuan selalu menempatkan kerja perempuan dalam konteks kegiatan rumah tangga. Seperti juga yang dinyatakan Utrecht (ibid), mengingat sebagian besar kegiatan kerja perempuan terutama di pedesaan dilakukan di sekitar rumah tangga, maka tidak mudah untuk secara tegas memisahkan jenis atau sifat

dalam kelompok pasar atau nonpasar, ekonomi atau nonekonomi, produksi atau reproduksi. Kesulitan tersebut kemudian menimbulkan simplifikasi pendefinisian pekerjaan perempuan. Misalnya karena kegiatan kerja perempuan dilakukan di dalam atau di sekitar rumah maka kegiatan mereka dianggap sebagai membantu usaha rumah tangga belaka. Kondisi tersebut yang antara lain menyebabkan kelompok perempuan sebagai tenaga keluarga merupakan kelompok yang terbesar yang terekam dalam statistik ketenagakerjaan (BPS 1995) dibandingkan dengan perempuan sebagai wiraswasta atau pengusaha dan sebagai buruh.

Berbagai penelitian mengenai partisipasi kerja perempuan dalam industri kecil banyak mengangkat pekerja perempuan yang bekerja di rumah. Penelitian-penelitian tersebut (lihat misalnya Suratiyah dkk 1994, Miko 1991, van Velzen 1994) menemukan bahwa banyak perempuan yang bekerja di rumah ternyata tidak hanya sekedar membantu usaha rumah tangga, melainkan melakukan pekerjaan sebagai buruh upahan yang mandiri yang melakukan pekerjaannya di rumah untuk pihak pemberi kerja. Inilah kelompok buruh rumahan atau home workers yang belum dihitung sebagai bentuk partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Beberapa peneliti mengkategori-kan perempuan yang melakukan pekerjaan di rumah sebagai tenaga keluarga. Demikian pula BPS sehingga hanya ada tiga kelompok kegiatan kerja perempuan seperti tersebut di atas dalam statistik resmi kita. Mengelompokkan pekerja rumahan dalam tenaga keluarga tidaklah terlalu tepat dan menafikan sumbangan ekonomi secara langsung yang diberikan oleh para buruh rumahan. Pekerja rumahan adalah buruh yang diupah untuk melakukan pekerjaan menghasilkan sesuatu barang atas tanggungan dan resiko sendiri. Buruh rumahan, berbeda dengan kelompok buruh yang lain, berada dalam kerangka organisasi produksi yang terdesentralisasi (*decentralized production organisation*) dengan sistem subkontrak atau *putting out*. Dalam sistem ini pemilik pekerjaan atau majikan mengupah orang untuk melakukan pekerjaan di tempat tinggal orang yang bersangkutan. Selain bahan baku dan bahan pembantu yang disediakan oleh majikan, semua fasilitas dan jaminan kerja menjadi tanggungan buruh. Sistem semacam ini sangat menguntungkan majikan karena membebaskan mereka dari segala kewajiban menyediakan sarana kerja dan kewajiban-kewajiban lain sebagai majikan kecuali membayar upah kerja.

Fenomena buruh rumahan berada dalam kerangka sistem produksi kapitalis yang mendapatkan banyak keuntungan dari sana. Apabila perempuan banyak melakukan pekerjaan dengan status buruh rumahan, hal itu merupakan perwujudan ideologi gender dan pembagian kerja seksual dalam masyarakat. Kedua hal tersebut merupakan dasar dari munculnya karakteristik buruh rumahan yakni berupah murah, tanpa jaminan kelangsungan pekerjaan, tanpa jaminan sosial, tanpa posisi tawar dan tidak terjangkau oleh regulasi ketenagakerjaan. Karakteristik tersebut merupakan manifestasi -sekali lagi- dari asumsi dan persepsi mengenai perempuan dan kerja.

Perempuan memilih menjadi buruh rumahan karena penghasilan yang diperoleh suami atau anggota keluarga lelaki lain di dalam rumah tangga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bekerja di rumah juga dilakukan sebagai suatu strategi kaum perempuan dengan tujuan ganda yakni memperoleh penghasilan sambil memastikan diri bahwa pekerjaan-pekerjaan domestik tetap terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Meskipun demikian pekerjaan

yang mereka lakukan masih sering dipandang sebagai 'pengisi waktu luang' atau 'pekerjaan sambilan' yang menunjukkan posisi ekonomi yang subordinat.

Buruh Rumahan di Sektor Industri Kecil : Gambaran Situasi dan Kondisi

Beberapa sektor industri kecil yang roda produksinya didukung oleh pekerja perempuan adalah sektor-sektor industri yang memproduksi sandang, pangan dan kerajinan. Ketiga kelompok produk tersebut dianggap merupakan produk yang tipikal perempuan dan sesuai dengan domain perempuan sebagai pengelola rumah tangga. Baik di Indonesia maupun di negara-negara lain, industri skala kecil garmen, berjenis-jenis makanan dan kerajinan banyak mengandalkan tenaga perempuan dan dalam industri-industri ini sistem *putting out* dan subkontrak banyak diterapkan.

Penelitian dan studi yang dilakukan mengenai buruh rumahan di Indonesia maupun di negara-negara lain menunjukkan situasi yang sama dan ciri pekerja rumahan yang universal. Penelitian di industri kecil sepatu di Cibaduyut (Thamrin ed 1991), industri batik di Pekalongan dan Solo (Sjaifudian & Chotim 1994), industri makanan di beberapa sentra di Jawa Barat (Grijns dkk ed 1992) dan Sumatera Selatan (Suratiah dkk 1994), industri kerajinan bambu dan bordir di Jawa Barat (Smyth 1991) dan ukiran di Jawa Tengah (Lestari dkk 1994) serta garmen di Jawa Tengah (Susilastuti 1996) menunjukkan karakteristik buruh rumahan. Bahkan dibandingkan dengan situasi dan kondisi buruh-buruh rumahan di Filipina, Pakistan, India, Thailand, Turki, Mexico dan lain-lain (Prugl 1996), karakteristik buruh rumahan tetap sama. Di semua tempat tersebut para buruh rumahan adalah kaum perempuan, ibu rumah tangga dan gadis yang merasa penghasilan suami atau kepala keluarga yang bekerja di sektor pertanian maupun industri dan jasa tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan karena itu mereka harus bekerja. Pilihan melakukan pekerjaan di rumah selain karena tuntutan masyarakat terhadap kewajiban penyelenggaraan rumah tangga, juga karena alasan-alasan praktis yang menjadi pertimbangan mereka sendiri terutama untuk keperluan perawatan dan pemeliharaan anak-anak kecil.

Buruh rumahan pada umumnya tidak mengetahui dengan pasti siapa sebenarnya majikan atau pemilik pekerjaan. Mereka hanya berhubungan dengan perantara yang bertindak selaku majikan sekaligus pedagang. Hubungan kerja yang terjalin bersifat informal tanpa bukti-bukti tertulis yang membuat posisi mereka sangat lemah terutama bila menghadapi klaim atau penolakan hasil kerja oleh majikan.

Sebagai buruh rumahan yang dibayar secara borongan berdasarkan satuan hasil kerja yang diselesaikan, mereka seringkali mengerahkan anggota keluarga yang lain yakni anak-anak sebagai tenaga kerja tak dibayar. Sistem target yang diterapkan oleh pemilik pekerjaan seringkali membuat buruh rumahan bekerja dalam waktu panjang. Kontinuitas kerja dan penghasilan mereka sangat ditentukan oleh pemberi kerja atau majikan.

Buruh rumahan secara total mempunyai jam kerja yang sangat panjang karena disamping melakukan pekerjaan produktifnya, mereka juga melakukan pekerjaan reproduktif dan domestiknya. Selain itu pada umumnya mereka juga harus menyediakan sendiri sarana dan

alat kerjanya seperti mesin jahit untuk garmen, pisau dan sejenisnya untuk kerajinan, ruangan dan penerangan, karena majikan hanya menyediakan bahan baku dan bahan pembantu yang langsung berhubungan dengan produk. Mereka juga umumnya harus bertanggung-jawab terhadap kerusakan produk dan untuk itu seperti yang ditemukan dalam studinya, buruh rumahan harus 'rela' mengulang pekerjaan tanpa upah ekstra demi mempertahankan reputasinya di hadapan majikan dan demi menjaga kelangsungan pekerjaan (Susilastuti 1996). Beban produksi yang seharusnya ditanggung oleh majikan, dalam kerangka subkontrak maupun *putting-out* dialihkan menjadi beban buruh rumahan. Beban ini secara keseluruhan membuat upah yang diterima rendah karena pada umumnya beban-beban produksi tak langsung semacam itu tidak diper-hitungkan oleh kedua belah pihak.

Kecelakaan dan resiko kerja yang dialami juga sepenuhnya menjadi tanggungjawab buruh rumahan karena tidak pernah dijadikan butir yang dibahas dalam 'negosiasi' kedua belah pihak. Pengamatan di industri bordir dan garmen menunjukkan bagaimana resiko kemunduran kesehatan mata banyak dialami oleh buruh rumahan karena demi menghemat pemakaian listrik atau penerangan yang memadai lainnya, mereka bekerja di bawah sinar alam hingga sinar peng-habisan yang paling memung-kinkan.

Satu ciri lain dari para buruh rumahan terutama untuk Indonesia adalah ketiadaan kesempatan dan kesadaran berorga-nisasi. Jam kerja yang panjang tidak memberikan waktu luang untuk bersosialisasi atau membahas persoalan-persoalan pekerjaan yang dihadapi. Di samping itu ada kecenderungan munculnya persaingan yang kurang sehat di antara buruh rumahan; dalam upaya mempertahankan kelangsungan pekerjaan tidak jarang mereka membanting upah kerja yang selain merendahkan posisi tawar mereka juga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Kondisi semacam itu tentu tidak kondusif untuk memulai upaya melakukan pengorganisasian.

Perbedaan mendasar buruh rumahan di Indonesia dengan buruh rumahan di negara lain misalnya di kelompok negara Asia Selatan terutama India dan negara-negara di Eropa adalah eksistensinya. Di negara-negara tersebut telah dimulai upaya memperjuangkan buruh rumahan agar memperoleh dan dijamin hak-haknya sebagai buruh. Sejak awal dekade 90 ini, isu buruh rumahan dinaikkan ke permuka-an dan diagendakan dalam arena politik internasional oleh para pembela buruh rumahan. Advokasi yang berhasil ini membuahkan berbagai forum internasional untuk membahas eksistensi dan kondisi buruh rumahan. Dalam tahap yang lebih progresif, advokasi tersebut disuarakan sendiri oleh kaum perempuan buruh rumahan dalam suatu pertemuan internasional (Prugl & Boris 1996). Dalam forum maupun aksi internasional tersebut Indonesia masih belum terlibat.

Advokasi mengenai isu buruh rumahan pada dasarnya muncul dari pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya kelompok ini dalam strategi internasionalisasi produksi yang dilakukan oleh modal. Dalam rangka mencari modus produksi yang paling banyak mendatangkan keuntungan, modal menyebar proses produksi ke seluruh penjuru dunia yang mau menye-diakan tenaga murah melalui jaringan subkontrak. Tenaga-tenaga murah tersebut adalah kaum perempuan dan imigran yang membentuk*one extreme in the sharpening polarization of the labor force into those who benefit from the ongoing restructuring and 'global control capability' and those who are left with so-called flexible*

work arrangements; who are paid low wages; who receive no benefits; and who find themselves cut out of social security, labor standards, and other state guarantees (Prugl & Boris 1996).

Mengangkat Eksistensi Buruh Rumahan di Indonesia

Di Indonesia, eksistensi buruh rumahan masih menghadapi persoalan yang mendasar yakni masih sangat sedikit mendapatkan perhatian dari pemerintah dan akibatnya pengakuan terhadap mereka belum ada. Bahwa buruh rumahan tidak tercakup dalam sensus dan tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan membuktikan kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan *vulnerability* posisi dan status mereka.

Banyaknya studi mengenai perempuan sebagai buruh rumahan ternyata belum cukup untuk membuat isu ini ditoleh banyak orang. Diskusi mengenai masalah tenaga kerja secara umum maupun tenaga kerja di industri kecil masih terpusat pada buruh yang bekerja di tempat kerja yang disediakan oleh majikan atau buruh dalam kerangka hubungan formal dengan majikan. Sifat *invisible* kelompok buruh rumahan masih tetap dominan, padahal dengan modus operasi modal dalam era globalisasi akan meningkatkan jumlah kelompok ini. Mempekerjakan buruh di rumah mereka sendiri tidak hanya dilakukan oleh industri-industri kecil tetapi juga mulai ditiru oleh industri besar dengan alasan yang sama. Gejala informalisasi tenaga kerja formal telah mulai berlangsung pada beberapa sektor industri dalam rangka menjalani persaingan usaha dengan pihak-pihak lain.

Gejala ini sudah seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Untuk itu pemerintah harus memasukkan kelompok buruh rumahan dalam kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan sehingga hak-hak mereka terlindungi. Agar memperoleh gambaran yang konkrit mengenai jumlah dan kondisi buruh rumahan, pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja bersama-sama Biro Pusat Statistik harus melakukan survai lapangan untuk mengetahui jumlah, jenis pekerjaan, sektor kerja, jumlah perusahaan, kondisi kerja serta latar belakang sosial-ekonomi buruh rumahan yang ada. Informasi dasar ini mutlak diperlukan untuk mendeteksi kecenderungan peningkatan jumlah mereka sekaligus menghitung sumbangan mereka terhadap perekonomian nasional. Langkah ini dapat dilakukan dengan mudah dengan mempelajari hasil-hasil studi mengenai buruh rumahan yang sudah banyak dilakukan di Indonesia. Informasi dasar mengenai buruh rumahan tersebut juga penting untuk meyakinkan pemerintah sendiri mengenai potensi sumber daya manusia terutama perempuan dalam menyumbang perkembangan ekonomi. Selain itu harus disusun peraturan yang spesifik mengenai buruh rumahan karena karakteristiknya yang berbeda dengan buruh formal misalnya mewajibkan setiap unit usaha untuk mendaftarkan atau mencatat buruh rumahan yang dipekerjakan.

Dari kelompok buruhnya sendiri juga harus dimulai melakukan upaya-upaya perwujudan eksistensi mereka. Salah satu cara adalah mengorganisir diri seperti yang dilakukan oleh para buruh rumahan di India misalnya melalui asosiasinya yang masyhur yakni SEWA (*Self Employed Women's Association*). Melalui asosiasi tersebut para buruh rumahan berjuang untuk meraih pengakuan, upah yang lebih baik dan jaminan sosial. Langkah yang sama

bukan tidak mungkin dilakukan oleh buruh rumahan di Indonesia. Dengan berorganisasi maka buruh rumahan akan menjadi kelompok yang eksis dan patut diperhatikan.

Sesungguhnya buruh rumahan merupakan kelompok yang potensial untuk ditingkatkan menjadi pengusaha mandiri. Perwujudannya dapat dilakukan dengan membukakan akses atau menyediakan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan menumbuhkan kemampuan mengelola usaha. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga-lembaga nonpemerintah. Karena lembaga nonpemerintah juga cenderung kurang peduli terhadap buruh rumahan, maka masih diperlukan upaya ekstra untuk menolehkan perhatian mereka terhadap kelompok ini. Melihat makin meluasnya perhatian internasional terhadap kelompok buruh rumahan sebagaimana terlihat dengan adanya forum pertemuan yang diorganisir oleh ILO, deklarasi Jakarta untuk kemajuan perempuan di Asia-Pasifik dan deklarasi Beijing, serta meningkatnya potensi pengerahan buruh rumahan dalam persaingan global sekarang ini, maka tiba waktunya bagi kita untuk mulai bersungguh-sungguh menghadapi persoalan mereka dan menyikapi persoalan tersebut dengan empati.

Referensi

Biro Pusat Statistik (BPS)

1995, Wanita dan Pria di Indonesia, Jakarta

Boris, Eileen & Elisabeth Prugl eds,

1996, Homeworkers in Global Perspective, New York: Routledge

Grijns, Mies et al eds,

1992, Gender, Marginalisasi dan Industri Pedesaan, Bandung: ISS & AKATIGA

Kelsey, Jane

1995, "APEC: Catching A Tiger By The Tail " dalam Challenging The Mainstream, Apec and The Asia-Pacific Development Debate. Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA), Asia Alliance of YMCAs, Christian Conference for Asia-International Affairs (CCA), Documentation for Action Groups in Asia (DAGA).

Lestari, Sri Budi dkk,

1994, Pekerja Wanita dan Industri Kerajinan Ukiran di Jawa Tengah, Yogya: PPK-UGM

Miko, Alfian,

1991, Pekerja Wanita pada Industri Rumah Tangga Sandang di Propinsi Sumatra Barat, Yogya: PPK-UGM

Smyth, Ines,

1990, Differentiation among Petty Commodity Producers: The Effects of a Development Project on Handicrafts Production in a Sundanese Village, Bandung : ISS

Sjaifudian, Hetifah & Erna Ermawati Ch,

1994, Dimensi Strategis Pengembangan Usaha Kecil: Subkontrak pada Industri Garmen Batik, Bandung : AKATIGA

Suratiah, Ken dkk,

1994, Marginalisasi Pekerja Wanita di Pedesaan: Studi Kasus Industri Rumah Tangga Pangan di Sulawesi Selatan, Yogya: PPK-UGM

Susilastuti, Dewi Hariyani,

1996, Home-Based Work as a Rural Survival Strategy in Homeworkers in Global Perspective, Boris & Prugl, eds, New York: Routledge

Thamrin, Juni,

1991, Organisasi Produksi dan Ketenagakerjaan pada Industri Kecil Sepatu: Kasus Cibaduyut Bandung, Bandung: ISS

Utrecht, Artien,

1988, Women's Role in Rural Industrialisation, The Case of Java, The Hague: ISS

van Velzen, Anita,

1994, Who's The Boss, Amsterdam: CASA

BAHASAN UTAMA

MENYIKAPI ISU LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI ERA LIBERALISASI

Juni Thamrin

Pendahuluan

Sikap Presiden Soeharto dalam menanggapi situasi kesiapan Indonesia menghadapi globalisasi terutama di sektor perdagangan dan industri melalui pernyataan "*siap-tidak siap, mau-tidak mau, globalisasi akan dihadapi*", dan diambilnya tindakan kongret untuk mendukung dan menandatangani kesepakatan dibentuknya APEC, tentu akan mengundang konsekuensi besar khususnya bagi usaha kecil dan menengah di Indonesia. Situasi seperti itu mengundang perdebatan yang panjang akan nasib ekonomi rakyat.

Arus dominan yang umumnya diwarnai oleh perspektif ekonomi neo-klasik, memandang secara optimistik bahwa liberalisasi akan memberikan harapan dan kesempatan bagi ekonomi lokal untuk dapat berkembang dan tumbuh setara dengan ekonomi masyarakat dunia lainnya. Penilaian tersebut didasarkan atas prediksi semakin membesarnya volume perdagangan dunia dan aliran modal (*capital flow*) yang mungkin dapat dimanfaatkan sebagai sumber pertumbuhan.

Kelompok lain yang lebih berhati-hati, umumnya menggunakan perspektif historis struktural, melihat gejala liberalisasi dengan sedikit pesimis. Mereka umumnya melihat pola relasi antar aktor yang timpang dan dampak-dampaknya bagi usaha kecil yang posisinya terus menerus mengalami proses penyingkiran sepanjang kurun waktu tertentu. Walaupun usaha kecil tetap dapat bertahan, hal itu antara lain dilakukan dengan cara mengeksploitasi dirinya sendiri atau terpaksa menceburkan dirinya ke dalam sistem kerja atau sistem produksi yang makin tergantung pada pemodal kuat.

Hal itu bukan berarti bahwa kelompok ini berpandangan liberalisasi tidak memberikan benefit sama sekali yang dapat diraih secara nasional. Benefit liberalisasi secara potensial hanya dapat diraih oleh kelompok-kelompok usaha besar yang terlebih dahulu telah mempunyai sifat kompetitif. Sifat tersebut kurang lebih sama dengan sifat yang dimiliki oleh *Trans National Corporation* (TNC) atau mereka menjadi bagian perpanjangan tangan dari TNC yang beroperasi di Indonesia. Bagi usaha kecil dan menengah, potensi untuk tergusur dan gulung tikar jauh lebih besar dibandingkan peluang untuk mendapatkan manfaat dari arus liberalisasi.

Gejala-gejala awal tergusurnya pengusaha kecil, petani dan pedagang kecil sudah sangat kasat mata. Di bidang industri rakyat, produk-produk seperti tikar, alat dapur dari kayu

dan logam sederhana, makanan jajanan lokal dan aneka produk minuman rakyat telah secara sistematis tergeser oleh produk pabrik secara massal. Begitu juga di bidang perdagangan, banyak pasar-pasar tradisional yang awalnya banyak diisi oleh para pedagang perempuan terpaksa ditutup dan digantikan dengan berbagai bentuk pasar swalayan (supermarket) atau grosir baru (seperti Goro dan Makro).

Jejak Historis Liberalisasi Perdagangan Dunia

Persoalan liberalisasi yang dibungkus dengan label yang lebih netral globalisasi¹, sebenarnya mengandung dua makna pertempuran, *pertama* penaklukan ideologi dominan dunia dan *kedua* adalah praktek penguasaan dan alokasi sumber- sumberdaya dunia. Regim WTO yang mulai bekerja sejak awal Januari 1995 yang lalu, sebenarnya bukan organisasi yang pembentukannya sekali jadi. Mas'ood (1995) menggambarkan proses perjalanan WTO sampai bentuk yang sekarang, banyak diwarnai dan diprakarsai oleh kepentingan Amerika sebagai pemegang hegemoni dunia.

Pada tahun 1934 Amerika telah mempunyai *US Trade Agreements Act*, yang merupakan landasan dibangunnya tata ekonomi internasional, melalui pendirian *Bretton Woods Institution*, pada bulan Juli 1944, yaitu pendirian *International Monetary Fund (IMF)*, Bank Dunia dan *International Trade Organization (ITO)* yang berfungsi mendorong liberalisasi perdagangan dunia. Akan tetapi karena kongres Amerika menolak meratifikasi rancangan ITO, maka usulan tersebut ditolak dan sebagai gantinya dirumuskan suatu bentuk kerjasama perdagangan yang lebih longgar, yang berupa GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) pada tahun 1947. GATT tidak berbentuk institusi, tetapi kontrak kesepakatan diantara anggota-anggotanya. Proses-proses pengambilan keputusan kesepakatan dilakukan dalam konferensi negosiasi yang disebut dengan *rounds* (putaran).

Dalam proses penentuan kesepakatan dagang tersebut (*round*), dominasi negara-negara kaya/maju sangat mewarnai. Bahkan kesepakatan bisa macet apabila pemimpin negara-negara utara yang kaya tersebut tidak menyetujui substansi kesepakatan. Kesepakatan awal GATT, banyak dipengaruhi oleh kepentingan pihak Amerika, yang pada tahun 1962, telah mempunyai *US trade expansion act*. Kesepakatan yang bias kepentingan Amerika dan negara maju ini kemudian mendapat banyak kritik dari negara-negara yang baru merdeka/berkembang, sehingga pada periode 1962-1967 dikembangkan *the Kennedy Round*, dengan tugas GATT yang utama membentuk *the Committee on Trade and Development* untuk menjamin diberikannya perhatian pada kepentingan negara baru merdeka. Pada putaran ini secara normatif dirumuskan suatu himbauan agar negara-negara maju membantu memberikan kesempatan pasar bagi produk negara dunia ketiga.

¹ Pengertian globalisasi sebenarnya merupakan term makro ekonomi, untuk menjelaskan makna liberalisasi yang saat ini dianggap sebagian orang mempunyai konotasi ideologis yang kurang menyenangkan, yang berarti juga suatu bentuk "keselekahan", siapa yang kuat dia berkuasa dan berbagai bentuk interpretasi negatif lainnya. Tidak kurang presiden Soeharto sendiri harus menegaskan bahwa liberalisasi tidak sama dengan liberalisme, "Indonesia akan memasuki fase liberalisasi, tetapi tidak menganut liberalisme". Globalisasi dalam kamus makro ekonomi Gabler Verlag (1990), dinyatakan sebagai: "*describing the formation of global financial markets for stocks and shares (deposits) and the global trade of money, currencies and loans*".

Himbauan tersebut dalam prakteknya tidak membuahkan hasil yang memadai, karena sifatnya tidak struktural tetapi "karitatif", seperti himbauan pemerintah pada konglomerat Indonesia yang berkumpul di Jimbaran Bali beberapa waktu lalu, untuk membantu usaha kecil.

Untuk meningkatkan citranya sebagai pemegang hegemoni ekonomi dunia, pada tahun 1974, Amerika kembali mengembangkan *US trade reform act*, yang mencoba memberikan terobosan baru terhadap sistem perdagangan dunia. Terobosan tersebut berupa pikiran untuk mereduksi hambatan perdagangan multi-lateral yang memberlakukan mekanisme hambatan non tarif, seperti pemberian kuota impor, spesifikasi teknis maupun berbagai standar lain yang kemudian turut diperhitungkan, misalnya HAM atau aspek lingkungan. Terobosan tersebut mengimbas dalam perdebatan di *the Tokyo Round* (1974-1979). Agenda utama pembicaraan di putaran Tokyo ini adalah mengidentifikasi berbagai bentuk hambatan non tarif dalam perdagangan internasional. Pada periode ini, hegemoni ekonomi Amerika sedang mengalami kemerosotan, sehingga secara substantif campur tangan negara terhadap mekanisme pasar justru membesar. Upaya mendorong liberalisasi perdagangan menjadi setengah hati.

Setelah ekonomi Amerika kembali menguat dan didukung dengan surutnya dominasi negara-negara komunis, negara tersebut memanfaatkan kembali mekanisme GATT untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Pada tahun 1984 Amerika mengeluarkan *US Trade and Tariff Act* dan tahun 1988 mengeluarkan *Omnibus Trade and Competitiveness Act*. Periode tersebut (1986-1994) merupakan periode *the Uruguay Round*. Putaran Uruguay ini merupakan putaran yang paling ekstensif dan istimewa, karena cakupan pembahasannya sangat luas dan intensif serta mempunyai daya paksa bagi para anggotanya. Pada putaran ini dibicarakan isu lama (mekanisme perdagangan pertanian, tekstil, masalah *dumping*, penghapusan subsidi negara dan menghampusan hambatan perdagangan) dan isu baru yang berupa instrumen dan organisasi (*Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPs; Trade-Related Investments, TRIMs; Trade in services* dan WTO). Pengaturan kelembagaan dilakukan melalui WTO dengan wewenang yang dapat menjatuhkan sanksi perdagangan pada negara anggotanya. Sementara TRIPs dan TRIMs digunakan sebagai instrumen kontrol utamanya².

² Kedua instrumen ini oleh sebagian kritikus dianggap sebagai senjata baru untuk penjajahan ekonomi dunia. Dalam situasi dimana ketimpangan struktural dan penguasaan sumberdaya dunia telah terjadi, penerapan TRIPs dan TRIMs sama dengan memberikan legitimasi monopoli baru bagi negara-negara maju. Pada tahun 1992, 20% negara terkaya di dunia menguasai: 82.7% GNP internasional, 81.2% perdagangan dunia, 94.6% pinjaman komersial internasional, 80.5% tabungan, 80.5% investasi dan 95% copyright dunia. Dalam hal TRIPs misalnya, pembayaran copyright diberlakukan selama 50 tahun dan perlindungan hak paten selama 20 tahun. Implementasi dari situasi ini pengusaha asing -- termasuk perusahaan multinasional, TNC -- harus diperlakukan sama dengan pengusaha lokal/nasional, dalam hal perolehan hak investasi maupun penguasaan hak paten. Pelanggaran terhadap TRIPs akan dikenakan sanksi silang oleh WTO. Kondisi tersebut akan membuat usaha kecil dan menengah yang pasarnya sangat terbatas dan mereka justru hidup dari kemampuannya untuk meniru barang-barang yang telah mempunyai paten atau mempunyai copyright, maka mereka akan tersapu bersih dari gelanggang perdagangan dunia, termasuk gelanggang perdagangan lokal yang selama ini menjadi segmen pasar utama mereka.

Melalui kelembagaan WTO kemudian diformat kembali aturan dan standar perdagangan internasional yang memasukkan berbagai prinsip yang mudah dipenuhi oleh negara maju atau pengusaha besar tetapi sangat sulit dijalankan oleh negara berkembang apalagi oleh usaha kecil. Termasuk didalamnya standar mengenai pengelolaan lingkungan, penghormatan terhadap hak-hak buruh seperti hak untuk berserikat dan berpendapat, hak untuk mendapatkan pengupahan yang adil dan layak serta berbagai bentuk standarisasi yang berkaitan dengan sistem pengecekan bea cukai.

Isu Lingkungan dan Posisi Usaha Kecil/Menengah

Dalam konteks liberalisasi yang berupa perdagangan bebas, ada dua isu lingkungan yang akan berpengaruh pada usaha kecil dan menengah di Indonesia. Kedua isu tersebut adalah: (1) penggunaan sistem ekolabel dalam produk-produk yang akan diperdagangkan di pasar dunia dan (2) isu meningkatnya krisis lingkungan³. Kedua isu ini lahir melalui dua cara pandang yang berbeda terhadap proses liberalisasi perdagangan bebas.

Isu pertama yang berkaitan dengan penerapan *eco-labelling*, bermula dari paradigma pembangunan berkelanjutan yang mengasumsikan bahwa penggunaan sumberdaya alam untuk pertumbuhan ekonomi harus dikendalikan, terutama dampak terhadap lingkungan, agar generasi berikut tetap dapat hidup dengan layak dan adil. Secara politis pada tingkat dunia, paradigma ini mendapat pengukuhan melalui KTT Bumi di Rio de Janeiro. Sementara isu kedua berangkat dari paradigma strukturalis, yang mengkhawatirkan pertumbuhan volume perdagangan dalam era global, akan mendorong terciptanya berbagai manipulasi terhadap lingkungan. Manipulasi tersebut diwujudkan dalam bentuk pemacu pertumbuhan, monokulturisasi tanaman, pemusnahan spesies yang dianggap secara ekonomis tidak mempunyai nilai tukar, eksploitasi sumber-sumber daya alam yang tidak terkendali sampai pada bentuk perlakuan diskriminasi lingkungan. Bentuk diskriminasi lingkungan yang paling jelas adalah menjadikan negara-negara selatan, termasuk Indonesia, sebagai daerah pembuangan sampah/limbah berbahaya dan beracun bagi negara-negara utara. Bahwa masyarakat di negara selatan dianggap tidak cukup layak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan baik.

Implikasi dari kedua cara pandang seperti ini adalah, dalam paradigma pertama *eco-label* akan digunakan sebagai salah satu instrumen ekonomi utama, sebagai kompensasi atas biaya eksternal, khususnya dampak-dampak industri terhadap lingkungan. Biaya eksternal ini akan dibebankan pada pihak produsen untuk mendapatkan label yang "ramah" terhadap lingkungan. Pemberian label tersebut akan sangat berpengaruh pada citra produk di mata konsumen. Pihak konsumen tidak akan mendapatkan sanksi negatif apabila tidak menggunakan instrumen *eco-label* dari pihak pemerintah. Dalam hal ini, kekuatan konsumen akan bekerja, mau membeli produk tanpa *eco-label* atau tidak.

³ Lihat Hira Jhamtani, *Akankah Globalisasi Mengatasi Krisis Lingkungan ?*, dalam Bina Darma No.48 tahun ke-13, 1995.

Sementara implikasi untuk paradigma kedua, sangat sulit mengembangkan instrumen yang dapat mengimbangi terjadinya krisis lingkungan. Hanya bentuk-bentuk krisis yang bersifat akut saja yang masih memungkinkan diberlakukannya sistem regulasi yang ketat. Misalnya pelarangan untuk mengimpor sampah berbahaya dan beracun dari luar negeri. Sedangkan instrumen yang dapat dikembangkan untuk mengimbangi arus monokulturisasi, tidak lain adalah program-program penganeekaragaman dan konservasi yang sulit dilakukan secara massal.

Dalam skema organisasi perdagangan dunia (WTO), *eco-labelling* akan digunakan sebagai salah satu standar internasional yang secara umum akan ditangani oleh ISO (*International Standardization Organization*) seri 14000. ISO satu-satunya standar yang saat ini diakui oleh WTO. Bagi produsen yang telah mendapatkan sertifikasi atau lisensi ISO maka mereka telah mendapat "tiket" untuk ikut bertarung dalam arena perdagangan global. Pada tingkat praktis, harmonisasi sistem standarisasi yang menyangkut aspek lingkungan hidup, termasuk *eco-label* masih menjadi agenda pembicaraan dalam komisi teknis ISO. Pada agenda itu dibahas mengenai aspek pengelolaan lingkungan, sistem audit lingkungan, ekolabel, evaluasi kinerja lingkungan, analisis daur hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan definisi dan peristilahan.

Sebenarnya penerapan sistem *eco-label* telah dijalankan dalam beberapa versi oleh beberapa negara. Setidaknya ada 8 negara dan kelompok negara yang tergabung dalam Uni Eropa, telah menerapkan *eco-label* dalam beberapa kategori mata perdagangan mereka. Jerman pada tahun 1977 telah memprakarsai gerakan ini untuk 3500 produk mata perdagangan mereka. Begitu pula dengan Jepang, Kanada dan negara NICs di Asia. Berikut ini dapat dilihat tabel negara-negara yang telah menerapkan *eco-labelling* dalam sistem perdagangan di negara mereka.

Di Indonesia, sedang disiapkan langkah-langkah ke arah penerapan *eco-label*. Lembaga Ekolabel Indonesia sedang mengujicobakan perangkat dan instrumen tersebut, khususnya untuk produk-produk kayu dan hasil hutan lainnya. Dewan Standarisasi Nasional dan Bapedal saat ini sedang merumuskan penerapan dan harmonisasi ISO 14000 di Indonesia. Dimasa mendatang, beberapa pasar potensial bagi produk non migas Indonesia, seperti pulp, kayu, tekstil, pakaian, alas kaki, elektronik dan alat-alat rumah tangga, meminta syarat untuk memberlakukan standar ini apabila mereka ingin masuk dalam pasar mereka.

Implikasi Isu Lingkungan Bagi Usaha Kecil dan Menengah

Implikasi isu lingkungan bagi usaha kecil dan menengah kita, setidaknya terdapat di dua sisi. *Pertama*, untuk kategori usaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur (sekitar 27.8% atau berjumlah sekitar 9.3 juta unit usaha dari 33.4 juta unit usaha kecil dan menengah di Indonesia yang berhasil dicatat oleh BPS),

Tabel1. Daftar Negara Yang Telah Menerapkan Program Ecolabelling

Nama Negara	Jumlah Kategori	Jumlah Jenis Produk
Canada	34	700
Uni Eropa	2	1
Jerman	77	3503
Perancis	2	--
Jepang	55	2500
Belanda	12	26
Skandinavia	18	200
Korea Selatan	12	--
Singapore	7	--

Sumber: Zaim Saidi, 1995

secara potensial terancam oleh penerapan sistem *eco-label* terutama yang berkaitan dengan pemasaran produk mereka. Banyak usaha kecil dalam proses produksinya tidak memperhatikan faktor lingkungan, karena ketidaktahuan dan atau ketidakberdayaan mereka.

Misalnya saja, industri kecil penyamakan kulit di Sukaregang Garut, dalam proses produksi penyamakan kulit menggunakan banyak zat-zat kimia. Pembuangan limbah dan penanganan proses produksinya sangat tidak ramah terhadap lingkungan, sehingga mencemari lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Problem yang mereka hadapi adalah, karena skala usahanya yang kecil, maka mereka tidak mampu membeli instalasi pengolahan limbah seperti yang dimiliki oleh perusahaan besar. Selain itu, banyak diantara mereka yang tidak mempunyai informasi mengenai bahaya-bahaya yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia yang mereka gunakan dalam proses penyamakan kulit. Alternatif teknologi penyamakan yang ramah lingkungan tidak dapat mereka raih, karena faktor harga bagi pemasaran produk mereka. Margin pengolahan yang mereka peroleh sudah sangat tipis yang tidak memungkinkan lagi untuk diinvestasikan pada teknologi baru apalagi untuk penelitian.

Hal yang serupa dialami juga oleh industri kecil pengolahan makanan. Penggunaan zat kimia dan pewarna sangat dominan. Dalam pembuatan saos tomat botolan -- yang banyak digunakan oleh tukang bakso atau mie pangsit di sektor informal -- bahan

bakunya bukan berasal tomat segar, tetapi dari ubi dan labu yang dicampur dengan pewarna untuk tekstil, agar mendapat performa seperti saos tomat asli. Sedangkan untuk mendapatkan citra rasa tomat, umumnya mereka campur dengan penyedap rasa seperti essence.

Demikian pula dengan usaha pembuatan ikan asin di sepanjang pesisir pantai utara Jawa, pengawetan ikan dilakukan dengan menyemprotkan DDT yang biasa digunakan untuk pembasmi serangga. Sementara proses penangkapan ikannya dilakukan dengan menggunakan potasium atau bahan peledak. Penggunaan zat-zat kimia sebagai salah satu bahan utama produksi, sebenarnya tidak lepas dari pasar input dan output mereka. Penguasaan pasar input dan output oleh aktor yang sama secara monopoli dan monopsoni, membuat aktor-aktor usaha kecil yang sangat tergantung pada mereka tidak mempunyai pilihan. Toko penampung ikan asin biasanya juga merangkap sebagai toko penyalur berbagai macam merek DDT -- seperti *baygon*, *xeltox* bahkan DDT yang secara resmi telah dilarang -- dan juga menjual potasium untuk penangkapan ikan. Pembelian input produksi oleh nelayan atau pengusaha kecil pengolahan ikan asin, dapat dilakukan dengan cara kredit atau dibayar dengan hasil tangkapan ikan mereka.

Ketergantungan terhadap suplay input produksi dan pemasaran serta sebagian dari mereka mempunyai ketergantungan terhadap modal tunai (*cash flow*), membuat aktor usaha kecil dan menengah tidak mempunyai alternatif terhadap bentuk dan proses organisasi produksi yang harus mereka jalankan.

Problem besar akan muncul pada saat produksi sebagian dari usaha kecil dan menengah akan di ekspor. Pada saat mekanisme pasar global diberlakukan, problem pemasaran bagi usaha kecil dan menengah yang demikian akan menghadapi "boikot" terutama yang datang dari kelompok konsumen hijau. Beberapa tanda awal terhadap produk penyamakan kulit Sukaregang yang diekspor mulai mendapat "gangguan" yang serius di pasar dunia, karena cara memproduksikannya dianggap tidak ramah lingkungan. Sikap yang sama juga datang dari industri besar dalam negeri yang selama ini telah menggunakan produk kulit hasil samakan Sukaregang untuk bahan baku industri mereka, seperti industri yang menghasilkan komoditas sepatu, tas, ikat pinggang, dompet, yang memegang lisensi merk internasional. Situasi serupa itu mulai dihadapi juga oleh industri kecil dan menengah yang memproduksi mainan anak-anak, kerajinan kayu dan bambu yang di pasarkan untuk masyarakat Eropa atau Amerika. Penggunaan zat-zat pengawet kayu dan cat yang diidentifikasi sebagai bahan berbahaya masih dominan dikalangan pengusaha kecil.

Sisi *kedua* adalah potensi problem yang dihadapi oleh kelompok usaha kecil dan menengah yang berada di sektor pertanian dan agroindustri. Problem utama kelompok ini adalah terjadinya krisis lingkungan akibat dari penerapan revolusi hijau. Telah banyak studi yang menjelaskan berbagai dampak dari penerapan sistem ini. Penerapan monokulturisasi pertanian menyebabkan antara lain tergusurnya pengetahuan lokal dan tradisional untuk beberapa kasus di sektor kehutanan menyebabkan tergusurnya komunitas dan kebudayaan masyarakat asli, terjadi degradasi kesuburan tanah, penyingkiran akses perempuan terhadap pendapatan serta terjadi ketergantungan terhadap input pertanian

yang diproduksi oleh industri besar. Ketergantungan terhadap pupuk, pestisida maupun bibit-bibit produk budidaya industri pertanian, mengakibatkan petani dan produsen agroindustri tidak dapat lagi memproduksi dengan cara-cara tradisional. Sementara harga produk pertanian, terutama beras dan pangan, tidak dapat meningkat terus menerus. Kebijakan harga dasar gabah merupakan salah satu penyebab petani kecil berlahan sempit tidak mampu mengakumulasi surplus. Kondisi serupa dialami oleh pengusaha kecil di sub sektor peternakan, perikanan maupun perkebunan rakyat. Para petani dan pengusaha kecil/ menengah di sektor ini mengalami tekanan di sisi hulu melalui mekanisme harga dan ketimpangan distribusi input (kasus terakhir adalah hilangnya pupuk tabur, karena secara nasional petani sedang digiring untuk menggunakan pupuk tablet) secara monopoli, serta tekanan di sisi hulu melalui mekanisme harga dan pengaturan tata niaga (misalnya cengkeh dan jeruk di Kalbar) secara monopsoni. Belum lagi tekanan institusional dan kebijakan yang dilakukan oleh aparat implementator di lapangan yang mengharuskan petani menanam satu komoditas tertentu (kasus tebu, misalnya) di musim tertentu.

Jumlah kelompok ini masih sangat besar di Indonesia, yaitu sekitar 21.2 juta unit usaha atau sekitar 63.5% dari total usaha kecil dan menengah di Indonesia. Jumlah ini belum termasuk tenaga kerja yang diserapnya. Sehingga memperhatikan pada tingkat kebijakan dan tingkat praktis yang lebih besar. Usaha untuk memperbaiki nasib anak bangsa dan peningkatan pemerataan akan sangat berarti apabila sektor ini benar-benar diperhitungkan.

Ada bahaya lain yang tidak kasat mata, tapi sangat potensial menjadi problem yang akan dihadapi oleh para pengusaha kecil obat-obatan tradisional, jamu ataupun kosmetika lokal. Produksi mereka selama ini mengandalkan pada kekayaan hayati yang dimiliki oleh sumberdaya yang ada di negeri ini. Sumber utamanya adalah hutan tropis, lautan tropis maupun keanekaragaman tumbuhan yang masih tetap dipelihara dalam sistem tanaman pekarangan tradisional yang masih tersebar di berbagai daerah. Dengan adanya isu TRIPs dan copyright, maka penemuan ahli-ahli biokimia dari negara maju yang melakukan riset di negeri ini, akan memungkinkan mempatenkan temuan mereka. Apabila hak paten ini telah didaftarkan dan diakui secara internasional, maka pengusaha kecil yang tadinya dapat menggunakan bahan baku dari alamnya sendiri secara langsung sebagai berkah alam, saat itu harus membayar lisensi pada pemegang hak cipta. Secara langsung atau tidak langsung, kondisi seperti itu menyebabkan pembengkakan biaya produksi yang pada akhirnya dapat membunuh usaha kecil dan menengah.

Perdagangan bebas, aspek lingkungan dan pengembangan usaha kecil, secara inheren mengandung unsur-unsur yang bersifat paradoks. Perdagangan bebas akan memompa suatu pola produksi dan konsumsi yang ujungnya akan mengeksploitasi lingkungan. Pola ini juga akan mendorong terjadinya perdagangan limbah yang bebas pula, terutama akan mengalir dari negara kaya ke negara-negara selatan. Menurut ahli lingkungan Bank Dunia Harman Daly dan Robert Goodland yang dikutip oleh Jhamtani (1995), dinyatakan bahwa harmonisasi standar lingkungan dan kesehatan dalam perdagangan dunia, cenderung menurunkan standar lingkungan sampai ke titik yang terendah, karena kriteria lingkungan justru berlawanan dengan kriteria lingkungan.

Perdagangan bebas akan melindas usaha-usaha kecil yang tidak efisien, karena sebenarnya mereka hidup dari suatu kondisi yang "memeras diri sendiri". Aktor ini sekalipun tidak efisien tetapi selalu diharapkan menjadi katup pengaman keberadaan sektor formal. Usaha kecil dengan atau tanpa sengaja hanya dapat hidup dari upaya peniruan produk tertentu yang sedang laku di pasaran bebas untuk direplikasi bagi segmen pasar yang lebih rendah. Hal tersebut mereka lakukan karena tidak mampu membiayai serangkaian riset pengembangan yang dapat mendorong terjadinya inovasi.

Aspek lingkungan dalam perdagangan bebas dapat menjadi ancaman serius bagi eksistensi usaha kecil dan menengah, karena dua hal. *Pertama*, secara faktual telah terjadi ketimpangan kekuatan perdagangan yang dapat men- definisikan atau merekayasa standar- standar tertentu untuk dijadikan norma dalam sistem perdagangan tersebut. Negara kaya yang kuat akan riset pengembangan dan informasi akan dapat mendefinisikan indikator-indikator dari norma- norma tertentu yang sekilas terkesan adil. Misalnya mereka tidak mau membeli barang- barang produk usaha kecil yang dianggap dalam prosesnya tidak ramah lingkungan, yang umumnya dihasilkan dari negara- negara selatan. Tetapi hal yang sebaliknya tidak dapat dilakukan. Konsumen di negara selatan sering tidak dapat menolak dan tidak mengetahui bagaimana proses produksi di negara utara, apakah mencemari dan ramah terhadap lingkungan. *Kedua*, penerapan norma dan strandar lingkungan, akan meng- alami distorsi interpretasi, karena terjadi perbedaan kekuatan. Konsumen negara kaya yang ingin mendapatkan produk ramah lingkungan, tetapi mempunyai perilaku konsumsi yang justru banyak meng- eksploitasi lingkungan. Misalnya penggunaan kertas tissue yang luar bisa, justru mempercepat proses deforestasi di negara- negara selatan. Padahal krisis lingkungan justru berasal dari cara konsumsi yang berlebih- an di negara- negara utara.

Resensi

Jhamtani, Hira.,

1995. *Akankah Globalisasi Mengatasi Krisis Lingkungan ?* dalam Bina Darma, NO 48, tahun ke 13.

Mas'oed, Mohtar.,

1994. *Indonesia, APEC dan GATT* dalam SINTESIS No.08/tahun II, Januari- Pebruari, Jurnal Bulanan CIDES.

1995. *GATT/WTO dan Dunia Ketiga: Beberapa Catatan Untuk Diskusi.*,Makalah seminar.

Saefullah, Asep Djaja.,

1995. *Mobilitas Penduduk Desa-Kota: Jembatan Modernisasi Pedesaan*. Pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam ilmu kependudukan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran Bandung.

Saidi, Zaim.,

1995. *Konserpensi Ecolabelling Bagi Usaha Kecil /Menengah di Indonesia*. Makalah Seminar Peluang Pengembangan Perusahaan Kecil dan Menengah.

Sjaifudian, Hetifah; Haryadi, Dedi dan Maspiyati.,

1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil.*, AKATIGA Foundation, Bandung.

Thamrin, Juni.,

1995. *Intervensi Pengembangan Usaha Kecil di Indonesia: Dilema Antara Globalisasi dengan Birokratisasi.*, Dalam Bina Darma, No 48 tahun 13.

Wie, Thee Kian.,

1994. *Industrialisasi di Indonesia : Beberapa Kajian.*, LP3ES Jakarta.

RUANG METODOLOGI

METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL: SUATU PENGANTAR

Sediono M.P. Tjondronegoro¹

Dalam arti asalnya metodologi sebenarnya mengacu pada studi sistematis mengenai prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penelitian ilmiah dan filsafat. Lebih awal dalam tradisi penelitian, metodologi yang juga dianggap sebagai suatu "disiplin", merupakan cabang dari ilmu filsafat, lebih khusus lagi cabang logika. Akan tetapi, kemudian terasa bahwa metodologi filsafat belum mampu menjawab pertanyaan yang lebih erat kaitannya dengan gejala-gejala keseharian yang nyata. Oleh karena itulah mulai tumbuh metodologi ilmu-ilmu sosial yang lebih praktis dan pragmatis (Lazarsfeld & Rosenberg [eds] 1955) sehingga sekarang metodologi sudah dipahami sebagai suatu "disiplin". Namun, diartikan lebih longgar sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan prosedur dan teknik penelitian. Akibatnya juga prosedur dan teknik penelitian di masing-masing bidang ilmiah dapat menunjukkan perbedaan. Di bidang ilmu eksakta dan ilmu sosial berbeda, walaupun tentu ada kesamaan dalam beberapa prosedur/teknik.

Melihat unsur berbagai ilmu saja sudah segera tampak bahwa prinsip-prinsip dasar tersebut lebih erat kaitannya dengan ilmu eksakta seperti matematik, fisika, kimia dan setelah itu juga biologi, karena ilmu-ilmu tersebut lebih tua.

Definisi-definisi metodologi yang muncul dalam periode pasca-ahli filsafat Jerman Kant (1755), sangat mempengaruhi pendekatan ahli-ahli sosiologi seperti M. Weber (1864-1920) dan Talcott Parsons (1854-1931). Metodologi masih dilihat sebagai suatu disiplin mandiri/terpisah, mempelajari berbagai metode guna menguasai, dan menambah pengetahuan di bidang ilmiah. Dalam arti ini, metodologi sebenarnya masih merupakan disiplin yang normatif, karena metodologi menguji secara sistematis dan logis kemampuan (*aptness*) dari perangkat penelitian (*research tools*), yaitu berkisar antara asumsi dasar (postulat) sampai teknik penelitian yang sangat khusus untuk mencapai tujuan-tujuan ilmiah tertentu.

Namun demikian, tidak ada nilai-nilai yang dipaksakan kepada ilmu yang empiris. Sebaliknya, metodologi mencari norma-norma yang tercakup atau inheren di dalam ilmu itu sendiri (E. Kaufmann, 1944).

Demikian juga metodologi sebagai ilmu mandiri, berbeda dari pendekatan lain, tidak berurusan dengan proses-proses dalam penelitian ilmiah itu sendiri, seperti yang dapat

¹ Ketua Kelompok V Dewan Riset Nasional.

dilakukan oleh psikologi pengenalan (*psychology of cognition*) atau sosiologi ilmu pengetahuan (*sociology of knowledge*). Tokoh ilmu sosiologi seperti T. Parsons masih cenderung mengacu kepada pendekatan "kutub filsafat". Beliau mengatakan bahwa metodologi tidak mengacu kepada metodologi penelitian empiris seperti statistik, studi kasus, wawancara, survei dsb.

Methodology is the consideration of the general grounds for the validity of scientific procedures and systems of them (Parsons, 1937).

Dalam arti itu sebenarnya metodologi bukan "ilmiah" dalam artian sempit, tetapi juga tidak lagi sepenuhnya filsafat.

Lambat laun (Weber, Schelting, Maerton) tekanan dalam pengertian metodologi semakin diletakkan pada analisis prosedur penelitian yang nyata/konkrit. Dari kedua tradisi metodologi di Indonesia, tampaknya lebih banyak acuan dilakukan kepada orientasi praktis dan pragmatis. Barangkali karena masuknya ilmu-ilmu sosial juga baru sekitar 50 tahun yang lalu. Selain itu, kaitannya dengan filsafat diraskan agak asing, karena penguasaan filsafat Kant, Descartes, apalagi Plato, Aristoteles, dsb, juga lemah. Sedangkan filsafat Ibn Sina, Averroes, Ibn Khaldun dsb. masih belum cukup tersebar luas, apalagi dihayati oleh ilmuwan (sosial dan eksakta).

Barangkali kebangkitan ini baru mulai dan paling tidak berada dalam tahap yang dini. Namun, bagi peminat metodologi tetap terbuka dua jalur sebagai dikemukakan diatas; kiblat kepada filsafat atau lebih ke prosedur dan teknik. Kedua jalur tersebut memang tak sepenuhnya terpisah, tetapi dapat diberi tekanan yang lebih berat sesuai pilihan ilmuwan.

Ilmu sosial sebagai istilah juga perlu kita bedakan sedikit dari humaniora yang merupakan gugus ilmiah yang lebih tua dan mendahului ilmu-ilmu sosial. Dalam istilah tersebut tercakup ilmu-ilmu seperti arkeologi, sastra dan bahasa, musikologi, hukum, antropologi fisik, dsb. Sedangkan yang digolongkan ilmu-ilmu sosial ialah: ekonomi, antropologi sosial, psikologi, sosiologi, ilmu politik dan belakangan juga komunikasi. Bidang-bidang seperti ekologi masih diperdebatkan apakah masuk humaniora atau ilmu sosial, karena pada kenyataannya ada kaitan erat dengan beberapa bidang ilmiah dari gugus eksakta dan biologi.

Kemampuan terbatas ilmuwan mencernakan semua bidang ilmiah, mengakibatkan adanya spesialisasi dan pembagian pekerjaan ilmu-ilmu sosial. Hal ini mengakibatkan ilmu-ilmu sosial lebih memperhatikan masalah-masalah yang lebih pragmatis dan empiris daripada filsafat. Misalnya, ilmu-ilmu sosial akhirnya lebih memperhatikan prosedur dan teknik penelitian agar dapat menganalisis dan menerangkan gejala-gejala nyata yang ada di dalam masyarakat. Akan tetapi perlu juga dipahami bahwa dengan menjauhi filsafat sebenarnya akan menyulitkan pembangunan teori dan bahaya bila kita meneliti dengan cara yang terlalu "mekanistik" juga bertambah besar. Statistik dan survey sebagai bentuk teknik untuk meneliti secara pragmatis sering menjadikan hasil penelitian kita "kering" dan membosankan, karena setelah data-data dan informasi terkumpul, timbul pertanyaan 'so what' lalu apa?

Tujuan penelitian sebenarnya adalah mencari terobosan dan teori-teori baru, sehingga bila tak ada dasar filsafat dan sikap spekulatif, maka peluang menemukan sesuatu yang baru bertambah kecil.

Mau tidak mau, dalam ilmu sosial, sudut pandang kebudayaan, termasuk agama dan adat-istiadat tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Oleh karena itu "prosedur, pendekatan, dan teknik" penelitian yang diterapkan pada subjek penelitian yang tak dapat diasingkan dari masyarakat sekitarnya, juga harus disesuaikan.

Inti perbedaan ilmu sosial dengan ilmu eksakta adalah, pada ilmu sosial, subjek penelitian hampir tak pernah dipelajari dalam suatu keadaan vakum. Dalam ilmu sosial keadaan "laboratorium" lebih merupakan pendekatan khusus.

Kebutuhan Indonesia

Indonesia dalam era pembangunan dan transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, memang menghadapi berbagai masalah sosial, sehingga ada kecenderungan kuat untuk mengartikan metodologi ilmu sosial sekedar sebagai prosedur dan teknik penelitian, termasuk teknik pengumpulan, penyusunan, dan analisis data. Perasaan dikalangan ilmuwan sosial bahwa hasil penelitian perlu membantu pemecahan permasalahan dalam masyarakat cukup kuat, tetapi perlu diketahui bahwa itu bukan satu-satunya cara penerapan metodologi penelitian sosial. Ibarat perbedaan antara ilmu dasar dan terapan, keduanya dibutuhkan dan yang satu tak dapat berkembang tanpa yang lain.

Salah satu buku yang memang meliputi jalan pemikiran pertama adalah Seltiz and Jahoda (1966). Buku ini berusaha memenuhi kebutuhan dua kelompok, yaitu kelompok yang mempersiapkan dan melakukan penelitian, serta kelompok yang akan memanfaatkan hasil penelitian. Penulisan makalah ini juga sering mengacu ke buku tersebut, yang sampai sekarang juga masih banyak dipakai dalam mata kuliah metodologi di banyak universitas di Amerika Serikat, pengarangnya tak akan setiap kali disebut. Akan tetapi ada baiknya bila pembaca mengetahuinya dan akan lebih baik lagi bila dapat turut membacanya.

Langkah-langkah Utama

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa langkah yang perlu diikuti: Pertama, sering seorang yang mengajukan usulan penelitian tahu apa tujuan penelitiannya, bahkan kegunaannya, tetapi tidak menampilkan rumusan pertanyaan penelitiannya (*research question*), sehingga pembaca usulan tidak dapat mengetahui apa yang dilihat peneliti sebagai masalah dan apa yang sebenarnya ingin diketahuinya dengan penelitian yang diusulkan. Bila hal ini terjadi, berarti peneliti belum dapat memahami sendiri secara tajam apa sasaran penelitiannya, sehingga peluangnya untuk menentukan metode penelitian tidak bisa cepat. Padahal diasumsikan bahwa peneliti tentunya sudah

menguasai berbagai metode penelitian, sehingga dapat menentukan pilihan yang tepat dan sesuai dengan sasaran penelitiannya. Jadi, *problem formulation* perlu dituangkan dalam bentuk pertanyaan, kemudian dijawab dengan hipotesis utama. Selanjutnya dapat dipecahkan menjadi beberapa hipotesis dan lebih lanjut lagi dalam hipotesis kerja.

Langkah kedua adalah memberikan deskripsi mengenai rencana studi (*study design*) yang dirumuskan agar sasaran tercapai. Bagian ini biasanya mencakup studi literatur guna menggali teori dan penemuan penelitian-penelitian terdahulu yang menekuni topik yang sama atau sejenis. Apabila pemikiran dalam kerangka penelitian merupakan pemikiran peneliti setelah mempelajari literatur dan berbagai hipotesis penelitian lain, perlu ada perumusan hipotesis tersendiri.

Langkah ketiga adalah menentukan metode pengumpulan data secara spesifik sekaligus penentuan sampel (*sampling design*).

Langkah keempat adalah menggambarkan bagaimana hasil penelitian nanti akan disajikan. Secara lebih jelas dan tegas pada tahap ini unit analisis sudah harus nyata. Pada prakteknya bagian ini tidak selalu tepat sebagaimana direncanakan, karena di lapangan tidak selalu semua variabel dapat ditemukan sebagaimana dirumuskan pada awal penelitian. Inilah satu kesulitan di bidang ilmu sosial yang perubahannya memang variabel, karena itu tidak jarang mempengaruhi uji hipotesis.

Langkah kelima adalah memeras bagian analisis terdahulu menjadi satu atau lebih kesimpulan dan penafsiran keadaan berdasarkan hasil penelitian. Tampaknya bagian ini mudah, tetapi menyajikan kesimpulan yang berarti dan dapat dijadikan landasan untuk perumusan kebijakan atau tindakan dalam prakteknya sangat sulit.

Memilih Topik

Seperti telah dikemukakan di atas, secara potensial jumlah topik yang dapat diteliti tidak terhingga, tetapi negara kita yang masih berada dalam era pembangunan dan masyarakat yang dalam proses informasi lebih menghargai pilihan topik yang memberi (arah) pemecahan berbagai masalah konkrit dalam masyarakat. Topik khusus perlu dikaitkan dengan konteks permasalahan yang lebih besar, karena hasil penelitian diharapkan, oleh pemimpin-pemimpin masyarakat, dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijaksanaan yang lebih umum. Hasil yang hanya memenuhi kebutuhan ilmuwan atau cendekiawan akan dinilai kurang berguna; suatu keadaan yang harus kita akui juga.

Masalah yang dipilih harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat diteliti dengan memanfaatkan prosedur dan teknik penelitian yang dianggap baku. Jangan langsung melangkah ke pengumpulan data dan melakukan pengamatan. Langkah pertama dalam merumuskan topik penelitian, justru merumuskan masalah/topik sehingga khas dan kongkrit (*explicit and concrete*). Pertimbangan memilih topik bisa saja tidak ilmiah (misalnya kebijaksanaan), tetapi untuk diteliti harus dirumuskan menurut kaidah ilmiah.

Rumusan Hipotesis

Setelah topik penelitian dipilih dan pertanyaan penelitian dirumuskan, kita sampai pada perumusan hipotesis. Tahapan ini merupakan hal yang utama dan relatif umum didahulukan, tetapi masih ada peluang untuk menjadi hipotesis yang cakupannya lebih sempit.

Pada hakekatnya hipotesis adalah praduga yang dirumuskan sebagai konfirmasi. Apabila diuji mungkin saja benar atau salah (Ho/Hi). Fungsi hipotesis adalah memberi/menentukan arah kepada usaha penelusuran penelitian. Hipotesis seakan-akan memberi sugesti untuk penyelesaian/pemecahan masalah, tetapi nilainya bisa benar bisa juga salah, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Setiap penelitian berfungsi memberi arah juga mengarahkan data/informasi: apa yang perlu dikumpulkan dan bagaimana data/informasi tersebut dapat disusun secara teratur untuk dapat dianalisis sesuai arah.

Hipotesis dapat digali dari teori, tetapi juga dapat digali dari "isapan jempol" (*hunch*) tanpa kaitan pada teori apapun juga. Apabila hal ini memang terjadi, tak ada jalan lain bagi peneliti, kecuali membuktikannya dengan data empiris.

Suatu hipotesis tentu mengandung variabel, minimal dua. Dengan adanya variabel sebenarnya peneliti juga harus mendefinisikan berbagai konsep dan variabel yang akan digunakannya. Lebih-lebih bila lebih dari satu hipotesis digabung menjadi suatu model atau paradigma, keharusan mendefinisikan konsep/variabel semakin mendesak. Definisi-definisi seperti yang dimaksud, walaupun agak umum (*generalised*), tidak boleh terlalu jauh/lepas dari dunia yang nyata untuk menjaga agar hasil penelitian tidak mengawang atau menyimpang dari sasaran awalnya. Oleh karena itu, ada istilah *working definitions* yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan yang nyata.

Logika Dan Uji Hipotesis

Semua bidang ilmiah akhirnya bertujuan mengungkapkan hubungan sebab akibat atau kausal, tetapi dalam ilmu sosial banyak yang belum terungkap. Sampai saat ini ilmu sosial baru dapat mengungkapkan hubungan fungsional. Sementara untuk mengungkapkan hubungan kausalitas dibantu oleh statistik yang dapat menunjukkan besar-kecilnya peluang dari dua atau lebih gejala yang mempunyai antarkaitan. Pada umumnya memang kaitan-kaitan antargejala dalam ilmu sosial adalah multikausal. Jarang ada gejala tunggal mengakibatkan gejala lain. Oleh karena itu, persyaratannya pun dipilah-pilah:

- (1) persyaratan yang mutlak harus dipenuhi agar gejala dapat terjadi (*necessary condition*),
- (2) persyaratan yang perlu ada (*sufficient condition*), dan

(3) persyaratan yang baik perlu maupun mutlak harus dipenuhi

Penelitian ilmu sosial *non- experimental* memang membawa beberapa tantangan dan kesulitan. Banyak variabel tidak dapat dikendalikan, karena memiliki potensi untuk berubah secara mandiri. Ilmuwan sosial lebih sering menggarap data hasil pengamatan (*observational data*), sehingga pengaruh lingkungan (sosial) tak dapat diasingkan. Namun demikian toh diusahakan mencari sebanyak mungkin hubungan kausal. Dan karena kemurnian kausalitas yang tercapai satu metode adalah mencari *causal inference* dengan menggunakan nalar logis dan pemikiran yang rasional, maka untuk itu diperlukan penguasaan teori dan kemahiran riset (Blalock, 1964).

Kelompok Kecil

Banyak penelitian di bidang ilmu sosial yang melakukan penelitian terhadap kelompok dengan jumlah pelaku sosial yang sangat terbatas atau "kelompok kecil". lebih-lebih dalam "pendekatan laboratorium", penggunaan "kelompok kecil" merupakan persyaratan, justru untuk dapat mengasingkan subyek penelitian tersebut dari pengaruh-pengaruh ekstern. Pada tahap penarikan contoh (*sampling*) sebenarnya kita juga bekerja berdasarkan kelompok yang relatif kecil, tetapi dapat mewakili populasi yang lebih besar. Namun demikian, dalam kenyataan juga banyak karakteristik atau ciri populasi yang kita abstraksikan atau asumsikan tidak berpengaruh (*think away*).

Penelitian kelompok kecil mempunyai kelebihan dalam mengungkapkan pola-pola interaksi antara pelaku sosial, karena sifatnya *microscopic*. Sifat-sifat kepribadian yang berpengaruh dalam interaksi demikian lebih mudah dilihat, tetapi untuk menarik generalisasi mengenai masyarakat yang lebih besar, mempunyai berbagai kelemahan. Dalam ilmu psikologi pendapat ini tidak sepenuhnya diterima oleh ilmu psikologi, yang justru melihat banyak kekuatannya (Hare dkk., 1966).

Akhirnya memang pilihan meneliti kelompok kecil atau masyarakat yang lebih besar adalah pilihan yang mengikuti selera pribadi peneliti. Apabila dilihat secara objektif dan alamiah, kedua pilihan saling melengkapi. Namun, untuk negara sedang berkembang dan sedang membangun seperti Indonesia, studi *microscopic* dirasakan kurang menyumbang kepada kebutuhan penentu kebijaksanaan dan pejabat eksekutif yang harus memutuskan dan memerlukan hasil penelitian sebagai dasar atau acuan dalam pembuatan kebijakan.

Referensi

Blalock, H.M.Jr.

1964. *Causal Inference in Non-experimental Research*. University of Carolina Press.

Gould, J. dan W.L.Kolb (ed).

1964. *A dictionary of the Social Sciences*. New York: The Free Press

Hare, A.P. dkk. (eds.).

1966. *Small Groups; Studies in Social interaction*. New york: A.Knopf.

Kaufmann, F.

1994. *Methodology of the Social Sciences*. London: Oxford University Press.

Merton, R.K.

1957. *Social Theory and Social Structure*. Glencoe: The Free Press.

Parsons, T.

1937. *The structure of Social Relations*. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Selltiz, C. dkk. (eds.)

1966. *_Reserch Methods in Social Relations_*. New York: Holt, Rinehart & Wiston.

Shipman, M.

1981. *mThe Limitations of Social Research*. London: Longman.

Weber, M.

1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. Glencoe: The Free Press.

RESENSI BUKU

PEREMPUAN JUGA INGIN DIPERHATIKAN

Dedi Haryadi¹

Judul Buku : *Gender, Small Scale Industry and Development Policy*
Editor : I.S.A Baud dan G.A. de Bruijne
Penerbit : IT Publications. London. 1993
Hal : x + 206

Isu utama yang ingin dikedepankan dalam buku ini adalah; *pertama*, peranan industri kecil dalam proses pembangunan, *kedua*, perubahan pembagian kerja gender dalam industri kecil. Kajian ini juga mencakup bagaimana perempuan mengkombinasikan tugas-tugas reproduktif dengan tugas-tugas kemasyarakatan, dan *ketiga*, mencoba menarik pelajaran yang bisa dipetik dari program- program pembangunan yang memang ditujukan bagi perempuan dalam industri kecil.

Buku ini muncul dari sebuah 'kekecewaan'. Selama ini analisis tentang peranan industri kecil terlalu ekonomis; yang dinilai selalu berapa kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Analisis itu tidak begitu peduli dengan siapa yang terlibat dalam dinamika industri kecil. Dari kondisi seperti itu, buku ini, menawarkan sebuah pendekatan baru, yakni pendekatan ekonomi plus perspektif gender. Dari sini kita bisa tahu, bahwa buku ini ingin, agar perempuan sebagai kelompok sosial yang banyak terlibat dalam dinamika itu lebih diperhatikan dan dinilai secara wajar. Dengan pendekatan baru ini penilaian kita tentang industri kecil dalam pembangunan, dan juga peranan perempuan dalam industri kecil bisa lebih mengena. Dan itu punya implikasi penting bagi formulasi kebijakan, apakah untuk mencari model pengembangan industri kecil atau dalam upaya peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan.

Sejak awal buku ini mengemukakan secara jelas apa yang dimaksud dengan kerja, kategori jenis pekerjaan produktif dan reproduktif dan juga definisi industri kecil (*small-scale enterprises*) (Baud, hal 4-5). Penjelasan itu harus kita pahami sebagai upaya memperjelas posisi buku ini.

Ekonom mengartikan kerja sebagai pertukaran tenaga dengan suatu imbalan tertentu, baik berupa uang maupun natura. Kita mengenal berbagai jenis pekerjaan produktif yang

¹ Alumnus Sosek Pertanian Unpad. Selama 1580 hari dari 1 November 1991 sampai 29 Februari 1996 menjadi peneliti di AKATIGA, sekarang peneliti pada PDP-UNPAD.

dilakukan perempuan, misalnya kerja dalam sistem produksi subsisten (non pasar), kerja dalam unit keluarga yang tidak dibayar dan kerja dalam sistem makloon. Semua jenis pekerjaan itu menjadi kajian buku ini. Sedangkan kerja reproduktif mencakup semua aktivitas perempuan yang secara langsung ditujukan untuk memelihara kelangsungan aktivitas keseharian mereka dan juga kelangsungan generasi kini dan generasi mendatang.

Definisi tentang industri kecil sangat variatif. Yang dimaksud dengan istilah industri kecil dalam buku ini, mencakup dua kategori, yaitu usaha kecil dan usaha mikro. Kriteria jumlah tenaga kerja menjadi pembeda jelas antara dua kategori itu; usaha kecil mengerjakan 10 sampai 50 orang, sementara usaha mikro mengerjakan 0 sampai 10 orang. Penggunaan kriteria tenaga kerja seringkali meninggalkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, kita tidak tahu bagaimana sebenarnya status pekerjaan dari mereka yang terlibat di situ; apakah sebagai pekerja paruh waktu, pekerja penuh waktu, magang, pekerja keluarga dsb. Bila kita menggunakan kriteria tenaga kerja untuk membedakan antara usaha kecil dan usaha mikro maka perbedaan status tenaga kerja seperti itu perlu diperhatikan.

Pendefinisian industri kecil berdasarkan kriteria tenaga kerja sebenarnya terlalu simpel. Teszler (hal 24) kemudian meng- kombinasikan indikator ukuran (jumlah tenaga kerja), tingkat teknologi dan kewirausahaan untuk membedakan kategori usaha mikro dengan usaha kecil. Menurutnya tipologi industri kecil bisa dipecah sebagai berikut:

1. Usaha mikro terdiri atas;
 - a. self-employment perorangan
 - b. self-employment kelompok
 - c. cottage industry (industri yang berbasis di rumah tangga yang memperkerjakan kurang dari 10 orang)
2. Usaha kecil terdiri atas;
 - a. usaha kecil yang menggunakan teknologi tradisional, tapi disertai kecenderungan bahwa teknologi itu akan berubah menjadi teknologi moderen.
 - b. usaha kecil yang menggunakan teknologi moderen yang disertai dengan kecenderungan semakin menguatnya keterkaitan dengan struktur ekonomi secara umum dan struktur industri secara khusus.

Pembedaan dan rincian jenis industri kecil seperti itu sangat berguna, karena dengan begitu kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai tipe usaha kecil. Selain itu juga kita bisa mengetahui respon yang muncul ketika kepada mereka diberikan satu-dua stimulus kebijakan.

Studi yang dilakukan Hetifah et al (1995) menunjukkan bahwa kinerja dan dinamika usaha kecil sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Beberapa penulis, Schmitz (1982) misalnya, menganggap relasi eksternal itu sebagai faktor dominan. Sistem keuangan, relasi dengan pemasok bahan baku dan teknologi, saluran pemasaran dan sistem subkontrak merupakan bagian dari relasi eksternal. Bagi usaha kecil sangat

penting untuk bisa mempengaruhi relasi eksternal. Proses usaha kecil mempengaruhi relasi eksternal bisa kita pahami melalui konsep jaringan industrial (*industrial network*).

Suatu jaringan industrial merupakan kelompok pedagang atau produsen yang melakukan siklus produksi dan pemasaran secara utuh untuk barang-barang final tertentu, dan dirancang untuk segmen pasar tertentu. Jaringan ini memperkuat pengusaha kecil dari sisi permintaan. Ini karena, menurut Knorringa dan Weijland (hal 35), sisi permintaanlah yang sangat menentukan kerawanan usaha kecil. Lagi pula bobot keamanan penciptaan lapangan kerja ada pada sisi permintaan. Kaitan dalam suatu jaringan industrial sering diaplikasikan dalam bentuk sistem subkontrak.

Sekarang ini adopsi sistem subkontrak mewabah ke negara-negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Tren ini berkaitan dengan dua hal; *pertama*, ada kebijakan liberalisasi untuk menciptakan kondisi yang baik bagi perkembangan industri ekspor. *Kedua*, undang-undang ketenagakerjaan tidak didukung oleh peraturan dan *law enforcement* yang kuat.

Berbagai bukti empirik menunjukkan bahwa pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan dan karena itu industri skala besar mendapat prioritas pengembangan telah memperlihatkan dua sisi kegagalan; pertama, struktur industri tidak terintegrasi, dan kedua; tidak mampu menyediakan pekerjaan bagi sebagian besar penduduk. Dari kondisi semacam ini jelas kelihatan bahwa kehadiran industri kecil bukan substitusi terhadap industri besar, karena bagaimanapun kedua kategori itu sangat berbeda. Akan tetapi yang bisa kita katakan adalah industri kecil merupakan komplemen (pelengkap) bagi keberadaan industri besar. Di sini kita melihat bahwa industri kecil sangat kompatibel dengan situasi pasar kerja; saat ini begitu banyak orang yang sedang mencari kerja, sementara itu ciri dan pendekatan pengembangan usaha kecil dan usaha mikro sangat padat karya. Jadinya klop.

Teszler menunjukkan (hal 27) bahwa usaha kecil dan usaha mikro mempunyai peran yang berbeda-beda sesuai dengan tahap-tahap pembangunan. Di negara-negara yang berpendapatan sedang dan tinggi dan juga di negara-negara industri baru (NICS), posisi usaha kecil yang moderen sangat penting, sementara itu usaha mikro berbasis teknologi tradisional cenderung mati. Di negara-negara berpendapatan rendah, usaha kecil dengan teknologi tradisional atau teknologi itu sedang mengalami modernisasi merupakan tulang punggung pembangunan industri. Dan di negara-negara yang berbasis sektor pertanian, usaha kecil dan mikro merupakan kutub pertumbuhan bagi usaha kecil di pedesaan.

Secara mikro kita perlu membedah bagaimana sebenarnya karakteristik *labour process* dan aspek gender dalam usaha kecil dan usaha mikro. Terutama Bab 4 sampai 8, menyajikan informasi mengenai hal itu. Konsep *labour process* mencakup tiga aspek (Bottomore, 267) yaitu; 1) *the work itself, a purposive productive activity* 2) *the object(s) on which that work is performed* dan 3) *the instrument which facilitate the process of work*. *Labour process* dalam dinamika usaha kecil dan usaha mikro mengalami perubahan ketika usaha kecil dan usaha mikro itu mengalami perluasan.

Dalam studinya tentang industri garment di India, Cawthorne menyimpulkan (hal 74) telah terjadi akumulasi dan konsentrasi kapital disegelintir orang, tanpa dibarengi dengan sentralisasi proses produksi. Proses ini dicirikan oleh 1) desentralisasi organisasi produksi, yang menggunakan tenaga kerja serabutan, 2) kategori pekerja yang digunakan sangat variatif, 3) pekerja upahan direkrut dengan sistem upah borongan dengan jam kerja yang sangat panjang dan 4) adanya pekerja yang tersembunyi dan jumlah mereka sangat besar, yaitu perempuan dan anak-anak.

Dalam industri kecil kita mendapati adanya segmentasi pasar tenaga kerja dan segregasi. Karena itu salah jika kita beranggapan ketenagakerjaan dalam industri kecil bersifat homogen. Heterogenitas dan segmentasi tenaga kerja terjadi berdasarkan kasta, etnis, regional, gender dan jenis pekerjaan.

Berdasarkan jenis pekerjaan misalnya, ada pemisahan yang cukup tajam antara jenis pekerjaan laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak-anak perempuan dan anak-laki-laki.

Di industri batik di Pekalongan dan industri keramik di Plered misalnya, pekerja perempuan dan anak-anak mengerjakan jenis-jenis pekerjaan ringan sementara laki-laki dewasa mengerjakan jenis pekerjaan berat. (Dedi Haryadi et al, 1995; Erna E Chotim, 1994). Adanya segregasi bisa dilihat dari proses rekrutasi: modus rekrutasi pekerja perempuan dan laki-laki berbeda. Juga, perempuan dan laki-laki mendapat jenis dan keahlian yang berbeda. Baud dalam studinya tentang industrialisasi di India dan Meksiko menunjukkan (hal 86-90) bahwa pekerja perempuan punya akses yang sangat rendah terhadap saluran formal untuk mendapatkan satu jenis keahlian. Biasanya mereka memperoleh keahlian itu secara informal melalui hubungan kekeluargaan atau pertetanggaan.

Studi yang dilakukan Smith di Desa Rankulan, Tasikmalaya, Jawa Barat (Bab 6) menarik untuk diungkap. Ia menemukan adanya hubungan antara status perkawinan perempuan dengan keterlibatannya dalam kegiatan produktif dan reproduktif. *"... married women remain ill-equipped for the labour market by their poor education and limited work experience, in addition to their home ties. Thus their work opportunities are limited to local, home based activities. These are mostly characterized by informal work organizations and flexible hours, but also by low remuneration"* (hal 108).

Ada dua pertanyaan penting yang diajukan untuk mengetahui hikmah apa yang bisa diambil dari berbagai program intervensi; pertama, bagaimana berbagai tipe organisasi yang berbeda bisa menjangkau perempuan yang bekerja dalam usaha kecil, lalu; strategi apa yang paling efektif untuk memperbaiki posisi perempuan dalam dunia kerja.

Banyak jenis lembaga yang menelurkan berbagai program intervensi terhadap usaha kecil; pemerintah, organisasi non-pemerintah (ornop), organisasi perempuan, bank, serikat pekerja dll. Kemampuan setiap institusi menjangkau kelompok sasaran berbeda-beda. Bank umum yang berukuran besar karena pertimbangan administrasi dan biaya dana sangat sulit menjangkau nasabah pengusaha kecil. Birokrasi pemerintah yang terlalu besar dan rumit juga jadi hambatan dalam meluaskan daya jangkau program. Di pihak

lain kita mendapati ornop yang relatif lebih baik menjangkau kelompok sasaran. Dalam kasus sistem subkontrak di India, Savara melihat perlunya sebuah organisasi massa, yang mampu melihat persoalan pada tingkat akar rumput dan juga isu-isu makro pembangunan. Untuk memperkuat kapasitas organisasi massa itu maka diperlukan bantuan teknis dan ekonomis (hal 127).

Berkaitan dengan strategi, ada beberapa strategi utama yang dipilih oleh berbagai organisai untuk meningkatkan posisi perempuan. Yang paling banyak digunakan adalah kredit dan pelatihan manajemen dan peningkatan keterampilan. Pemilihan kedua strategi itu bukannya tanpa masalah. Dalam kredit misalnya ada persoalan; perempuan seringkali tidak punya jaminan. Atau dalam hal pelatihan, seringkali perempuan tidak menyadari pentingnya program semacam itu, atau kalaupun sadar mereka tidak punya waktu untuk ambil bagian di dalamnya.

Hikmah atau pelajaran paling penting dari seluruh studi tentang program intervensi ini adalah kita perlu merancang berbagai strategi sesuai dengan variasi karakteristik kelompok sasaran. Seperti diketahui dalam industri kecil, kita mengenal berbagai status pekerja; ada pekerja paruh waktu, penuh waktu, magang, pekerja serabutan, pekerja keluarga dll. Setiap kategori pekerja itu membutuhkan suatu intervensi yang sangat spesifik. Tidak bisa disamaratakan. Misalnya, untuk pekerja keluarga, karena mereka tidak dibayar (non upah) maka intervensi perlu diarahkan pada upaya meringankan beban kerja. Di sini introduksi mesin penghemat tenaga atau waktu, akan sangat membantu.

Membaca buku ini akan memperkaya wawasan kita soal dinamika keterlibatan perempuan dalam usaha kecil dan mikro. Dari segi isi, semua isu yang dijanjikan dibahas dengan baik dan cukup lengkap, karena itu respon minimal yang perlu diberikan terhadap buku ini; foto kopi, lalu koleksi.

BERITA PERPUSTAKAAN

MANFAAT INTERNET UNTUK Mencari Informasi

Yulia Siswaningsih¹

Pendahuluan

Maraknya penggunaan jaringan komputer Internet di awal tahun 1990-an terdorong oleh adanya penancangan program telekomunikasi *Superhighway* Amerika Serikat oleh Bill Clinton, dimana Amerika telah mencapai tahapan yang disebut sebagai Revolusi Jaringan Kedua (*Second Information Network Revolution*). Revolusi pertama telah terjadi hampir satu dekade yang lalu sewaktu terbentuknya jaringan komputer Internet. Jaringan ini mampu membentuk berbagai komunitas informasi dan pengetahuan yang pengaruhnya terasa pada pengembangan teknologi informasi sekarang ini. Kondisi-kondisi tersebut kemudian memungkinkan setiap masyarakat di suatu negara mendapatkan informasi dari berbagai tempat di dunia, terutama dari negara-negara maju dimana informasi banyak dihasilkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis mencoba membantu menjelaskan secara singkat pemanfaatan jaringan komputer tersebut oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sangat membutuhkan berbagai informasi guna mendukung program-programnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat marginal. Artikel ini dimulai dengan pengenalan secara historis perkembangan jaringan komputer Internet itu sendiri; kemudian fasilitas apa saja yang dapat dimanfaatkan dari jaringan tersebut; permasalahan dan cara pemecahan serta penggunaannya di Indonesia khususnya pemanfaatan sarana ini di perpustakaan Yayasan AKATIGA.

Perkembangan Jaringan Internet

Jaringan Internet merupakan sebuah bentuk jaringan komputer raksasa yang dapat dihubungi dari berbagai pelosok dunia. Perkembangan teknologi ini diawali dari perkembangan teknologi komunikasi pada tahun 1454 yang dipelopori oleh Gutenberg, yaitu adanya penyampaian informasi kepada masyarakat luas dengan menciptakan mesin cetak. Berbeda pada masa-masa sebelumnya dimana informasi hanya dikuasai oleh kalangan terbatas, teknologi percetakan ini memungkinkan interaksi sesama manusia bertambah mudah dan efektif. Perkembangan selanjutnya adalah adanya penemuan tenaga listrik yang memungkinkan teratasinya hambatan fisik karena jarak yang jauh.

¹ Pustakawan AKATIGA, Pusat Analisis Sosial.

Sejak itu, pesan dapat disampaikan ke segala penjuru dengan seketika. Bentuk komunikasi elektronik yang pertama berkembang adalah telegraf dan telepon yang menggunakan kabel. Perkembangan di bidang sarana telekomunikasi ini kemudian meningkat sangat pesat dengan adanya teknologi penyiaran (*broadcasting*), yaitu radio dan televisi. Sejak itu komunikasi menjadi bersifat publik dan serentak.

Perkembangan sarana elektronik ini turut memacu perkembangan sarana komputer yang berawal dari perkembangan mikro elektronika sebagai perangkat pembentuk sarana komputer, yaitu dengan penemuan transistor pada tahun 1947. Sekitar tahun 1965, perkembangan sarana komputer berkembang sedemikian pesatnya dengan adanya penyatuan teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga melahirkan bentuk komunikasi baru, yaitu jaringan komputer. Adanya jaringan komputer ini melengkapi bentuk-bentuk komunikasi yang ada sehingga lebih memudahkan manusia untuk berinteraksi dan menyebarkan informasi.

Penyatuan teknologi telekomunikasi dengan komputer ini menyebabkan terjadinya suatu penundukan salah satu teknologi. Dalam hal *time-sharing* misalnya yang merupakan istilah komputer dalam artian bahwa waktunya yang dibagi-bagi, yaitu waktunya prosesor yang kemampuannya secara sekaligus dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pemakai melalui terminal. Hal ini turut pula mengubah fungsi komputer dimana sebelumnya hanya sebagai sarana pengumpul dan pengolah data menjadi penyebar data dan atau informasi.

Pesatnya perkembangan jaringan komputer, terutama jaringan Internet, dimulai dengan dibangunnya sebuah jaringan komputer oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada awal tahun 1969 melalui proyek ARPANet (*Advanced Research Project Agency*). Jaringan ini menghubungkan para peneliti di lingkungan universitas dengan personel militer. Jaringan ini kemudian melahirkan jaringan lain pada tahun 1986, yaitu National Science Foundation Network (NFSNet). Pada saat ini, jaringan tersebut berkembang menjadi jaringan yang sangat besar yang terdiri atas jaringan-jaringan seperti NFSNet, NASA Science Internet, universitas-universitas, perusahaan-perusahaan, dan banyak institusi lainnya.

Melihat perkembangan yang sangat pesat dalam bidang sarana komputer dan semakin terjangkau oleh masyarakat secara luas, teknologi informasi ini meluas ke seluruh dunia, tidak hanya di kalangan akademis tetapi merambah ke seluruh bidang kehidupan. Tidak hanya dilaksanakan di lembaga-lembaga besar tetapi juga di lembaga-lembaga kecil. Pada saat ini terdapat lebih kurang 5.000 jaringan di lebih dari 137 negara yang tergabung di Internet. Jaringan ini bukanlah milik organisasi tertentu. Internet hanyalah istilah dari jaringan regional, tulang punggung (*backbone*) dan lokal di seluruh dunia.

Fasilitas Jaringan Internet

Jaringan Internet memperkenalkan bentuk layanan informasi jarak jauh. Jaringan komunikasi data ini menggunakan sarana yang terdiri atas seperangkat komputer (termasuk *Personal Computer-PC*), sarana telekomunikasi (telepon, radio), dan modem (sarana untuk mengubah sinyal yang terdapat pada saluran komunikasi yang bersifat analog ke dalam sinyal yang dimengerti komputer yang bersifat digital dan sebaliknya).

Fasilitas yang terdapat dalam Internet diantaranya adalah surat elektronik (Electronic-Mail , disingkat *e-mail*) dan berita elektronik (dalam Internet disebut dengan **USENet**). Fasilitas-fasilitas ini seringkali disebut sebagai jaringan komunikasi data. Beberapa fungsi penting yang dipakai pada jaringan komunikasi data, yaitu surat elektronik (*e-mail*) konferensi komputer (*conferencing*), dan serta transfer file atau dokumen. Pada surat elektronik (*e-mail*) terdapat komunikasi dari satu orang ke orang lainnya. Sementara pada konferensi komputer (*conferencing*) terdapat suatu ruang pada jaringan komputer yang di- gunakan oleh banyak pemakai untuk membaca atau menulis pesan mengenai suatu hal. Sedangkan transfer file atau dokumen merupakan fasilitas pertukaran dokumen dengan format tertentu seperti spread- sheet, program-program komputer, dan lain sebagainya.

Ada beberapa jaringan komunikasi data yang terdapat di dunia dan secara umum di pakai oleh khalayak luas. Beberapa jaringan dikhususkan untuk kalangan akademis, beberapa diantaranya untuk para aktivis lingkungan hidup, dan beberapa lainnya dibangun untuk aktivis per- damaian, atau hanya sebagai sumber berita (seperti Reuter). Disamping itu kalangan bisnis/komersial juga mempergunakan untuk sarana pemasaran produknya, seperti IBM membuka akses untuk menjawab pertanyaan mengenai produk-produk IBM.

Jaringan komputer ini digunakan oleh masyarakat terutama untuk maksud-maksud sebagai berikut:

- Mendiskusikan artikel untuk dipublikasikan, penyuntingan, dan lay-out;
- Memo administratif mengenai rencana konferensi, jadwal dan rencana perjalanan, anggaran, laporan, dan lain-lain;
- Berita dan analisis mengenai suatu isu tertentu, misalnya penahanan masal (seperti terjadi di Malaysia), kudeta (seperti di Filipina), atau pembunuhan masal (seperti di Cina dan Timor Timur);
- Komunikasi antara staf lapangan dengan kantor pusat;
- Panggilan solidaritas untuk berbuat sesuatu dalam masalah-masalah pelanggaran hak asasi, pemogokan, dan kampanye lainnya;
- Pengumuman mengenai pub- likasi atau pelayanan baru;
- Permintaan informasi;
- Debat mengenai isu-isu penting;
- Pengumuman mengenai kon- ferensi dan pertemuan;
- Pertanyaan dan tanggapan mengenai masalah-masalah teknis.

Dengan menggunakan fasilitas yang terdapat pada jaringan Internet ini, memungkinkan upaya pencarian informasi yang dibutuhkan, terutama pada perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan aksesnya di jaringan Internet, misalnya perpustakaan Northern Territory University di Darwin, Australia yang memiliki pangkalan data (*database*) INTAN MAS yang berisi literatur tentang Indonesia Timur dan Australia Utara; perpustakaan *Australian National University* yang memiliki pangkalan data tentang studi Asia dan Pasifik; University North Carolina untuk dapat mengetahui berbagai naskah dari Gedung Putih dan lain sebagainya.

Dalam pencarian informasi, jaringan Internet ini menyediakan berbagai program bantu, seperti Archie, Veronica, Jughead, dan WAIS (*Wide Area Information Service*). Program

bantu Gopher memiliki kemampuan mengalih-kan proses pencarian dari satu komputer ke komputer lain bila informasi tidak ditemukan di komputer yang semula dituju. Selain itu juga Mosaic yang merupakan program yang dikembangkan oleh National Center for Supercomputing Application (NCSA) di University of Illinois Amerika Serikat, yang dapat menelusur informasi melalui sistem navigasi yang disebut WWW (World-Wide Web). Dengan WWW, informasi yang diakses dapat berupa teks, grafik, audio, maupun video (multi-media). Di samping penyediaan program bantu untuk pencarian informasi, jaringan Internet juga menyediakan wahana tukar informasi berupa USENet Group, yang memiliki fasilitas mirip dengan BBS (*Bulletin Board System*) yang meliputi lebih dari 5.000 subjek diskusi.

Permasalahan yang muncul dengan adanya jaringan Internet dan cara pemecahannya

Di samping memberikan dampak positif yaitu memberikan akses pada setiap orang untuk mendapatkan informasi dari mana-pun, jaringan Internet ini juga banyak menimbulkan masalah di masyarakat. Hal ini disebabkan adanya informasi yang tidak terseleksi yang kadangkala tidak sesuai dengan budaya suatu masyarakat tertentu.

Misalnya adanya informasi yang berisi pengaruh budaya luar yang tidak dapat diterima oleh suatu masyarakat tertentu yang kadang-kadang menimbulkan *culture shock* dan menimbulkan dampak sosial yang negatif. Contoh masalah yang sering muncul seperti akses untuk mendapatkan berbagai hal yang berbau pornografis dengan adanya akses membuka majalah PlayBoy atau sejenis melalui *Web site* di Internet. Hal ini dikhawatirkan tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat Barat yang liberal dengan hal-hal tersebut, tetapi menjadi konsumsi masyarakat Timur yang mentabukan hal yang demikian terutama bagi anak-anak. Persoalan lain yang muncul adalah adanya kejahatan baru karena terbukanya Internet untuk komersial dan hal ini memerlukan penanganan yang serius dari pihak penegak hukum. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut diantaranya penyusup komputer (*sneaker* dan *hackers*), pembajakan produk tertentu, pencurian uang (*salami slicing*), terorisme dan lain sebagainya. Bentuk kejahatan tersebut mempengaruhi pada keamanan dan kerahasiaan data.

Berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut diatas, misalnya untuk pengamanan transaksi kartu kredit pada Internet ini VISA bekerjasama dengan Microsoft mengembangkan teknologi sekuriti untuk transaksi yang diberi nama STT (*Secure Transaction Technology*). STT ini mulai dikembangkan sejak akhir tahun 1994. Teknologi ini menggunakan kemampuan *encryption* (pengacakan kode-kode sandi untuk merahasiakan informasi) dan tanda tangan digital (*digital signature*). Kemudian untuk mengoptimalkan pencarian data di hutan tak bertuan yang disebut sebagai *cyberspace*, saat ini terdapat berbagai panduan mencari informasi melalui fasilitas *search*. Beberapa fasilitas ini yang cukup dikenal diantaranya *Infoseek* (<http://www.Infoseek.com>) dan *Web-crawler* (<http://www.webcrawler.com>). Juga terdapat *earch* yang disediakan *homepage* terkenal semacam *Netscape* (<http://home.netscape.com/search.html>) dan *Yahoo* (<http://www.yahoo.com>). Fasilitas ini memungkinkan pengguna menghemat biaya akses dan biaya pulsa dalam mencari informasi. Selain itu fasilitas *search* terdapat pula penyimpanan di dalam harddisk untuk alamat-alamat yang dianggap penting, yaitu dalam

fasilitas *Bookmark* di Netscape dengan perintah File-Save As untuk nama alamat yang akan disimpan.

Pada dasarnya bagaimana Internet atau produk apa saja digunakan, pada akhirnya manusialah yang menentukan. Internet adalah barang mati yang tidak mungkin berfungsi tanpa keterlibatan manusia. Karenanya akan menjadi apa masyarakat setelah mengkonsumsi produk Internet juga bergantung pada manusia itu sendiri. Apakah ia akan menjadi manusia yang kreatif yang bisa memanfaatkan produk teknologi buat mendukung eksistensi dan aktualisasi dirinya, atautkah menjadi manusia yang bermutu rendah yang hanya bisa menerima apa saja yang masuk dalam otaknya tanpa disaring atau dikonfirmasi dengan fakta yang sebenarnya.

Perkembangan Jaringan Komputer di Indonesia

Upaya pengembangan jaringan informasi bagi ilmuwan di Indonesia sebenarnya telah dirintis sejak tahun 1971. Ketika itu muncul gagasan tentang jaringan informasi yang tercetus pada Lokakarya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Ilmiah di Bandung pada tanggal 22-24 Juli 1971. Dalam lokakarya ini dihasilkan 4 bentuk jaringan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna informasi. Keempat bentuk ini kemudian menjadi landasan dari perkembangan IPTEKNet yang sekarang ini. IPTEKNet adalah jaringan informasi IPTEK yang dilaksanakan oleh LIPI. Sejak tahun 1986, LIPI bersama-sama Dewan Riset Nasional (DRN) berupaya mengaktifkan jaringan tersebut serta mengubah konsep dasar IPTEKNet dari bentuk jaringan perpustakaan baik khusus maupun umum menjadi suatu jaringan jasa informasi IPTEK di Indonesia yang bertulang punggung pada teknologi informasi. Teknologi yang dimaksud adalah teknologi komputer dan telekomunikasi. Namun jaringan ini baru dapat interkoneksi dengan jaringan Internet pada bulan Mei 1994. Dengan adanya jaringan IPTEKNet ini membuka kemungkinan beberapa perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengakses jaringan Internet. IPTEKNet itu sendiri merupakan konsorsium dari beberapa lembaga penelitian (Bakosurtanal, BATAN, BPPT, dan LAPAN), perguruan tinggi (UGM, UI, ITB, Unair, Unhas, dan USU), perpustakaan (Perpustakaan Nasional, dan PDII-LIPI), pusat-pusat informasi (BPS, dan Departemen Perindustrian), serta IPTN yang dikoordinasikan oleh Dewan Riset Nasional.

Di samping upaya yang dilakukan DRN dan LIPI, tumbuh dan berkembang pula berbagai jaringan informasi lainnya yang berbasis komputer, terutama jaringan komunikasi data, dengan maksud memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat pengguna di Indonesia. Beberapa jaringan tersebut, diantaranya:

1. NUSANet, yakni jaringan yang dibuat untuk menunjang kegiatan LSM di Indonesia. Jaringan ini diprakarsai oleh INFID, Walhi, dan YLBHI pada bulan April 1993;
2. Indcee (*Indonesian Center for Energy and the Environment Network*) atau Jaringan Energi dan Lingkungan Indonesia. Jaringan ini diprakarsai untuk menjangkau LSM yang bergerak di bidang energi. Indcee didirikan pada tahun 1992 dan bergerak di bawah naungan Yayasan Pelangi Indonesia;

3. Bandung-Net (merupakan bagian dari paguyuban Net- work, yang merupakan nama lain dari IPTEKNet) yang berbasis radio. Jaringan ini berkembang bersama-sama ITB-Net yang sebagian besar penggunaannya adalah sivitas akademika ITB;
4. ICMI-Net yang berdiri tahun 1992, menyediakan informasi bisnis dan teknologi; serta jaringan lainnya.

Sementara itu terdapat pula beberapa pusat informasi yang berfungsi sebagai bank data atau pangkalan data dari instansi pemerintah, seperti PUSDATA di Departemen Perindustrian dan SDNP (*Sustainable Development Network Programme*), berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan dibiayai oleh dana UNDP; serta beberapa bank data dari surat kabar, seperti Kompas dan Republika.

Adanya akses yang terbuka bagi masyarakat di seluruh dunia pada tahun 1990-an juga telah memacu perkembangan *provider* (perusahaan pembuka akses ke jaringan Internet) di Indonesia. Sejak bulan Juni 1994 telah bermunculan provider terutama di Jakarta, seperti IndoInternet dan Radnet. Dengan adanya *provider* tersebut diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih mudah mendapatkan informasi di jaringan Internet, sehingga memungkinkan terwujudnya demokrasi dalam hal perolehan informasi. Perkembangan *provider* kemudian meluas ke kota lainnya. Di Bandung, perkembangan *provider* sejak September 1995.

Pemanfaatan Jaringan Internet di perpustakaan Yayasan AKATIGA

Pada saat ini perpustakaan Yayasan AKATIGA telah memanfaatkan keberadaan jaringan ini sejak bulan September 1993. Yayasan AKATIGA bergabung dengan jaringan NUSANet sebagai sarana untuk meng- hubungkan anggotanya ke jaringan Internet. Namun pemanfaatan secara optimal baru dilaksanakan sejak Maret 1995, karena berbagai kendala yang dihadapi Yayasan AKATIGA. Beberapa fasilitas yang diman- faatkan adalah e-mail yang digunakan sebagai sarana kores pondensi cepat serta beberapa bentuk conferencing (forum) yang disediakan NUSANet sesuai dengan bidang kajian Yayasan AKATIGA, seperti Indonesia. Forum, Nusa. Main, Nusa.Land, Nusa.Labour, Nusa.Women, Nusa.Enviro, Nusa.Human, Nusa.Koran, MDBS.Forum serta Support.Forum.

Layanan untuk pengambilan dan pengiriman data dan atau informasi, baik e-mail maupun forum, pada saat ini dijadwalkan setiap hari Selasa dan Jumat. Hal ini dimaksudkan untuk efektivitas kegiatan pengelolaan sarana elektronik ini, disamping banyak- nya kegiatan yang harus dilaksanakan perpustakaan setiap minggunya serta kendala biaya pulsa interlokal. Untuk data dan atau informasi yang didapat kemudian dicetak dan disistem- atisasi dalam bentuk pembuatan daftar berdasarkan tanggal diterima dan subyeknya, agar dapat dibaca oleh setiap staf AKATIGA. Data dan atau informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti, baik bagi kelancaran kegiatan AKATIGA secara umum (dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan e-mail) maupun untuk isu-isu yang dikaji (dalam hal ini data dan atau informasi yang berasal dari forum NUSA- Net). Beberapa forum tersebut juga telah dimanfaatkan oleh staf AKATIGA untuk mempromosikan beberapa kegiatan penelitian- nya dalam bentuk pembuatan abstrak.

Pemanfaatan yang telah dilakukan oleh Yayasan AKATIGA sebenarnya masih terbatas pada salah satu jaringan yang diadakan bagi kegiatan kerjasama LSM, jadi belum betul-betul secara optimal menggunakan jaringan Internet yang berkembang di dunia sekarang ini. Hal ini menyebabkan terbatasnya informasi yang diterima. Disamping karena keterbatasan fasilitas yang ada pada NUSANET itu sendiri yang belum bisa menyediakan bentuk jaringan multimedia seperti Web-site yang menjadi sarana penelusuran informasi di seluruh dunia. Perkembangan *provider* Internet di Bandung sendiri baru berkembang sejak bulan Desember 1995. Hal-hal inilah yang menjadi kendala dalam memperluas jaringan informasi yang dibutuhkan oleh Yayasan AKATIGA. Diharapkan pada periode program kerja tahun 1996-1998, Yayasan AKATIGA mulai dapat mengembangkan layanan informasi elektronik bagi pengguna informasi, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu yang menjadi *concern* LSM di Indonesia.

Referensi

Adam, B.M.

1995. Jangan sampai tersesat di cyberspace. Kompas, 11 Oktober 1995.

Andoko, Andrey

1994. Informasi cepat lewat jasa online. Kompas, 13 Juli 1994

Ikawati, Yuni dan Andrey Andoko

1994. Internet sebagai perwujudan masyarakat cyberspace. Kompas 23 Oktober 1994

INFID

1995. Pertemuan Forum INFID ke XIII: Carita, 21-23 Mei 1995.

Kompas

1994. Indonesia ketinggalan mengakses data Internet, 1 Desember 1994.

Maulana, Iqbal

1995. Tantangan moral dan sisi gelap jaringan global. Republika, 11 Mei 1995.

Media Indonesia

1995. Kejahatan komputer, 19 Oktober 1995.

Nasution, Zulkarimein

1989. Teknologi komunikasi dalam perspektif latarbelakang dan perkembangannya, buku ke satu. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Pactok

1992. Pactok: Pacific community computer communication prospectus. Pacific Community Computer Networking Project (Pactok), Sidney.
- Purbo, Onno W.
1994. Budaya jaringan komputer Internet: globalisasi dan profesional. Kompas, 26 Desember 1994.
- Republika
1993. Membangun infrastruktur informasi abad ke-21, 19 Februari 1993.
- Sari, Agus Pratama
1992. Laporan kerja praktek: komunikasi data dan aplikasinya pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Jurusan Elektro Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Indonesia, Serpong.
- Suara Pembaruan
1993. Jalan Raya informasi di negara kita, 29 November 1993.
- Sudarsono, B.
1989. Langkah-langkah membina sistem jaringan informasi IPTEK, Lokakarya Dokumentasi dan Publikasi Ketenagakerjaan: Jakarta, 29-30 Juni 1989.
- Suhartono, R
1995. Amankah transaksi di Internet. Kompas, 8 November 1995.
- Suryo, R.M. Roy
1995. Sejarah, perkembangan dan cara masuk Internet: informasi bebas hambatan. Media Indonesia, 10 Juli 1995.
- Tirtayadi, Irwan
1993. Mengenal Internet, jaringan komputer terbesar di dunia. Suara Pembaruan, 29 November 1993.
- Widyahartono, Bob
1983 Industri informasi dalam dekade 80 an. Alumni, Bandung.

SEPUTAR AKATIGA

Sebagai kegiatan rutin untuk memperdalam sekaligus memperluas wawasan, seluruh staff AKATIGA secara bergantian mengikuti berbagai forum seminar maupun diskusi masing-masing staff. Bagi mereka yang berminat mengetahui lebih lanjut mengenai topik-topik tersebut di bawah ini, dapat menghubungi AKATIGA.

PERTANAHAN

Selama bulan November 1995 sampai dengan Januari 1996, bidang kajian pertanahan mengikuti beberapa kali pertemuan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan Munas dan Lokakarya KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria). Lokakarya ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 7-10 Desember 1995.

Salah satu informasi penting yang cukup menarik dari Lokakarya dan Munas tersebut adalah peserta yang hadir (kira-kira 100 orang) terdiri dari berbagai NGO dan akademisi dari berbagai wilayah di Indonesia yang mempunyai kepedulian terhadap masalah agraria, yang semakin marak dalam dekade terakhir. Pada lokakarya ini dipresentasikan delapan makalah tentang berbagai persoalan agraria yang terjadi di masing-masing daerah dari peserta yang hadir yaitu Sumatera Utara, Sumatera Bagian Selatan, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi, dan Irian Jaya. Acara ini juga merupakan sarana bertukar pengalaman tentang persoalan agraria yang dihadapi NGO di berbagai daerah.

Setelah Munas berjalan cukup alot, akhirnya terbentuk struktur organisasi KPA yang diketuai oleh Noer Fauzy (LPPP) sebagai Ketua Badan Pelaksana KPA, dengan sekretariat di Jl. Kalijati Bandung.

PERBURUHAN

Bidang kajian perburuhan telah mengikuti *Munas SPSI* sektor tekstil di Pasuruan Jawa Timur, pada tanggal 23-24 Oktober 1995. Tujuan Munas ini untuk menyusun AD/RT dan juga membentuk pengurus baru.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober mengikuti *Dialog Hubungan Industrial* yang diselenggarakan Sisbikum di Gedung Metropolitan Jakarta. Ketika itu datang 4 orang tamu dari Amerika Serikat untuk mengetahui kondisi perburuhan di tanah air. Mereka menemui berbagai pihak diantaranya SPSI dan SBSI. Pertemuan kali ini adalah ingin menggali informasi mengenai hal yang sama dari sudut pandang LSM di Indonesia. Dari pihak LSM ini hadir antara lain, Sisbikum, 2 orang buruh dan juga dari forum solidaritas buruh. Aspek yang dibahas cukup luas, misalnya tentang kondisi kerja buruh, gerakan dan militansi buruh, campur tangan aparat keamanan dalam perselisihan perburuhan

serta, skema hubungan tripartit dalam konteks hubungan industrial. Pihak tamu juga bercerita soal perjuangan kaum buruh di Amerika Serikat. Karena sifat pertemuan hanya berbagi pengalaman, maka ujung pertemuan itu tidak konklusif.

Diskusi lain yang diikuti adalah diskusi tentang hubungan industrial yang diselenggarakan di LBH Jakarta tgl 7 Desember 1995. Dalam diskusi ini hadir seorang mahasiswa kandidat Phd dari The Ohio State University yang bernama Blair A King. Kedatangannya lebih ditujukan untuk mengenal situasi Indonesia dan aktor-aktor perburuhan di Indonesia yang mungkin kelak akan bisa membantunya dalam mengenali kondisi perburuhan dan gerakan buruh di Indonesia. Pertemuan ini juga dirancang untuk mendekatkan King pada kalangan LSM yang menggeluti masalah perburuhan. Dalam diskusi ini antara lain dibahas mengenai kaitan antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, dan juga peranan buruh (serikat buruh) dalam proses pendemokrasian.

USAHA KECIL

Selama kurun waktu November 1995 - Januari 1996 bidang kajian usaha kecil hanya mengikuti satu kali seminar yaitu *Seminar Nasional: Strategi Pengembangan Industri Kecil Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Rakyat* yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi - Tasikmalaya, pada tanggal 21 November 1995. Bersamaan dengan berkembangnya isu globalisasi, kita berramai-ramai menyelenggarakan seminar yang berkaitan dengan eksistensi usaha rakyat. Globalisasi, lebih tepat liberalisasi pasar dan investasi membuat kita khawatir tentang kelangsungan hidup dan prospek usaha kecil. Seminar yang diselenggarakan UNSIL bekerjasama dengan Kadin dan Pikiran Rakyat ini tidak terlepas dari iklim kekhawatiran semacam itu. Ada beberapa aspek penting yang dikaji dalam seminar ini, yaitu strategi dan kebijakan pemerintah tentang pengembangan usaha kecil, berbagai bentuk bantuan yang paling mungkin diberikan bagi pengembangan usaha kecil, peluang dan tantangan pengembangan industri kecil di masa depan, peranan perbankan dalam mendukung pengembangan industri kecil, perlunya peningkatan sumberdaya manusia pada industri kecil dan juga pentingnya peranan bapak angkat dalam pengembangan industri kecil.

PEREMPUAN

Diluar bidang-bidang kajian tersebut staff AKATIGA juga berkesempatan mengikuti acara *Penyusunan Modul Training Sosialisasi Konvensi Anti Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Kajian Wanita - Universitas Indonesia. Peserta pada kegiatan ini berasal dari kalangan akademis, LSM, IWRAW (*International Women's Right Activist Watch* atau Aktivis Pemerhati Hak-Hak Perempuan Internasional) dan instansi pemerintah diantaranya Departemen Tenaga Kerja yang sebagian besar merupakan peserta dari training sosialisasi konvensi yang diselenggarakan Pusat Kajian Wanita - UI di tiga kota yaitu Jakarta, Yogyakarta dan

Bandung. Trainingnya sendiri berisi penyadaran berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan yang masih banyak terjadi yang pada dasarnya bertentangan dengan pasal-pasal konvensi anti segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan yang telah diratifikasi Indonesia.

Dari pengalaman pengadaan training tersebut, disusun modul yang diharapkan bisa digunakan sebagai panduan atau pedoman teman-teman LSM maupun pihak-pihak lain yang akan mengadakan training atau sosialisasi Konvensi Anti Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Training Gender yang diselenggarakan oleh YPPS - Jakarta. Tampil menjadi fasilitator dalam kegiatan ini adalah Lies Marcoes dengan dibantu oleh Mansour Faqih. Status staf Akatiga yang hadir dalam acara ini bukan sebagai peserta melainkan untuk magang. Tujuan kegiatan ini adalah melatih calon pelatih untuk isu-isu gender (*Training for Trainers*). Adapun materi yang disampaikan dan didiskusikan selama 3 hari dimulai dari materi dasar mengenai isu seputar gender, kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan macam-macam permainan yang dilakukan untuk menggali persoalan-persoalan yang ada di masyarakat khususnya mengenai relasi antar seks.

Selain panitia dan fasilitator serta pemegang, peserta dalam acara ini terdiri dari berbagai kalangan mulai dari novelis, pemain dan pengisi suara sinetron, aktivis LSM dan gereja serta para biarawati. Sesuai dengan tema utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran gender di kalangan umat Kristen, maka seluruh peserta kegiatan ini beragama Kristen.

Pertemuan Kelanjutan Konferensi Internasional Tentang Perempuan di Beijing. Pada pertengahan Desember 1995, AKATIGA mengikuti Seminar-Lokakarya "Hasil Konferensi Dunia IV tentang Perempuan". Semiloka yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi ORMAS/ LSM untuk Perempuan tersebut dilaksanakan selama dua hari yakni pada 13-14 Desember 1995. Peserta yang hadir berjumlah lebih dari 40 orang dan berasal dari kalangan pemerintah, media massa serta organisasi non-pemerintah (sebutan untuk LSM). Semiloka ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan isu-isu penting dari "*Platform for Action*" yang menjadi pembicaraan kalangan pemerintah dalam konferensi Beijing 4-15 September 1995 yang lalu, termasuk isu-isu yang diangkat dalam pertemuan paralel yang dihadiri oleh ORNOP.

LAIN-LAIN

Pertemuan lain yang diikuti AKATIGA adalah *MDBs (Multi-national Development Banks) SKILLSHARE* yang diselenggarakan INFID (*International NGO Forum For Indonesia Development*). Tujuan penyelenggaraan acara ini adalah pertama, untuk bertukar pengalaman sebagai *focal point* dan calon *focal point*. Kedua mengembangkan kemampuan dalam pemahaman dan analisis terhadap kegiatan MDBs khususnya di Indonesia, serta belajar bagaimana mengakses dokumen-dokumen bank dan mendise-

minasikannya. Berbagai nara sumber ditampilkan baik dari kalangan aktivis LSM dalam dan luar negeri, juga dari staf bank sendiri.

Selain panitia, peserta dalam acara ini datang dari LBH Manado, LBBT dan Yayasan Plasma dari Kalimantan, AKATIGA Bandung, WIM Medan dan beberapa lembaga donor seperti Yapika, Ford Foundation, USAID, dll. Juga menghadirkan beberapa staf dari Bank Dunia dan juga staf dari LSM di luar negeri yang juga memiliki kegiatan monitoring MDBs seperti JANNI dari Jepang.

Di luar kegiatan-kegiatan di atas, AKATIGA berkesempatan mengadakan *Pelaksanaan Pelatihan Negosiasi Dampak Teknologi Baru Terhadap Pekerja Perempuan* Pelatihan negosiasi ini dilaksanakan sebagai bagian dari proyek penelitian 'Perubahan Teknologi dan Kesempatan Kerja Perempuan di Asia'. Tujuan pelatihan adalah mempersiapkan diri untuk tahap terakhir proyek yakni pertemuan antara LSM dengan pemerintah yang pada intinya merupakan media bagi peneliti dan aktivis untuk menyampaikan hasil penelitiannya mengenai topik tersebut di atas kepada para pengambil keputusan.

Isi pelatihan yang dilakukan selama 3 hari (13-15 November 1995) di Bogor adalah belajar menyusun rekomendasi yang muncul dari hasil penelitian. Penyusunan rekomendasi dilakukan secara serius dan dilengkapi dengan justifikasi dan argumen-argumen pokok dan didukung dengan bermacam-macam data yang relevan. Pelatihan ini dipandu oleh Shanti Dairiam, direktur IWRAW (International Women's Rights Activist Watch atau Aktivis Pemerhati Hak-hak Perempuan Internasional) dari Kuala Lumpur.

Pelatihan ini diikuti oleh 14 peserta yang seluruhnya berasal dari NGO yang secara spesifik memfokuskan perhatiannya terhadap buruh dan pekerja perempuan. NGO tersebut adalah: AKATIGA (Bandung), HUMANIKA (Surabaya), YASANTI (Yogyakarta), Institut Sosial Jakarta, INFID (Jakarta), Flower (Aceh), Solidaritas Perempuan (Jakarta), YPB (Jember), TBI (Depok), LBHN (Bandung) dan Sektor Tekstil DPP SPSI (Jakarta). Bahan yang dihasilkan dalam pelatihan ini digunakan oleh ke-4 mitra proyek untuk menyusun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pengambil keputusan di Indonesia dalam acara pertemuan di Bangkok bulan Maret mendatang.

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Proyek Konservasi Dan Pengelolaan Das Nasional Komponen Das Cimanuk Hulu. Pelatihan ini dilaksanakan di Garut 11-18 Januari 1996 oleh Lembaga Bangun Desa Sejahtera (LBDS), Kantor Proyek Garut dan Sumedang.

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan pendekatan partisipatif bagi para peserta guna menjadi mitra LBDS dalam memfasilitasi perencanaan partisipatif di desa-desa sasaran proyek. Peserta pelatihan ini adalah para aparat pemerintahan yang terkait langsung dengan proyek konservasi dan pengelolaan daerah aliran sungai seperti para Penyuluh Kehutanan Madya, beberapa utusan LSM lokal dan organisasi-organisasi kemasyarakatan setempat, dan para *field officer* LBDS. Pendekatan partisipatif yang diberikan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pada pelatihan ini diperkenalkan latar belakang kemunculan metode, prinsip-prinsip dasar, proses umum penerapan, dan beberapa teknik PRA terpilih, serta perspektif gender dalam konservasi tanah dan air.

Selain dilakukan di kelas, peserta berkesempatan juga melakukan praktek lapangan langsung di beberapa daerah yang menjadi lokasi proyek. Tampaknya metode ini merupakan metode yang relatif baru bagi sebagian besar peserta --yang kebanyakan aparat pemda setempat-- dan ini memberikan kegairahan tersendiri bagi mereka.

Beberapa fasilitator terlibat dalam pelatihan ini antara lain Rimbo Gunawan (Peneliti AKATIGA) yang memandu materi latar belakang dan prinsip-prinsip metodologi PRA, Munandar (Staf PDP Unpad) yang memandu teknik dan proses umum penerapan PRA, Budi Rajab (Antropologi Unpad) yang memberikan materi Gender, Dian (Fikom Unpad) memandu beberapa teknik PRA, Albert Munting (Staff Technical Assistance) yang membawakan materi konservasi tanah dan air, Sahar Hasan (GIP) yang memandu teknik-teknik komunikasi, dan fasilitator dari LBDS antara lain M. Uyang, Rimun Wibowo, dan Evelina Likitasari.

PUBLIKASI

Selama periode November 1995 sampai dengan Februari 1996 AKATIGA telah menerbitkan empat judul buku yaitu:

1. Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil. Penulis: Hetifah Sjaifudian, Dedi Haryadi, dan Maspiyati. Harga Rp.9.000,-
2. Buruh Anak dan Dinamika Industri Kecil. Penulis: Dedi Haryadi dan Indrasari Tjandraningsih. Harga Rp. 7.500,-
3. Menyingkap Retorika dan Realita: Refleksi dan Visi Jejak 50 tahun Indonesia. Penulis: Keluarga Besar AKATIGA. Harga Rp. 13.000,-
4. Usaha Rakyat Dalam Pola Desentralisasi Produksi Sub-kontrak. Penulis: Frida Rustiani dan Maspiyati. Harga Rp.8.000,-

Di luar judul buku di atas, AKATIGA telah menerbitkan 14 judul buku berkaitan dengan tema Usaha Kecil, Pertanahan dan Perburuhan. Pesanan buku bisa dialamatkan langsung ke AKATIGA.



AKATIGA pusat analisis sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif, dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. AKATIGA mengembangkan kegiatan-kegiatan pengembangan informasi, publikasi, dokumentasi, serta pelatihan. Hasil-hasil penelitian tersebut diolah menjadi informasi dan analisis yang ditujukan untuk perkembangan wacana maupun untuk menunjang kerja-kerja pemberdayaan dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi non pemerintah dan masyarakat akar rumput.

AKATIGA melakukan advokasi melalui kerjasama dengan jaringan-jaringan yang relevan, strategis dan mampu menjangkau komunitas/kelompok di lapisan bawah yang tersisihkan. AKATIGA juga mengembangkan jasa pelayanan dalam bentuk pelatihan metodologi penelitian yang terutama ditujukan kepada ornop. Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas analisis ornop dalam rangka menyusun strategi yang lebih tepat sasaran dan advokasi yang lebih kontekstual.

Seluruh kegiatan AKATIGA ditujukan untuk mendorong terbukanya peluang bagi perbaikan kehidupan kelompok miskin dan untuk membangkitkan kemandiriannya agar tidak terus tersisih dalam proses pembangunan.



AKATIGA

pusat analisis sosial

Jl. Tubagus Ismail II No. 2 Bandung 40134 - Indonesia

Telp: 022-2502302 - Fax: 022-2535824

Email: akatiga@indo.net.id

www.akatiga.org